



BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA DEPOK

2.1. Aspek Geografis dan Demografis Kota Depok

2.1.1. Aspek Geografis Kota Depok

Kota Depok secara geografis terletak pada koordinat : 6° 19' 00"-6° 28' 00" Lintang Selatan dan 106° 43' 00"-106° 55' 30" Bujur Timur. Kota Depok memiliki luas wilayah 200,29 km² atau 0,58 % dari luas Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan tiga kabupaten/kota dan dua provinsi yaitu :

Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

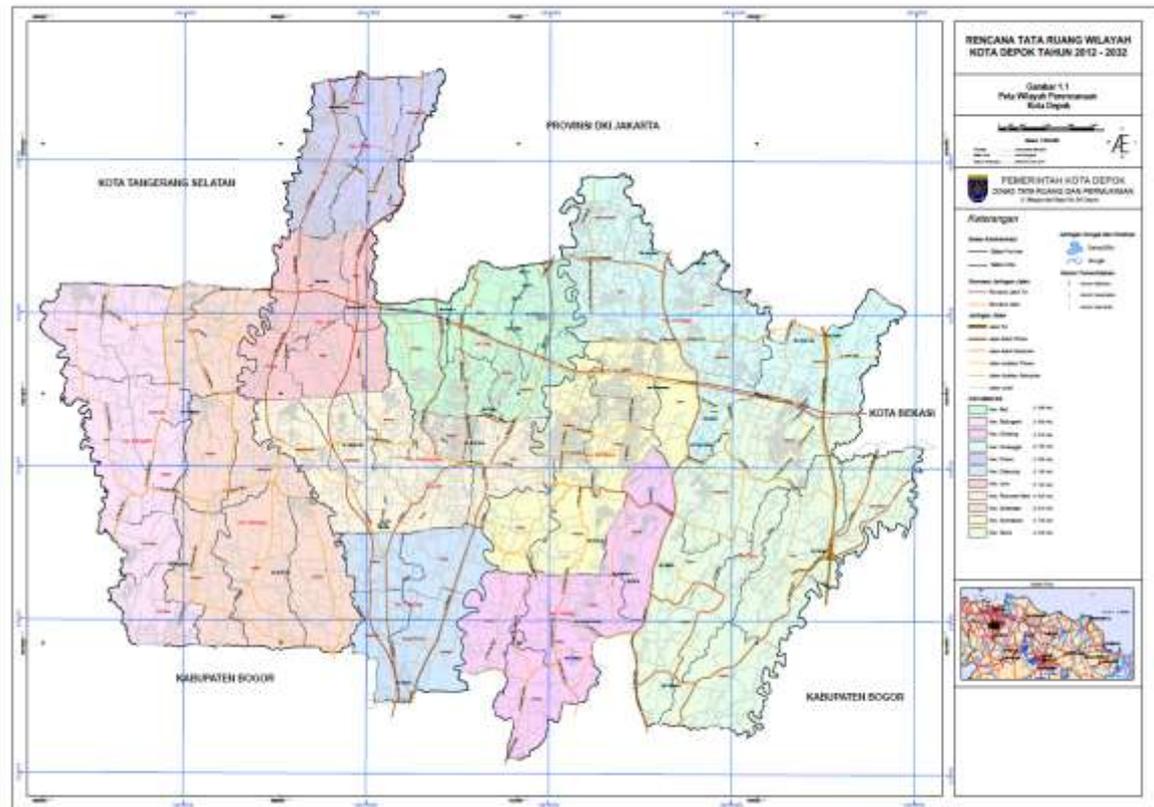
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Secara administratif, berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan di Kota Depok, Pemerintahan Kota Depok yang tadinya terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dimekarkan menjadi 11 (sebelas) Kecamatan yakni Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Limo, Kecamatan Beji, Kecamatan Cinere, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cilodong. Luas Wilayah menurut kecamatan di Kota Depok dan peta Wilayah Kota Depok dapat dilihat pada tabel 2.1 dan gambar 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	NO	KECAMATAN	LUAS (ha)
I	BEJI	1,456	VII	CINERE	1,055
1	Beji	194	33	Cinere	366
2	Beji Timur	71	34	Gandul	264
3	Kemiri Muka	169	35	Pangkalan Jati	268
4	Pondok Cina	335	36	Pangkalan Jati Baru	158
5	Kukusan	340	VIII	CIMANGGIS	2,158
6	Tanah Baru	347	37	Cisalak Pasar	181
II	PANCORAN MAS	1,803	38	Mekarsari	385
7	Pancoran Mas	350	39	Tugu	542
8	Depok Jaya	119	40	Pasirgunung Selatan	271
9	Depok	366	41	Harjamukti	592
10	Rangkapan Jaya Baru	382	42	Curug	187
11	Rangkapan Jaya	370	IX	TAPOS	3,326
12	Mampang	217	43	Tapos	632
III	CIPAYUNG	1,145	44	Leuwinanggung	425
13	Cipayung	214	45	Sukatani	476
14	Cipayung Jaya	235	46	Sukamaju Baru	425
15	Ratujaya	305	47	Jatijajar	265
16	Bojong Pondok Terong	220	48	Cilangkap	614
17	Pondok Jaya	171	X	SAWANGAN	2,619
IV	SUKMAJAYA	1,735	50	Sawangan	329
18	Sukmajaya	333	51	Kedaung	211
19	Mekarjaya	326	52	Cinangka	343
20	Baktijaya	253	53	Sawangan Baru	276
21	Abadijaya	267	54	Pengasinan	406
22	Tirtajaya	288	55	Bedahan	586
23	Cisalak	268	56	Pasir Putih	469
V	CILODONG	1,619	XI	BOJONGSARI	1,930
24	Sukamaju	433	57	Bojongsari	206
25	Cilodong	218	58	Bojongsari Baru	197
26	Kalibaru	328	59	Pondok Petir	307
27	Kalimulya	305	60	Serua	321
28	Jatimulya	335	61	Curug	421
VI	LIMO	1,184	62	Duren Mekar	191
29	Limo	413	63	Duren Seribu	287
30	Meruyung	216	KOTA DEPOK		20.029
31	Grogol	364			
32	Krukut	191			

Sumber : Naskah Akademis RTRW 2012-2032

**Gambar 2.1. Peta Wilayah Kota Depok**

Sumber : RTRW Kota Depok 2012-2032

A. Topografi

Secara umum topografi Wilayah Kota Depok di bagian Utara merupakan dataran rendah dengan elevasi antara 50 – 80 mdpl meliputi Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cinere, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya. Sedangkan dibagian tengah memiliki ketinggian 80 – 110 mdpl berada di Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya dan di bagian selatan merupakan perbukitan, bergelombang lemah dengan elevasi >110 mdpl meliputi Kecamatan Bojongsari,



Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Tapos.

B. Geologi

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terdiri dari:

- a. Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan lempung, debu dan pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan sedang-tinggi.
- b. Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya.
- c. Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.
- d. Komplek alluvial Coklat dan Alluvial Coklat Keabuan.
- e. Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari tufa vulkan andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus.
- f. Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.

C. Klimatologi

Wilayah Kota Depok termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson. Kondisi iklim di daerah Depok relatif sama.

Adapun kondisi iklim di Kota Depok sebagai berikut:

- Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius
- Kelembaban rata-rata : 82 %



- Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
- Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot
- Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
- Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun
- Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

Kondisi curah hujan di seluruh wilayah di daerah Kota Depok relatif sama dengan kadar curah hujan sepanjang tahun, yang ditandai oleh perbedaan curah hujan yang cukup kecil. Curah hujan di Kota Depok terdiri dari:

- a. 1500–2000 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
- b. 2000–2500 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
- c. 2500–3000 mm/thn, terjadi di bagian tengah wilayah Kota Depok,
- d. 3000–3500 mm/thn, terjadi di wilayah selatan–timur Kota Depok.

D. Sumber Daya Air

Di Kota Depok terdapat dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi kedua sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 6 sungai besar yang melintasi wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari SWS Ciliwung, antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Krukut serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran irigasi. Kesemuanya itu hanya melintas di Kota Depok dan bermuara di DKI Jakarta.

Selain itu, Kota Depok merupakan kota yang memiliki banyak situ atau danau. Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang potensial, dan merupakan salah satu bentuk kawasan lindung. Situ di Kota Depok



berjumlah 31 situ atau danau sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini. Beberapa situ sudah hilang karena mengalami alih fungsi menjadi perumahan dan pemukiman. Luas keseluruhan situ dan danau yang ada di Kota Depok berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2013 adalah kurang lebih seluas 159,15 Ha atau sekitar 0,79% luas Kota Depok. Kedalaman situ-situ yang ada Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter.

Situ-situ di Kota Depok belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk aktivitas kegiatan masyarakat sehari-hari. Sekitar delapan puluh enam persen (86%) penduduk Kota Depok memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya sebagai sumber air bersih dan empat belas persen (14%) berasal dari PDAM. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pemasukan air tanah di Kota Depok. Ketidakseimbangan ini dapat dilihat dari turunnya permukaan air tanah di Kota Depok sebesar dua puluh (20) cm per tahun.

Tabel 2.2 Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok

N O	SITU	LOKASI (KELURAHAN)	LUAS (ha)
1	Rawa Gede	Harjamukti	1,40
2	Gemblung	Harjamukti	7,20
3	Tipar	Mekarsari	8
4	Pedongkelan	Tugu	6,25
5	Gadog	Cisalak Pasar	1,30
6	Rawa Kalong	Curug	8,25
7	Patinggi	Tapos	5,50
8	Jatijajar	Jatijajar	6,50
9	Cilangkap	Cilangkap	6,00
10	Asih Pulo	Rangkapan Jaya	4,40
11	Rawa Besar	Depok Jaya	13,00
12	Pitara	Pancoran Mas	0,60
13	Telaga Subur	Pancoran Mas	1,50
14	Citayam	Bojong Pondok Terong	7,00
15	Pengasinan	Pengasinan	6,00
16	Bojongsari	Sawangan	28,50
17	Pladen	Beji	1,50
18	Universitas Indonesia (UI) 1, UI 2, UI 3, UI 4	Pondok Cina	17,50



19	Pasir Putih	Pasir Putih	-
20	Ciming	Bakti Jaya	1,50
21	Bunder	Cisalak	2,00
22	Sidomukti	Sukmajaya	7,50
23	Pengarengan	Cisalak	7,00
24	Cilodong	Kalibaru	9,50
25	Bahar	Sukamaju	1,25
26	Krukut	Krukut	-
27	Lembah Gurame	Depok Jaya	-
28	Cinere	Pangkalan Jati	-

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

E. Potensi Bencana Alam

Potensi rawan bencana yang terdapat di Kota Depok adalah rawan bencana banjir, rawan bencana longsor dan rawan bencana kebakaran. Kawasan rawan bencana banjir berada daerah perumahan di dataran rendah yang tersebar di Kelurahan Depok, Kelurahan Mampang, Kelurahan Tugu, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Cipayung. Faktor penyebab terjadinya bencana ini adalah karena durasi dan intensitas hujan yang tinggi, meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai, dan sistem drainase yang tidak memadai. Kawasan rawan longsor berada di sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Situ Pedongkelan. Sedangkan kawasan rawan bencana kebakaran terdapat di sekitar permukiman padat penduduk dan bangunan di Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Sukmajaya, dan Kelurahan Tugu.

F. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data hasil kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahun 2013 diketahui bahwa penggunaan lahan di Kota Depok didominasi oleh permukiman tidak teratur atau perkampungan seluas 8.008,83 ha atau sekitar 39,99 persendari total luas wilayah dan permukiman teratur atau perumahan seluas 3.541,01 ha atau sekitar 17,68 persen. Kawasan Permukiman yang terdapat di Kota Depok



meliputi kawasan permukiman teratur yang biasa dibangun oleh pengembang atau developer dan kawasan perumahan tidak teratur atau disebut juga kawasan permukiman perkampungan dan umumnya dibangun secara perorangan. Lahan yang juga terbilang cukup besar adalah ladang / tegalan/ lahan kering seluas 3.383,52 ha atau sekitar 16,39 persen dari total luas wilayah Kota Depok.

Kawasan permukiman tersebar di seluruh Kecamatan dan umumnya berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama. Kawasan permukiman yang berkembang dengan pesat Di Kota Depok yaitu kawasan permukiman teratur dan pengembangannya mulai mengarah ke arah Timur, Selatan dan Barat (Kecamatan Cimanggis, Tapos, Sawangan, Bojongsari, Cilodong dan Cipayung).

Berkembangnya permukiman di Kota Depok membawa dampak yang cukup besar terhadap beralihnya fungsi lahan, terutama lahan pertanian ke permukiman sehingga perlu adanya pembatasan dalam pemberian izin untuk pengembangan perumahan terutama pada lahan-lahan yang berfungsi sebagai sawah irigasi, selain itu juga pengembangan perumahan di Kota Depok harus sudah mengarah ke pembangunan perumahan secara vertikal terutama untuk kawasan-kawasan yang sudah padat penduduknya. Lebih jelasnya mengenai dominasi guna lahan di Kota Depok Tahun 2012 dapat di lihat pada **Tabel 2.3.**

TABEL 2.3.

PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 2012

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)
1	Permukiman Teratur (Perumahan)	3.541,01
2	Permukiman Tidak Teratur (Perkampungan)	8.008,83
3	Perdagangan dan Jasa/Perkantoran	157,11
4	Pendidikan Tinggi	214,58
5	Industri	251,79
6	Kawasan Khusus	77,73
7	Kawasan Tertentu	68,20



8	Pariwisata Lap Olah Raga	326,17
9	Hutan Kota	7,22
10	Kebun/Tegakan Pohon/Tanaman	1.793,20
11	Ladang / Tegalan/Lahan Kering	3.383,52
12	Rumput/Semak/Tanah Kosong	1.366,51
13	Sawah	232,37
14	Setu	142,40
15	Empang	376,52
16	Sungai	82,05
Jumlah		20.029,00

Sumber : Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



G. Potensi Pengembangan Wilayah

Pesatnya perkembangan Kota Depok memunculkan kompetisi dalam mendapatkan ruang kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut tersedianya perumahan dan fasilitas lainnya yang membutuhkan ruang kota yang tinggi pula. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpotensi memunculkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dengan makin sempitnya ruang terbuka hijau. Pemerintah berkewajiban menyediakan ruang kota yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah melalui penyediaan ruang publik seperti taman kota yang aman dan nyaman.

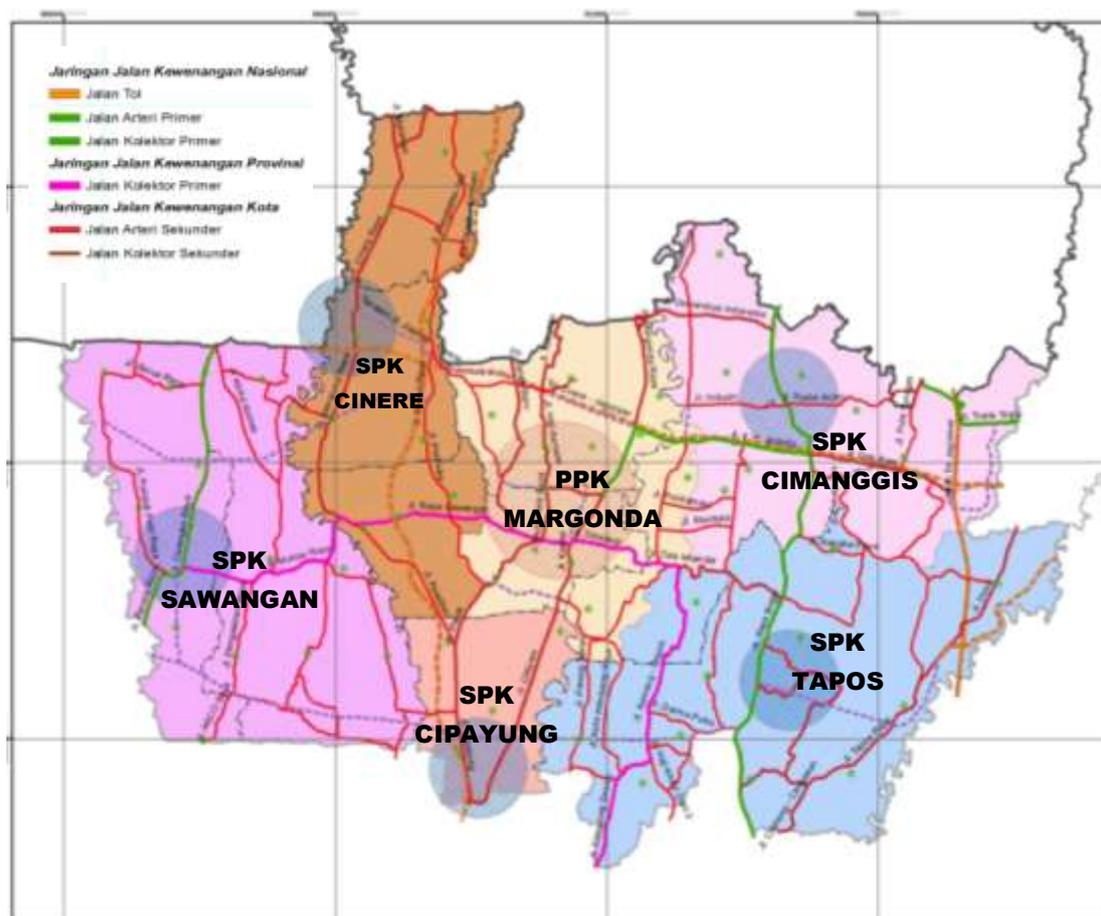
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kota, yang berisi rencana operasional pembangunan Wilayah Kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Depok meliputi : 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang Wilayah Kota, 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Wilayah Kota; dan 3) kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Kota. Kebijakan dan strategis tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang kota merupakan sistem pusat pelayanan kegiatan yang rencana pengembangannya untuk Kota Depok terdiri dari pusat pelayanan kota (PPK), subpusat pelayanan kota (SPK), pusat lingkungan (PL) serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing-masing sub wilayah tersebut sebagaimana tercantum pada gambar dibawah ini yang meliputi:



1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Margonda sebagai pusat pelayanan yang melayani seluruh Wilayah Kota dan/atau regional;
2. Subpusat Pelayanan Kota (SPK) Cinere, Cimanggis, Tapos, Sawangan dan Cipayung sebagai pusat pelayanan yang melayani sub Wilayah Kota; dan
3. Pusat Lingkungan (PL) sebagai pusat pelayanan sekunder 2 yang melayani skala lingkungan wilayah kotadapat mencakup satu kelurahan atau beberapa Kelurahan.

Gambar 2.2 Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah di Kota Depok sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini meliputi:



1. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa berskala regional;
2. pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis; dan
3. pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa.

Tabel 2.4. Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

No	Nama SPK/PPK	Lokasi		Arah Pengembangan Sektor
	PPK	Beji	Beji, Beji Timur, Kemiri Muka, Pondok Cina, Kukusan dan Tanah Baru,	1. kantor pemerintahan 2. pendidikan tinggi 3. perdagangan dan jasa skala regional 4. terminal terpadu 5. perumahan kepadatan tinggi (vertikal) 6. konservasi budaya dan 7. RTH kota
		Pancoran Mas	Mampang, Depok, Depok Jaya dan Pancoran Mas	
		Sukmajaya	Mekarjaya dan Tirtajaya	
	SPK CINERE	Cinere	Cinere, Gandul, Pangkalan Jati dan Pangkalan Jati Baru.	1. Pariwisata 2. pendidikan tinggi 3. perdagangan dan jasa skala subwilayah kota 4. perumahan kepadatan sedang dan 5. RTH kota
		Limo	Limo, Meruyung, Grogol dan Krukut.	
		Pancoran Mas	Rangkaian Jaya dan Rangkaian Jaya Baru	
	SPK SAWANGAN	Bojongsari	Bojongsari, Bojongsari Baru, Pondok Petir, Serua, Curug, Duren Mekar dan Duren Seribu.	1. pariwisata; 2. perdagangan dan jasa skala regional (jasa pergudangan); 3. agrobisnis (tanaman hias, buah, ikan hias); 4. pertanian; 5. perumahan kepadatan rendah dan
		Sawangan	Sawangan, Kedaung, Cinangka, Sawangan Baru, Pengasinan, Bedahan, dan Pasir Putih	



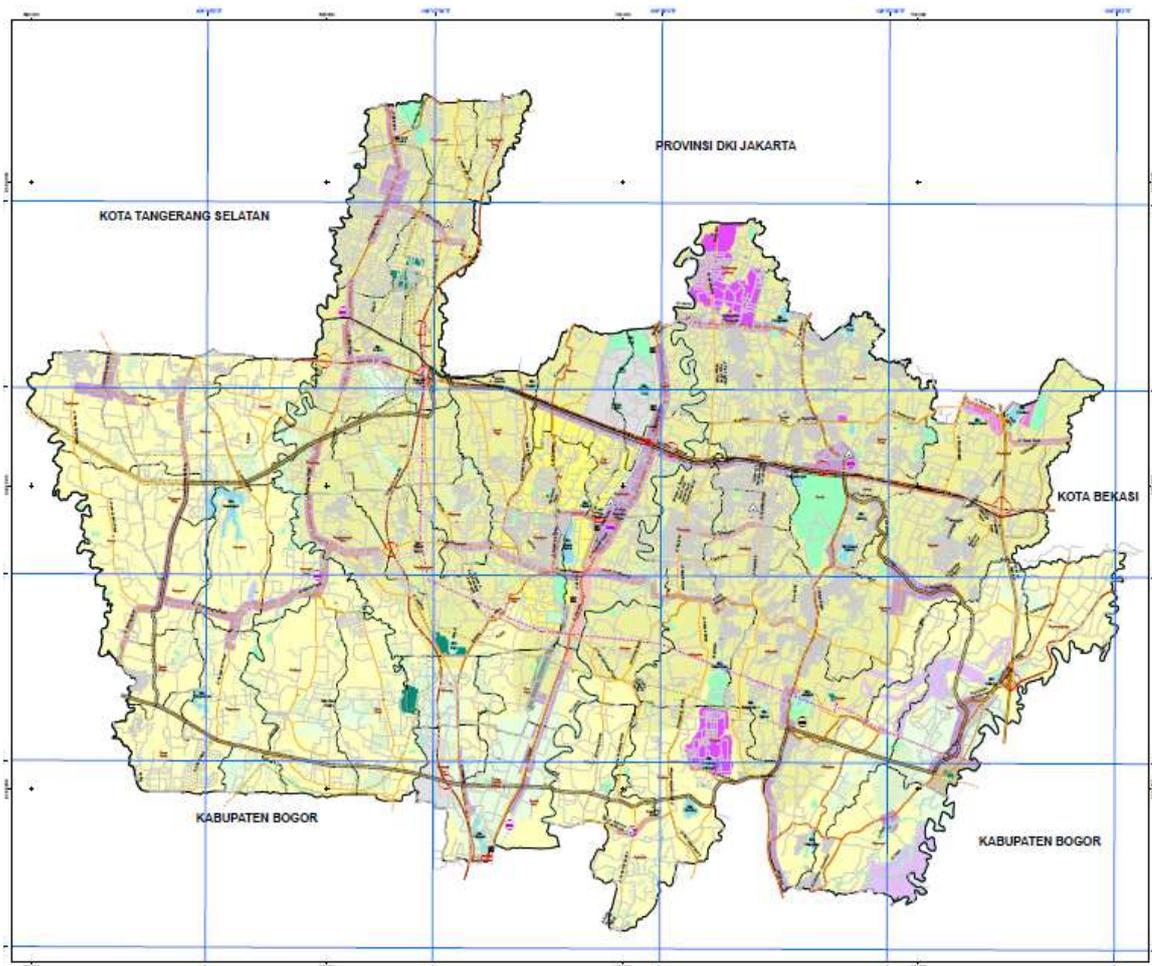
No	Nama SPK/PPK	Lokasi		Arah Pengembangan Sektor
				6. RTH kota
	SPK CIPYAUNG	Cipayung	Cipayung, Cipayung Jaya, Ratu Jaya, Bojong Pondok Terong dan Pondok Jaya	1. perdagangan dan jasa skala subwilayah kota 2. perumahan kepadatan rendah; 3. kawasan SNADA; 4. industry; dan 5. RTH kota.
	SPK TAPOS	Cilodong	Sukamaju, Cilodong, Kalibaru, Kalimulya, dan Jatimulya	1. perdagangan dan jasa skala regional; 2. terminal tipe A; 3. industri; 4. jasa pergudangan; 5. perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah; 6. pusat sosial budaya; 7. kawasan pertahanan dan keamanan Negara 8. RTH Kota
		Sukmajaya	Sukmajaya	
		Tapos	Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, Cimpaeun, Tapos dan Leuwinanggung	
	SPK CIMANGGIS	Cimanggis	Cisalak Pasar, Mekarsari, Tugu, Pasirgunung Selatan, Harjamukti dan Curug	1. perdagangan dan jasa skala regional; 2. industri; 3. perumahan kepadatan sedang; 4. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan 5. RTH kota.
		Sukmajaya	Cisalak, Baktijaya dan Abadijaya	
		Tapos	Sukatani	
	PL	Seluruh Kelurahan		kegiatan pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032



H. Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pengembangan pola ruang di Kota Depok dilaksanakan melalui perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air di Kota Depok memiliki luas \pm 882,30 Ha yang tersebar di Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Cimpaeun, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Tapos, dan Kelurahan Leuwinanggung.

Gambar 2.3 Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

Sumber : RTRW Kota Depok tahun 2012-2032

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung :
 - a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - b. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota.
2. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya:
 - a. pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa secara seimbang;



- b. pengelolaan pertumbuhan kawasan budi daya untuk membentuk ruang kota yang kompak dan efisien dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. penyediaan fasilitas keagamaan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Tabel 2.5. Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

No	Pola Ruang	Luas (Ha)
	Kawasan Lindung	2.037,34
1	Situ/Danau	152,79
2	Sungai	18,74
3	Kawasan Resapan Air	994,45
4	Sempadan Situ/Danau	187,80
5	Sempadan Sungai	464,77
6	Sempadan Infrastruktur	211,19
7	Kawasan Lindung Lainnya	7,60
	Kawasan Budidaya	17.991,65
8	Perumahan Kepadatan Tinggi	447,55
9	Perumahan Kepadatan Sedang	6.786,95
10	Perumahan Kepadatan Rendah	5.307,38
11	Kawasan Perdagangan dan Jasa	1.121,55
12	Kawasan Perkantoran	74,03
13	Kawasan Peruntukan Industri	338,03
14	Ruang Terbuka Hijau	2.704,45
15	Kawasan Pertanian	432,66
16	Fasilitas Penunjang Pertanian	33,35
17	Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara	157,76
18	Fasilitas Pendidikan	244,26
19	Fasilitas Kesehatan	4,91
20	Fasilitas Olahraga dan Rekreasi	253,31
21	Fasilitas Transportasi	32,90
22	Infrastruktur Kota	52,56
	Total Jumlah	20.029,00

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032



Kawasan Strategis Kota merupakan aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi, memiliki potensi ekspor, didukung dengan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, dan memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Kawasan strategis Kota Depok dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:

1. Kawasan Margonda meliputi sebagian Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, dan Kelurahan Depok merupakan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional
2. Kawasan Bedahan yang meliputi Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, dan Kelurahan Pasir Putih merupakan sentra agroindustri untuk pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias.
3. Kawasan Meruyung terdapat di Kelurahan Meruyung merupakan kawasan wisata meliputi wisata religi Kubah Mas dan wisata alam Kampung 99 dilengkapi pusat penjualan produk lokal Kota Depok.
4. Kawasan SNADA terdapat di Kelurahan Cipayung Jaya dan Kelurahan Bojong Pondok Terong merupakan pengembangan kawasan perdagangan, pelestarian budaya, dan kawasan pendidikan terpadu.

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Depok

Berdasarkan data BPS, total penduduk Kota Depok pada Tahun 2015 berjumlah 2.106.102 jiwa dengan persentase pertumbuhan penduduk sebesar 3,57% dari jumlah penduduk tahun sebelumnya. Adapun komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.044.213 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.061.889 jiwa.



Dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata Kota Depok Tahun 2015 mencapai 10.515 jiwa/km² dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sukmajaya (15.608 jiwa/km²) disusul Kecamatan Beji (14.064 jiwa/km²) dan Pancoran Mas (14.011 jiwa/km²). Sedangkan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Sawangan (5.777 jiwa/km²) dan Bojongsari (6.098 jiwa/km²).

Tabel 2.6. Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Kepadatan di Kota Depok Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk / (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sawangan	76.254	73.441	149.695	25,91	5.777
2	Bojongsari	61.392	59.426	120.818	19,81	6.098
3	Pancoran Mas	128.384	126.632	255.016	18,20	14.011
4	Cipayung	78.785	76.173	154.958	11,63	13.323
5	Sukmajaya	139.707	141.710	281.417	18,03	15.608
6	Cilodong	76.545	74.896	151.441	16,08	9.417
7	Cimanggis	148.301	144.831	293.132	21,22	13.813
8	Tapos	131.705	130.218	261.923	32,33	8.101
9	Beji	101.824	99.151	200.975	14,29	14.064
10	Limo	53.963	52.582	106.545	12,32	8.648
11	Cinere	65.029	65.149	130.178	10,47	12.433
	Kota Depok	1.061.889	1.044.213	2.106.102	200,29	10.515

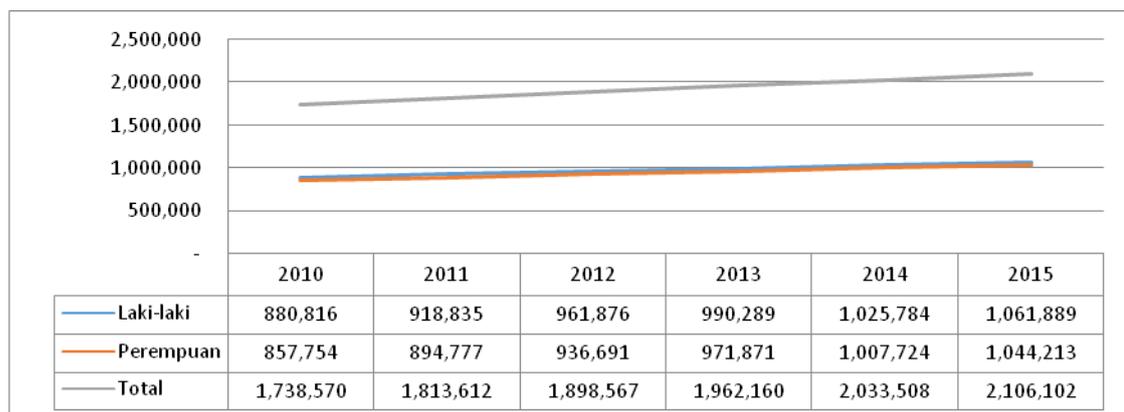
Sumber : BPS Kota Depok tahun 2015

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di Kota Depok dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor tingginya angka kelahirannya yang disebabkan karena tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, hingga mempengaruhi tingkat fertilitas / kelahiran maupun mortalitas / kematian penduduk Kota Depok dan faktor demografis yang menyebabkan tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, dimana Kota Depok merupakan wilayah penyangga dan pendukung aktifitas perekonomian Ibu Kota Negara, yakni DKI Jakarta, sehingga menjadi wilayah yang sangat strategis untuk permukiman, selain tentunya sebagai kota jasa dan perdagangan.



Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai akan menimbulkan risiko bagi munculnya berbagai persoalan sosial ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, dan tindakkriminal. Hal ini direspon oleh Pemerintah Kota Depok dengan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan hidup dari berbagai aspek. Trend pertumbuhan penduduk Kota Depok dalam enam tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1. Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2010–2015



Sumber: Depok Dalam Angka 2010 – 2015

Berdasarkan usianya, proporsi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 72,34%, usia muda (0-14 tahun) ada 25,76%, dan usia lanjut (65 tahun keatas)mencapai 3,24%. Dengan demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok mencapai 40,84 persen pada Tahun 2015.

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Depok masih lebih tinggi daripada perempuan. Namun demikian perbedaannya tidak terlalu besar, hanya selisih 1,69 persen. Hal ini dapat dilihat dari sex ratiototal penduduk Kota Depok sebesar 101,69. Senada dengan total penduduk, jika dilihat berdasarkan kelompok umur, sex ratio laki-laki terhadap perempuan penduduk Kota Depok hampir sebagian besar masih di atas 100 persen.



Tabel 2.7. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Persentase dan Sex Ratio di Kota Depok Tahun 2015

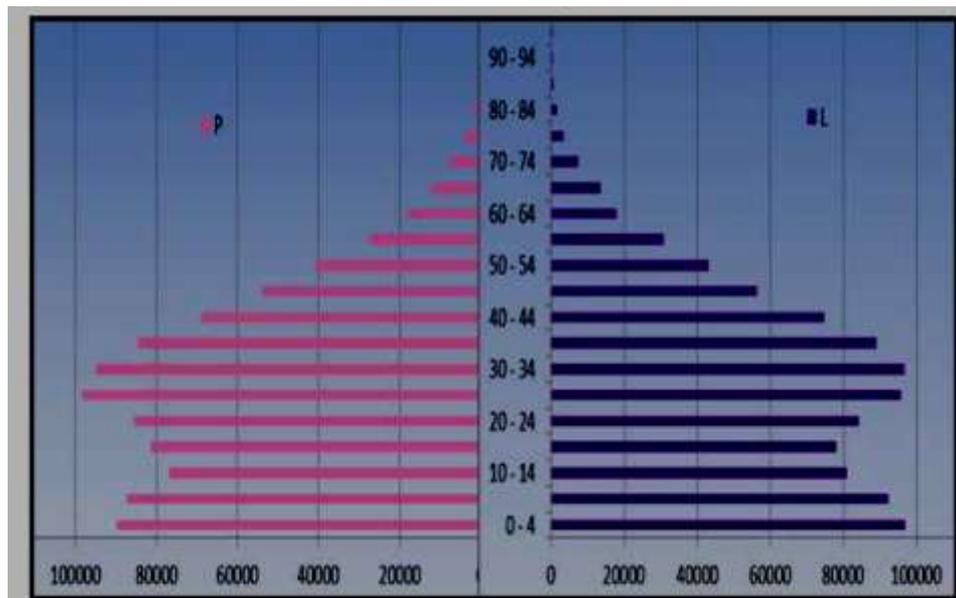
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 - 4	104.353	98.478	202.831	9,63	105,97
5 - 9	92.320	87.579	179.899	8,54	105,41
10 - 14	81.604	78.192	159.796	7,59	104,36
15 - 19	85.866	89.744	175.610	8,34	95,68
20 - 24	95.383	96.824	192.207	9,13	98,51
25 - 29	96.283	98.720	195.003	9,26	97,53
30 - 34	101.330	100.883	202.213	9,60	100,44
35 - 39	96.726	95.061	191.787	9,11	101,75
40 - 44	87.119	81.976	169.095	8,03	106,27
45 - 49	68.975	66.600	135.575	6,44	103,57
50 - 54	53.298	52.182	105.480	5,01	102,14
55 - 59	40.163	38.543	78.706	3,74	104,20
60 - 64	25.546	24.177	49.723	2,36	105,66
65 - 69	16.705	15.528	32.233	1,53	107,58
70 - 75	9.264	9.457	18.721	0,89	97,96
75+	6.954	10.269	17.223	0,82	67,72
Jumlah	1.061.889	1.044.213	2.106.102	100	101,69

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2015, Proyeksi Penduduk

Komposisi penduduk Kota Depok didominasi oleh usia produktif, seperti pada grafik 2.2. dan diperkirakan dalam 5 tahun kedepan, komposisi itu tidak berubah secara drastis. Pemerintah harus melakukan antisipasi dengan membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan. Industri kreatif dapat menjadi alternatif peluang usaha yang potensial, karena tidak tergantung pada sumberdaya alam dan sifatnya unik. Oleh karena itu pengembangan *center of excellence* sebagai pusat pelatihan industri kreatif bagi pemuda sangat diperlukan.



Grafik 2.2. Komposisi penduduk Kota Depok menurut kelompok Usia



Dalam 5 tahun ke depan jumlah penduduk Kota Depok diprediksikan akan terus meningkat, sesuai dengan prediksi dalam RPJP, sampai 2025 trend jumlah penduduk seperti gambar berikut :

Grafik 2.3. : Tren jumlah penduduk Kota Depok sampai 2025



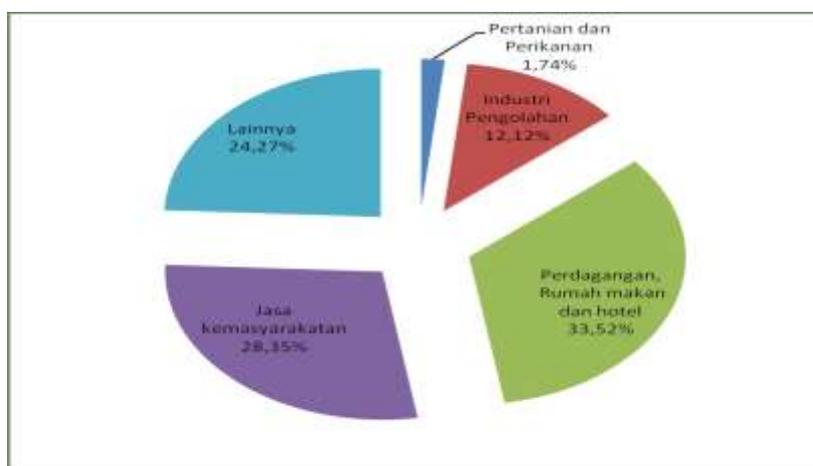
Sumber:RPJPD 2006-2025



Dari sisi lapangan pekerjaan utama, pada Tahun 2015 komposisi penduduk Kota Depok berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan sebesar 1,74% dari total angkatan kerja, sektor industri pengolahan sebesar 12,12%. Sementara dari sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 33,52 persen merupakan sektor

terbesar yang menyerap tenaga kerja. Sektor jasa kemasyarakatan sebesar 28,35% dan sektor jasa lainnya (penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan) menjadi pilihan pekerjaan bagi 24,27 % penduduk (Grafik 2.4).

Grafik 2.4. Komposisi Penduduk Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015



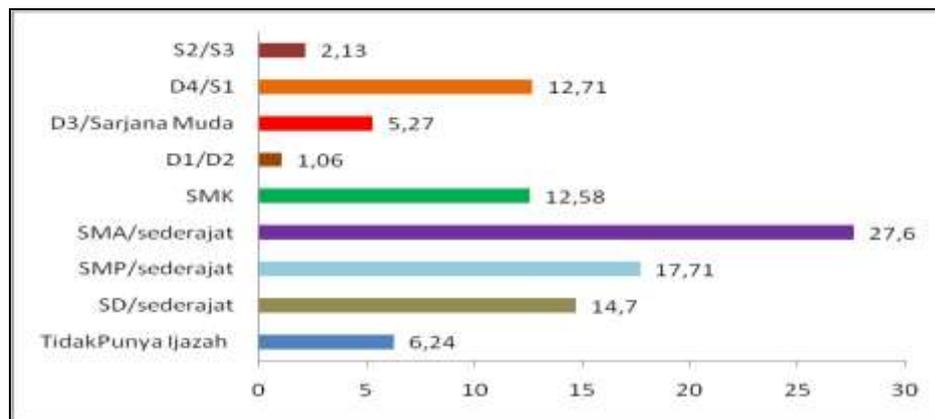
Sumber : Diolah dari Inkesra Kota Depok Tahun 2015

Dari sisi pendidikan, berdasarkan data persentase penduduk Kota Depok Tahun 2014 berusia 10 tahun ke atas yang tidak sekolah lagi menurut ijazah yang dimiliki, proporsi yang memiliki ijazah SMA/ sederajat menempati urutan terbesar yaitu sebesar 40,18%, tamat SMP/ sederajat sebesar 17,71%, tamat D3/ Sarjana muda sebesar 5,27%, tamat S1 sebesar 12,71%, tamat S2 sebesar 2,13%.

Adapun penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak sekolah lagi dan memiliki ijazah SD /sederajat sebagai ijazah tertingginya sebesar 14,7%. Sementara penduduk yang tidak mempunyai ijazah di Kota Depok pada tahun 2014 sebanyak 6,24%.



Grafik 2.5. Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun keatas yang Tidak Sekolah Lagi menurut Ijazah yang dimiliki Tahun 2015



Sumber : Diolah dari Inkesra 2015

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan di bidang sosial.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial.

2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

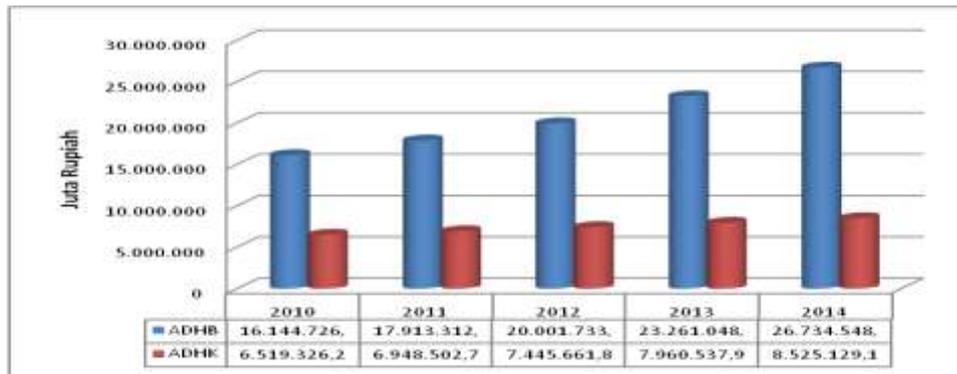
Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :



- a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, dan jasa-jasa lainnya.
- b. Untuk mengetahui struktur perekonomian.
- c. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan.
- d. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

Dari sisi produksi (*supply side*), dengan tolok ukur PDRB pada Tahun 2014 (Data yang dipublikasikan BPS pada Tahun 2015), kondisi ekonomi Kota Depok mencapai Rp. 8.525.129,16 juta atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2000. Jika dibandingkan dengan PDRB Tahun 2013 (ADHK 2000) yang mencapai Rp. 7.960.537,94 juta, maka dimensi ekonomi wilayah Kota Depok mengalami peningkatan. PDRB ADHK adalah tolok ukur paling baik untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah karena faktor inflasi (kenaikan) harga tidak dihitung pada indikator tersebut, sehingga menunjukkan kenaikan/penurunan secara riil. Jika menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dikhawatirkan analisis perkembangan ekonomi suatu wilayah memberikan gambaran pertumbuhan semu, karena bisa jadi jumlah produk tidak meningkat tetapi akibat harga produk meningkat (inflasi) maka terkesan terjadi pertumbuhan ekonomi.

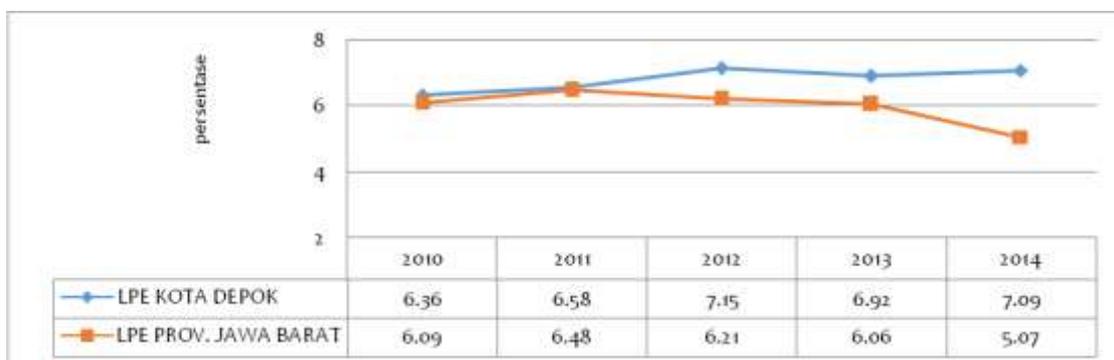
Perkembangan PDRB (ADHK 2000) Kota Depok dari 2010-2014 dapat dilihat pada grafik 2.6. Berdasarkan grafik tersebut, menunjukkan terjadinya peningkatan nilai produk secara riil di Kota Depok. Peningkatan nilai produk bisa mengindikasikan terjadinya penambahan investasi, merekrut lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatannya pendapatan para pekerja (masyarakat).

**Grafik 2.6. PDRB Kota Depok Tahun 2010 – 2014 (dalam juta rupiah)**

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2015

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun terakhir (2014), berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok yang dipublikasikan pada Tahun 2015 adalah sebesar 7,09 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (6,92 persen). Angka ini juga lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan rata-rata Jawa Barat, yaitu 5,07 persen, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen tahun 2014. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dalam kurun 5 tahun, dapat dicermati pada Grafik 2.7.

Grafik 2.7.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota DepokTahun 2010-2014(dalam %)

Sumber: PDRB Kota Depok Tahun 2014



Peningkatan ekonomi Kota Depok tahun 2014 ini ditopang oleh kenaikan kontribusi sektor jasa pemerintahan umum dan swasta yang meliputi jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga, sektor pertanian, industri pengolahan, serta angkutan dan komunikasi. Inflasi Kota Depok Tahun 2014 sebesar 7,32 persen yang berdampak pada kurangnya daya beli masyarakat pada sektor industri olahan, perdagangan, hotel, restoran serta angkutan dan komunikasi. Kebijakan nasional tentang kenaikan harga BBM mendorong kenaikan harga-harga bahan pokok yang ikut melambung sehingga mengganggu pertumbuhan industri olahan dan kenaikan tarif angkutan kota serta sektor distribusi dan logistik.

Struktur perekonomian

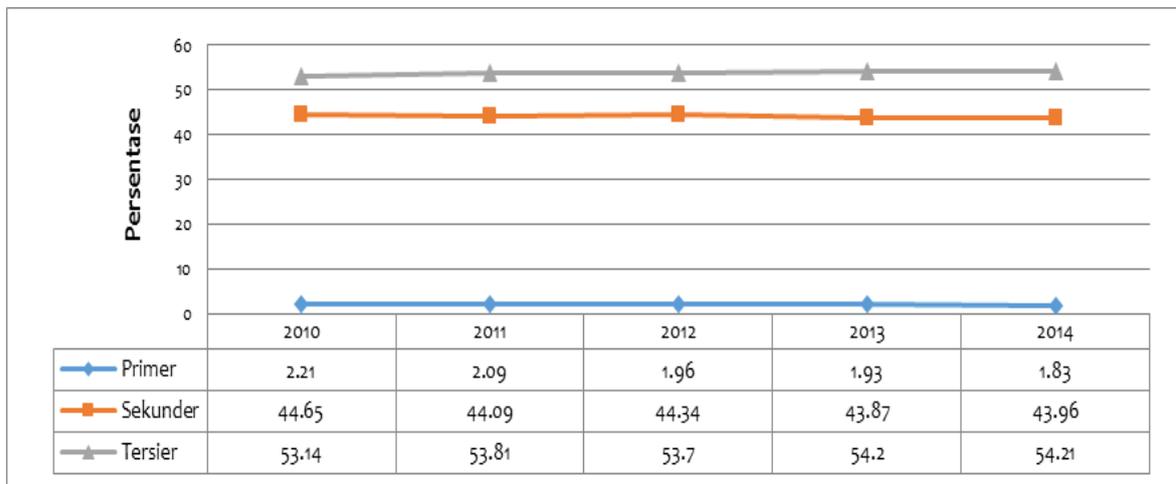
Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB menurut sektor-sektor yang menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pengelompokan PDRB berdasarkan sektor, terdiri atas :

1. **Sektor Primer**, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit di dalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian serta sektor Pertambangan dan Penggalian.
2. **Sektor Sekunder**, yaitu sektor yang mengolah bahan mentah atau bahan baku baik berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, dan sektor Bangunan.
3. **Sektor Tersier**, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, dan Jasa-jasa.

Pada grafik 2.8 dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kota Depok pada Tahun 2014 didominasi oleh sektor tersier (54,21%) dan sektor sekunder (43,96%).



Grafik 2.8. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2010 – 2014 (ADHB) (dalam %)



Sumber: BPS Kota Depok 2014

Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 menurun dari 2,21 % (2010) menjadi 1,83 % (2014). Sedangkan peranan kelompok sektor sekunder dalam kurun waktu yang sama menurun dari 44,65 % (2010) menjadi 43,96 % (2014). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kota Depok. Sementara itu peranan kelompok sektor tersier selama kurun waktu 2010-2014 meningkat dari 53,14 % (2010) menjadi 54,21 % (2014). Sektor yang peningkatan peran dalam perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana peranannya naik dari 36,29 % (2009) menjadi 37,98 % (2014).



Tabel 2.8. Distribusi Presentase PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2014 (ADHB) (dalam %)

LAPANGAN USAHA	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. PERTANIAN	2,21	2,09	1,96	1,93	1,83
a. Tanaman Bahan Makanan	0,42	0,40	0,37	0,28	0,25
b. Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Peternakan	1,47	1,38	1,29	1,32	1,25
d. Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Perikanan	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pertambangan Tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	35,95	35,36	35,30	34,16	33,92
a. INDUSTRI MIGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pengilangan Minyak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. INDUSTRI TANPA MIGAS	35,95	35,36	35,30	34,16	33,92
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	3,98	3,76	3,96	4,52	4,76
- Listrik	3,82	3,61	3,81	4,37	4,61
- Gas Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Air Bersih	0,16	0,16	0,14	0,14	0,15
5. BANGUNAN	4,73	4,97	5,09	5,20	5,28
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	36,29	36,75	37,38	38,01	37,98
- Perdagangan Besar & Eceran	30,91	31,21	31,58	32,27	32,58
- Hotel	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07
- Restoran	5,29	5,45	5,72	5,67	5,33
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	6,28	6,37	5,96	6,27	6,45
a. Pengangkutan	5,78	5,87	5,48	5,83	6,03
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PE	3,26	3,37	3,29	3,19	3,08
a. Bank	0,25	0,26	0,27	0,26	0,28
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
c. Sewa Bangunan	2,65	2,73	2,67	2,60	2,50
d. Jasa Perusahaan	0,35	0,37	0,35	0,31	0,30
9. JASA - JASA	7,31	7,32	7,07	6,74	6,70
a. Pemerintahan Umum	3,86	3,83	3,81	3,73	3,77
b. Swasta	3,45	3,49	3,26	3,00	2,93
1). Sosial Masyarakat	1,17	1,18	1,10	0,98	0,97
2). Hiburan dan Rekreasi	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04
3). Perorangan dan Rumah tangga	2,23	2,25	2,11	1,97	1,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan jenis lapangan usaha, sektor yang memberi kontribusi persentase PDRB tertinggi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai sebesar 36,29 persen (2010) menjadi 37,98 persen (2014). Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran ini secara dominan disumbang oleh sub lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 30,91 persen (2010) menjadi 32,58 persen (2014).



2.2.1.3. PDRB perkapita daerah dan Gini Rasio

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

PDRB perkapita Kota Depok atas dasar harga berlaku menunjukkan kenaikan dari Rp 11.854.685,- pada Tahun 2013 menjadi Rp 13.147.009 pada Tahun 2014 atau meningkat 10,90 persen.

Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita di atas masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Depok secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil bisa digunakan PDRB perkapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan. PDRB perkapita Kota Depok yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dari Rp 4.056.982,- pada Tahun 2013 menjadi Rp 4.192.326,- pada Tahun 2014 atau naik 3,34 persen.

Tabel 2.9. PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi

**PDRB Dan Gini Rasio Kota Depok Tahun 2010-2014**

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Rp)	9.228.226	9.825.302	10.571.847	11.854.685	13.147.009
PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (Rp)	3.726.407	3.811.195	3.935.379	4.056.982	4.192.326
Pertumbuhan Ekonomi	6,42	6,22	6,36	6,58	7,15
Inflasi PDRB	7.93	4.10	4.20	8.77	7.32
Gini Rasio	0,318480	0,355369	0,398417	0,398100	0,365153

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2015

A. Gini rasio.

Kondisi ekonomi Wilayah bisa juga dilihat dari gini ratio, yaitu suatu koefisien yang menggambarkan seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada suatu waktu. Koefisien Gini (Gini ratio) berkisar antara 0 hingga 1. Makin besar koefisien makin timpang. Gini ratio Kota Depok pada 2009-2014 berturut-turut: 0,296; 0,318; 0,355; 0,398; 0,398 dan 0,365 (Sumber: PDRB Lapangan Usaha Kota Depok 2014). Meskipun dapat dikategorikan sedang, koefisien Gini untuk Kota Depok memperlihatkan kecenderungan naik, mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan.

B. Inflasi.

Indikator berikutnya untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah adalah tingkat inflasi (berdasarkan data Indeks Harga Konsumen). Grafik 2.9. menunjukkan dinamika inflasi tahunan di Kota Depok, DKI Jakarta, dan Nasional pada rentang waktu 2009-2015.

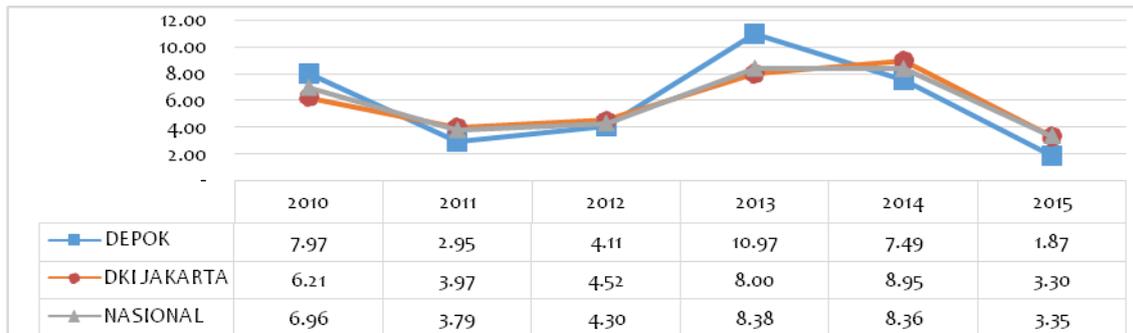
Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua



Wilayah ini saling mempengaruhi secara timbal balik yang kemungkinan besar disebabkan oleh mudahnya akses/aliran informasi terkait perubahan harga. Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya. Pada Grafik 2.9. ditunjukkan bahwa pada 2015 inflasi di Kota Depok (1,87) lebih rendah jika dibandingkan dengan DKI Jakarta (3,30) dan Nasional (3,35). Naik-turunnya inflasi di tiga wilayah ini memiliki pola yang sama pada 2009-2015. Jika dikaitkan dengan pola pertumbuhan ekonomi pada rentang waktu 2008-2012, kesimpulan sementara yang dapat diperoleh untuk kasus Kota Depok adalah tidak ada kaitan yang jelas antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menyebabkan inflasi, atau sebaliknya inflasi tidak selalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Dinamika diantara keduanya kemungkinan ditentukan oleh faktor lain.

Dinamika inflasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar serta kebijakan-kebijakan lain disektor perbankan maupun perilaku transaksi spekulatif para pelaku ekonomi.

Grafik 2.9. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2008-2015(dalam %)



Sumber : BPS Kota Depok

Hasil analisis dari struktur Perekonomian dan Pertumbuhannya di Kota Depok, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2014 nilai PDRB Kota Depok sebesar Rp 26.734.548,37 juta, mengalami peningkatan sebesar 14,93 % bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.
- Berdasarkan harga konstan tahun 2000, pada tahun 2014 nilai PDRB Kota Depok sebesar Rp 8.525.129,16 juta, mengalami peningkatan sebesar 7,09 % bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.
- Pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2014 sebesar 7,09 %, lebih tinggi 2,02 point bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang besarnya 5,07 %.
- Selama kurun waktu 2010 s.d 2014, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Depok adalah sebesar 6,79 % per tahun. Dan selama lima tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Kota Depok selalu berada di atas Jawa Barat.
- Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 menurun dari 2,21 % (2010) menjadi 1,83 % (2014).
- Peranan kelompok sektor sekunder dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 menurun dari 44,65 % (2010) menjadi 43,96 % (2014). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kota Depok.



- g. Peranan kelompok sektor tersier dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 meningkat dari 53,14 % (2010) menjadi 54,21 % (2014).
- h. Sektor yang peningkatan peran dalam perekonomiannya tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana peranannya naik dari 36,29 % (2009) menjadi 37,98 % (2014).
- i. Inflasi Kota Depok pada Tahun 2014 yang dihitung dengan pendekatan PDRB adalah sebesar 7,32 %. Inflasi pada sektor primer sebesar 7,83 %, sektor tersier 6,72% dan sektor sekunder 7,90 %. Sementara inflasi Kota Depok berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Tahun 2015 sebesar 1,87% lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 7,49%.
- j. PDRB per Kapita Kota Depok pada Tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 13.147.009,-, mengalami peningkatan sebesar 10,90 % jika dibandingkan tahun 2013. PDRB per kapita ini tidak menggambarkan secara utuh pendapatan per kapita Kota Depok, karena besarnya pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar serta besarnya pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir masuk belum dapat dihitung, sedangkan penduduk Kota Depok yang melakukan aktivitas ekonomi di luar Kota Depok sangat banyak.
- k. Daya beli masyarakat secara riil meningkat sebesar 3,34 %.

C. Ekonomi Kreatif.

Di luar sektor makro di atas, Kota Depok juga memiliki berbagai produk potensial yang memiliki keunggulan komparatif, antara lain komoditas belimbing, ikan hias, tanaman hias, serta beberapa produk ekonomi kreatif. Sumbangan kegiatan ekonomi kreatif di Kota Depok terhadap PDRB (ADHB) pada Tahun 2014 yang dipublikasikan pada Tahun 2014 mencapai Rp. 3,17 triliun atau 11,86% dari total PDRB Kota Depok. Dibandingkan pada tahun sebelumnya (2013), sumbangan PDRB Industri Kreatif mencapai Rp. 2,73 triliun atau 11,73% dari total PDRB.



Ekonomi kreatif di Kota Depok pada Tahun 2014 secara riil melaju dengan baik dibandingkan Tahun 2013, dimana pada Tahun 2013 tumbuh sebesar 7,04 persen, dan pada Tahun 2014 tumbuh sebesar 10,05 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kreatif ini lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi secara umum yaitu sebesar 7,09 persen pada tahun 2014. Terdapat 15 kelompok kegiatan dikategorikan sebagai ekonomi kreatif: periklanan, arsitektur, barang seni, kerajinan, disain, fashion, film-video-fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan-percetakan, layanan komputer-piranti lunak, tv-radio, riset, dan kuliner. Pada Tahun 2014, kontribusi terbesar sektor ekonomi kreatif disumbang dari fashion sebesar 30,63% dengan pertumbuhan 12,68% dan sumbangan kedua terbesar adalah dari kerajinan sebesar 30,06% dengan pertumbuhan 10,10% serta kuliner dengan kontribusi sebesar 10,25% dengan laju pertumbuhan sebesar 10,25%. Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2014, perkembangan sektor musik mengalami pertumbuhan paling besar yaitu 16,03% diikuti oleh sektor fesyen sebesar 12,68% dan kuliner sebesar 10,25%.

Peranan Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian Kota Depok secara umum selalu di atas 12 persen setiap tahunnya. Sektor Fesyen dan sektor kerajinan sangat mendominasi Ekonomi Kreatif di Kota Depok. Bahkan kontribusi kedua sektor tersebut dalam Ekonomi kreatif Kota Depok mencapai lebih dari 60 %. Sehingga sektor fesyen dan sektor kerajinan perlu mendapatkan perhatian yang khusus, karena fluktuasi kedua sektor ini akan berdampak sangat besar terhadap ekonomi kreatif bahkan perekonomian Kota Depok secara umum. Sektor Kuliner yang secara khusus dimasukkan ternyata juga mempunyai andil yang cukup besar. Sektor ini menempati peringkat ketiga atas kontribusinya terhadap ekonomi kreatif di kota Depok. Sektor Kuliner sebaiknya semakin dikembangkan, mengingat potensi sektor ini masih sangat terbuka lebar.



Pemerintah bisa menyediakan tempat-tempat khusus sebagai pusat wisata kuliner supaya kuliner di Kota Depok dapat semakin berkembang.

Ada fenomena baru dalam industri kreatif di Kota Depok yaitu sektor jasa seni yang mendukung industri kreatif sehingga meningkatkan nilai tambah industri kreatif Kota Depok. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya arus informasi sehingga segala informasi mudah diakses dan jasa seni semakin kompetitif dalam mendukung nilai tambah industri kreatif. Usaha di sektor ini semakin berkembang dan basis potensinya adalah kekuatan intelektual individu yang berkembang di masyarakat kaum muda Kota Depok. (Sumber : BPS dan Bappeda Kota Depok "PDRB Industri Kreatif Kota Depok 2013 dan 2014").

Grafik 2.10. Kontribusi Industri Kreatif Terhadap PDRB Kota Depok Tahun 2014



Sumber : PDRB Ekonomi Kreatif Kota Depok 2014 - BPS

Pada Tahun 2013 telah dilakukan perhitungan PDRB Kecamatan. Data PDRB Kecamatan akan memperlihatkan evaluasi hasil pembangunan di daerah dalam bentuk gambaran keadaan ekonomi sehingga diharapkan data ini dapat dijadikan penentuan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang sampai level kecamatan.

Dengan tersedianya data statistik PDRB Kecamatan secara berkala dapat diketahui antara lain :

- a. Kemampuan sumber daya ekonomi masing-masing kecamatan yang diperlihatkan oleh nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku.



- b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi masing-masing kecamatan yang diperoleh dari Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
- c. Tingkat kemakmuran penduduk di suatu kecamatan dengan membandingkan PDRB perkapita dengan kecamatan lain.
- d. Tingkat inflasi masing-masing kecamatan yang merupakan persentase perubahan Indeks Harga Implisit dua tahun yang berurutan. Peningkatan pendapatan akan tidak berarti jika tingkat inflasi tinggi. Dengan kata lain peningkatan pendapatan tidak berarti bila diiringi dengan penurunan daya beli uang (Rupiah) terhadap barang dan jasa (terbatasnya persediaan barang dan jasa).
- e. Gambaran struktur perekonomian masing-masing kecamatan yang merupakan kontribusi masing-masing sektor kegiatan ekonomi terhadap pembentukan PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Empat kecamatan di Kota Depok yang mempunyai *sharing* terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Depok Tahun 2014 atas dasar harga berlaku adalah Kecamatan Cimanggis (24,13 persen), Kecamatan Beji (16,74 persen), Kecamatan Tapos (11,83 Persen), serta Kecamatan Cilodong (11,60 persen). Tujuh kecamatan lainnya masing-masing mempunyai *sharing* di bawah 10 persen, yaitu Sukmajaya (9,63 persen), Pancoran Mas (9,33 persen), Sawangan (4,04 persen), Bojongsari (3,97 persen), Cipayung (3,58 persen), Cinere (3,53 persen), dan Limo (1,61 persen).

Sharing masing-masing kecamatan pada pembentukan PDRB Kota Depok Tahun 2014 atas dasar harga konstan tahun 2000 juga memperlihatkan pola yang hampir sama. Hal ini memperlihatkan bahwa semua kecamatan di Kota Depok tidak mengalami perbedaan harga berlaku yang mencolok. Karena PDRB atas dasar harga konstan secara riil menggambarkan produksi dari setiap sektor ekonomi tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

**Tabel 2.10. Kondisi Perekonomian Kecamatan di Kota Depok Tahun 2014**

No	Kecamatan	PDRB (juta Rp)	PDRB per Kapita (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Sawangan	1.080.477,28	7.475.902,80	7,16
2	Bojongsari	1.061.778,65	9.102.260,18	6,32
3	Pancoranmas	2.494.683,04	10.131.597,71	6,45
4	Cipayung	957.964,30	6.402.991,07	6,63
5	Sukmajaya	2.575.113,77	9.476.562,72	6,62
6	Cilodong	3.100.662,07	21.205.458,01	7,76
7	Cimanggis	6.449.824,61	22.788.886,53	7,31
8	Tapos	3.163.999,81	12.511.021,52	7,31
9	Beji	4.475.235,53	23.062.993,60	7,08
10	Limo	431.036,32	4.190.025,66	6,40
11	Cinere	943.772,97	7.508.317,38	6,57
	Kota Depok	26.734.548,37	13.147.009,19	7,09

Sumber : PDRB Kecamatan 2015

1. Kecamatan Sawangan

Kecamatan Sawangan merupakan kecamatan di Kota Depok yang produksi pertaniannya paling tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Depok. *Sharing* sektor pertanian yang dibangkitkan oleh Kecamatan Sawangan terhadap PDRB Kota Depok adalah sebesar 16,93 persen. Ini merupakan *sharing* tertinggi sektor pertanian. Pertanian yang diusahakan di Sawangan masih cukup berimbang antara tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan.

Dua sektor yang paling dominan di Kecamatan Sawangan adalah perdagangan besar dan eceran (22,89 persen) dan industri tanpa migas (20,47 persen). Industri pengolahan yang paling dominan adalah industri pengolahan lainnya.

2. Kecamatan Bojongsari

Sektor ekonomi di Kecamatan Bojongsari yang mempunyai peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Depok adalah sektor pertanian (13,75 persen) dan sektor angkutan dan komunikasi (9,88 persen).



Tanaman perkebunan dan perikanan merupakan kegiatan pertanian yang banyak diusahakan di Kecamatan Bojongsari. Bahkan 31,35persen kegiatan perikanan yang ada di Kota Depok di usahakan di Kecamatan Bojongsari.

Industri makanan, minuman, dan tembakau menjadi sub sektor industri pengolahan yang mendominasi kegiatan industri di Kecamatan Bojongsari.

3. Kecamatan Pancoran Mas

Perdagangan besar dan eceran menjadi sektor yang sangat dominan di Kecamatan Pancoran Mas. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap pembentukan PDRB Kecamatan Pancoran Mas sebesar 61,05 persen, sedangkan secara sektoral kontribusi sektor ini terhadap Kota Depok adalah sebesar 16,28 persen. Bisa dikatatakan bahwa Kecamatan Pancoran Mas merupakan salah satu sentra perdagangan di Kota Depok bersama dengan Kecamatan Beji dan Cimanggis.

Industri pengolahan tidak menjadi sektor basis ekonomi di Kecamatan Pancoran Mas. Namun industri yang sangat menonjol di Kecamatan Pancoran Mas adalah industri kertas dan barang cetakan.

4. Kecamatan Cipayung

Kecamatan Cipayung secara ekonomi didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran (44,58 persen) dan sektor industri pengolahan (27,12 persen). Industri pengolahan yang sangat mendominasi adalah industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Nilai tambah yang dihasilkan dari industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki menyumbang 76,82 persen dari total nilai tambah sektor industri pengolahan di Kecamatan Cipayung.



5. Kecamatan Sukmajaya

Basis ekonomi di Kecamatan Sukmajaya terletak pada sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor industri pengolahan. Andil sektor industri pengolahan sebesar 22,59 persen, sedangkan andil sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 38,44 persen.

Dua sub sektor industri yang banyak dibangkitkan di Kecamatan Sukmajaya adalah industri barang kayu dan hasil hutan lainnya serta industri pupuk, kimia, dan barang dari karet.

Jika dilihat peranan secara sektoral terhadap pembentukan PDRB Kota Depok, maka sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mempunyai andil sektoral terbesar, yaitu sebesar 35,66 persen.

6. Kecamatan Cilodong

Peranan sektor industri pengolahan di Kecamatan Cilodong sangat besar, karena mempunyai andil sebesar 67,26 persen. Dimana 75,39 persen industrinya adalah industri makanan, minuman, dan tembakau. Sektor kedua yang mempunyai andil besar terhadap perekonomian Kecamatan Cilodong adalah sektor perdagangan besar dan eceran (17,66 persen). Kedua sektor ini jika digabungkan maka akan mempunyai andil sebesar 84,57 persen di Kecamatan Cilodong.

Jika dilihat *sharing* per sub sektor ekonomi, maka industri pengolahan di Kecamatan Cilodong mempunyai *sharing* sektoral terhadap PDRB Kota Depok sebesar 23,00 persen.

7. Kecamatan Cimanggis

Secara makro, Kecamatan Cimanggis mempunyai *sharing* terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. PDRB Kota Depok pada Tahun 2014 sebesar 24,13 persennya dibentuk oleh unit-unit produksi yang ada di Kecamatan Cimanggis. Secara sektoral sektor industri pengolahan dan sektor bangunan mempunyai andil yang besar terhadap PDRB Kota Depok.



Sharing industri pengolahan di Kecamatan Cimanggis terhadap industri pengolahan di Kota Depok sebesar 39,20 persen, sedangkan *sharing* sektor bangunannya sebesar 54,97 persen.

Industri pengolahan yang paling mendominasi adalah industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki, disusul industri pupuk, kimia, dan barang dari karet, serta industri alat angkut, mesin dan peralatannya.

8. Kecamatan Tapos

Besaran PDRB Kecamatan Tapos Tahun 2014 yang mencapai Rp 3,16 T atau menempati rangking 3 di Kota Depok. Besarnya PDRB Kecamatan Tapos Tahun 2014 karena banyaknya industri besar yang beroperasi di Kecamatan Tapos. Industri pengolahan berperan sebesar 55,90 persen terhadap ekonomi Kecamatan Tapos. Sub sektor industri pengolahan yang dominan di Kecamatan Tapos, yaitu industri alat angkutan, mesin dan peralatannya, industri makanan, minuman dan tembakau, serta industri pupuk, kimia dan barang dari karet.

Selain sektor industri pengolahan, sektor lainnya yang dominan dalam perekonomian Kecamatan Tapos adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan andil sebesar 25,06 persen.

9. Kecamatan Beji

PDRB Kota Depok Tahun 2014 di Sektor Perdagangan besar dan eceran 30,02 persennya dibangkitkan oleh unit-unit usaha perdagangan besar dan eceran yang berada di Kecamatan Beji.

Selain sektor perdagangan besar dan eceran yang mempunyai *sharing* sektoral tinggi terhadap PDRB Kota Depok, sektor Jasa-jasa mempunyai share sebesar 44,67 persen, sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 20,35 persen.



Ekonomi di Kecamatan Beji sendiri didominasi oleh Sektor Perdagangan, hotel dan restoran (64,25 persen), sektor jasa-jasa (17,88 persen), dan sektor industri pengolahan (4,80 persen). Industri barang kayu dan hasil hutan lainnya merupakan industri yang lebih dominan dibandingkan industri lainnya yang ada di Kecamatan Beji.

10. Kecamatan Limo

Kecamatan Limo merupakan kecamatan di Kota Depok yang pada Tahun 2014 mempunyai nilai PDRB Kecamatan terkecil. Peranan PDRB Kecamatan Limo terhadap PDRB Kota Depok hanya sekitar 1,61 persen. *Sharing* sektoral tertinggi ada di sektor pertanian, dan itu pun hanya sebesar 7,11 persen.

Secara struktur, ekonomi di Kecamatan Limo di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (52,17 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (14,93 persen), dan sektor pertanian (8,09 persen). Untuk industri pengolahan memberikan andil sebesar 6,53 persen. Industri yang paling dominan di Kecamatan Limo adalah industri barang kayu.

11. Kecamatan Cinere

Kecamatan Cinere merupakan Wilayah dengan lebih besar proporsi perumahan untuk penduduk kelas menengah ke atas dan tidak banyak terdapat unit-unit usaha yang melakukan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akhir

Ekonomi di Kecamatan Cinere didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (49,69 persen), serta sektor jasa-jasa (18,50 persen). Untuk sektor industri pengolahan yang dominan adalah industri pupuk, bahan kimia dan barang dari karet.

2.2.1.4 Tingkat Kemiskinan.

Tingkat Kemiskinan di Kota Depok dilihat dari Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})\%$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk.



Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

- Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
- Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar Daerah;
- Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Berdasarkan Data Kondisi Perekonomian Kota Depok Tahun 2011-2014, Tingkat kemiskinan Kota Depok di Tahun 2010 sebesar 2,75 %, Tahun 2012 sebesar 2,46%, pada Tahun 2013 sebesar 2,32% dan pada tahun 2014 sebesar 2,18% berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (10,96 %) maupun Provinsi Jawa Barat (9,18 %). Artinya penduduk diatas garis kemiskinan pada Tahun 2014 sebesar 97,82%.

Grafik 2.11. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Depok Tahun 2008 – 2014



Sumber Data : BPS Kota Depok Tahun 2015

**Tabel 2.11. Kemiskinan Kota Depok Tahun 2011-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Head Count Index P0	Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	Indeks Keparahan Kemiskinan P2	Garis Kemiskinan (Rp)
2010 (dipublikasikan tahun 2011)	49.253	2,84	0,51	0,14	310.279
2011 (dipublikasikan tahun 2012)	48.906	2,75	0,50	0,14	358.259
2012 (dipublikasikan tahun 2013)	48.269	2,46	0,24	0,04	413.638
2013 (dipublikasikan tahun 2014)	45.912	2,32	0,26	0,06	443.302
2014 (dipublikasikan tahun 2015)	44.483	2,18	0,4	0,09	462.069

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2015

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

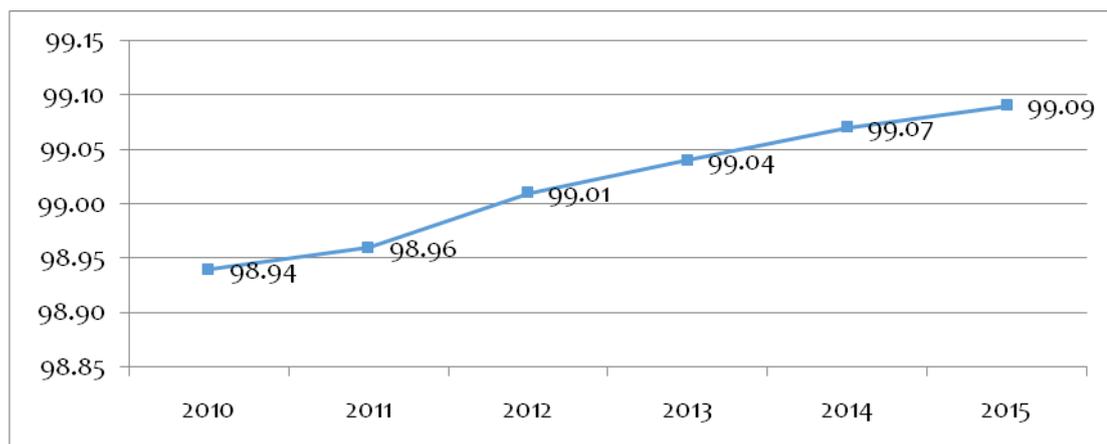
Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

A. Aspek Pendidikan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama lima tahun terakhir dari 2010 sampai dengan 2015.

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2010-2015, capaian angka melek huruf cukup mengalami peningkatan. AMH pada tahun 2015 sebesar 99,09%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang berada di tingkat 98,94%.

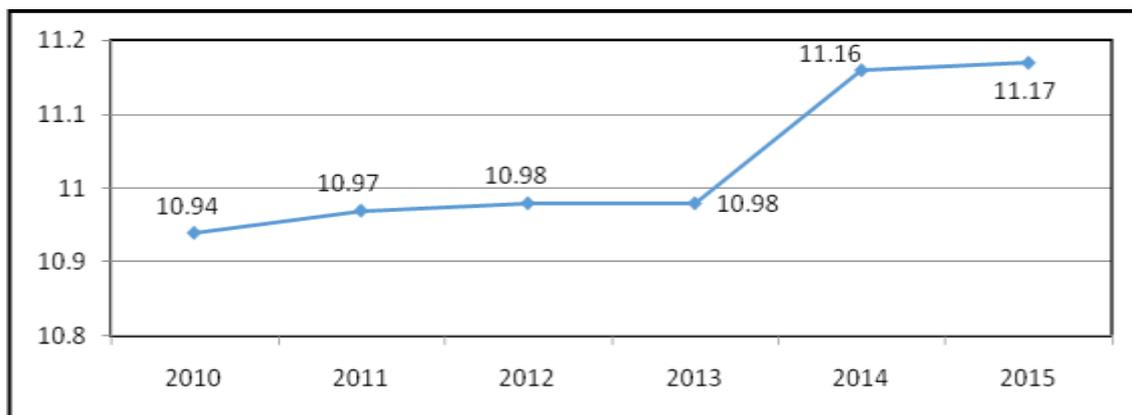
**Grafik 2.12 Angka Melek Huruf Kota Depok Tahun 2010 – 2015**

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2015

Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Walaupun demikian, di tahun 2015 masih ada masyarakat Kota Depok yang buta huruf (0,91%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk yang putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar atau belum pernah sekolah serta anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa membaca dan menulis serta lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun hal ini menjadi tantangan pemerintah Kota Depok dalam menuntaskan buta huruf sehingga AMH mendekati 100%.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Selain angka melek huruf, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) juga mempengaruhi nilai IPM. Angka rata-rata lama sekolah (ARLS) pada Tahun 2015 mencapai 11,17 tahun, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2014 yaitu 11,16 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Depok mengenyam pendidikan setara dengan kelas 3 SMA. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Upaya untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Depok terus dilakukan setiap tahunnya seperti pembangunan gedung sekolah dasar dan menengah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas Sumber Daya Manusia.

Grafik 2.13 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Depok Tahun 2010 – 2015 (tahun)

Sumber : BPS Kota Depok 2015

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan SD/MI/Paket A pada Tahun 2015 mencapai angka 87,92. Nilai APM SMP/MTs/Paket Tahun 2015 sebesar 62,41. Sedangkan Nilai APM SMA/MAN/Paket C Tahun 2014 sebesar 32,90. Rata-rata APM Kota Depok masih dibawah 100 %, persentase ini menunjukkan masih banyak anak usia sekolah di Kota Depok yang bersekolah di luar Kota Depok sedangkan penurunan APM diperkirakan akibat kurangnya jumlah sekolah dibanding dengan jumlah anak usia sekolah. Hal ini juga menunjukkan perlunya dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan disemua tingkat pendidikan

**Tabel 2.12 Perkembangan APM Kota Depok Tahun 2011-2015(dalam %)**

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI/Paket A	98,05	94.38	92.87	89.76	87,92
2	SMP/MTs/Paket B	96,00	71.56	72.43	68.58	62,41
3	SMA/SMK/MA/Paket C	62,94	56.65	49.81	36.57	32,90

Sumber :LKPJ AMJ

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Penyebab utama belum tercapaiannya capaian APK SMP dan SMA di Kota Depok selain ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang jumlahnya belum memadai dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah, tetapi juga disebabkan banyaknya penduduk usia sekolah tidak bersekolah di Kota Depok tetapi di luar kota Depok (pesantren dan sekolah di luar Kota Depok). Sementara, upaya menekan angka putus sekolah yaitu dengan memperbanyak Sekolah Terbuka dan kelompok belajar paket A, B dan C, membangun sekolah baru serta melakukan pembinaan kepada sekolah swasta untuk meningkatkan kualitasnya sehingga animo masyarakat tidak hanya bertumpu kepada sekolah negeri.

Tabel 2.13 Perkembangan APK Kota Depok Tahun 2011-2015(dalam %)

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI/Paket A	99,54	98.89	97.07	100.3	100,25
2	SMP/MTs/Paket B	98,20	76.24	76.1	85.54	83,82
3	SMA/SMK/MA/Paket C	79,21	62.15	53.76	55.17	53,46

Sumber :LKPJ AMJ



B. Aspek Kesehatan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Indeks Kesehatan ditentukan oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Definisi Angka Harapan Hidup adalah Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup Saat Lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. **Kegunaan** Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan **derajat kesehatan** pada khususnya. Sedangkan Indikator utama *derajat kesehatan* masyarakat adalah angka kematian bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR).

Dari hasil penelitian yang ada, angka kematian bayi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan faktor-faktor lain, terutama gizi. Status gizi ibu pada waktu melahirkan, dan gizi bayi itu sendiri sebagai faktor tidak langsung sebagai penyebab kematian bayi. Oleh sebab itu, perbaikan gizi masyarakat yang difokuskan pada perbaikan gizi bayi dan anak balita merupakan awal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya kekurangan gizi pada bayi akan berakibat terhadap munculnya masalah kesehatan yang lain, dan akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2000).



Apabila terdapat Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah, maka yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan keluarga khususnya ibu hamil dan balita, program peningkatan kecukupan gizi dan kalori dan program penanggulangan kemiskinan. Pada Tahun 2015 Angka Harapan Hidup Kota Depok terakhir mencapai 74,10 tahun, meningkat dibanding tahun 2014 (73,75 tahun).

Grafik 2.14. Nilai AHH Kota Depok Tahun 2009 – 2014



Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2015 dan LKPJ Depok 2015, LKPJ Prov Jawa Barat 2015

B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neonatal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapatselama kehamilan.



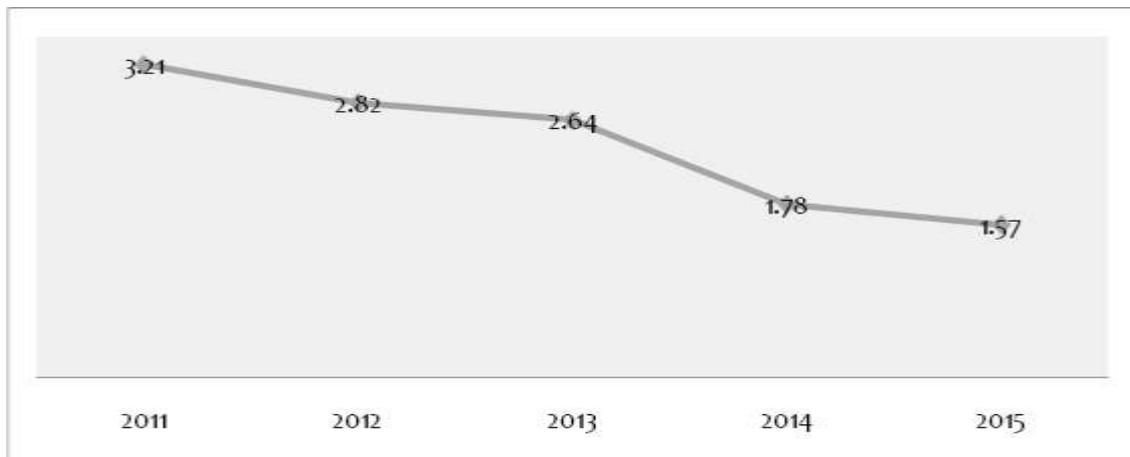
Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

C. Angka kematian bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2015 tercatat 1,57 perseribu kelahiran hidup atau 63 bayi dari 40.182 kelahiran hidup lebih rendah jika dibandingkan Tahun 2011 di Kota Depok sebesar 3,21 perseribu kelahiran hidup atau 119 bayi dari 38.421 dari kelahiran hidup.

Grafik 2.15. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Tahun 2011 – 2015



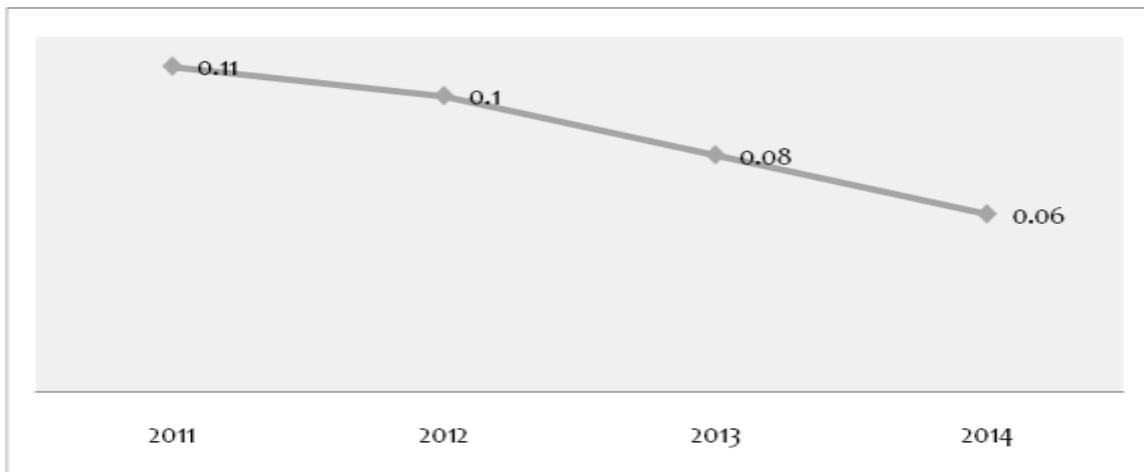
Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2015 dan LKPJ Depok 2015

D. Balita Gizi Buruk

Angka prevalensi gizi buruk di Kota Depok pada Tahun 2014 sebesar 0,06persen (75 kasus anak gizi buruk lebih kecil dibandingkan Tahun 2011 sebesar 0,11persen (129 anak kasus gizi buruk). Penurunan angka balita gizi buruk ini terjadi karena adanya gebrakan dalam penanganan kasus balita gizi buruk di Kota Depok. Diantaranya dengan dibukanya Panti Pemulihan Gizi (PPG) di tiga Puskesmas yaitu Sukmajaya, Cimanggis dan Pancoran Mas.



Grafik 2.16. Prevalensi gizi buruk/persentase balita gizi buruk (%) Tahun 2011 – 2014

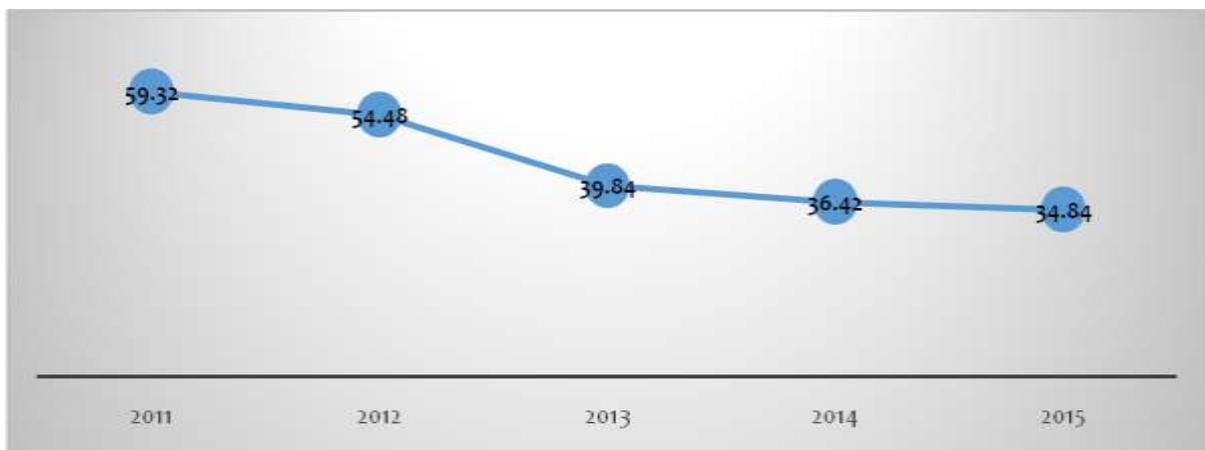


Sumber: Diolah dari Profil Kesehatan Kota Depok 2014 dan LKPJ Depok 2015

E. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu di Kota Depok pada Tahun 2015 sebesar 34,84 per 100.000 kelahiran hidup (14 kasus dari 40.182 kelahiran hidup lebih kecil dibandingkan Tahun 2011 sebesar 59,32 per 100.000 kelahiran hidup (22 kasus dari 38.421 kelahiran hidup).

Grafik 2.17. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup Tahun 2011 – 2015



Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2015 dan LKPJ Depok 2015,

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Depok selama ini telah merintis berbagai event atau kegiatan festival kesenian, perwatan dan pelestarian terhadap benda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan setiap tahunnya dirangkai dalam kegiatan Hut Kota Depok.

2. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Perkembangan jumlah gedung olahraga dan gelanggang/ balai remaja (milik pemerintah) selama periode 2011-2015 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Grafik 2.18.
Perkembangan Prasarana Olahraga Kota Depok



Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok



Dari data terakhir di tahun 2011, terdapat lapangan olahraga yaitu Jumlah Lapangan Olahraga yang dimiliki Pemda ada 9 buah yaitu Stadion Merpati, Lapangan Sepak Bola Mahakam, Lapangan Sepak Bola Sukatani, Lapangan Sepak Bola Cipayung, Lapangan Badminton GOR Koni, Lapangan Badminton Balai Rakyat Depok 2, Lapangan Badminton Balai Rakyat Cimanggis, Lapangan Badminton Balai Rakyat Cimanggis, Lapangan Badminton Balai Rakyat jalan Jawa. Sebagai upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat juga telah berdiri Stadion Merpati. Stadion ini dilengkapi dengan tribun dan terintegrasi dengan kantor KONI.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Depok dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan urusan wajib dan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Dari sisi pelayanan pemerintah langsung kepada masyarakat, hasil kajian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 dengan didapatkannya nilai agregat IKM sebesar 80,66 yang termasuk pada kategori BAIK. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014 yaitu 80,18. Pada Tahun 2015 jumlah unit pelayanan yang dinilai dalam IKM sebanyak 21 pelayanan, hasil capaian IKM tersebut selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.14. Capaian IKM Kota Depok (2011-2015)**

No.	Jenis Pelayanan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ijin Gangguan	87,46	86,80	85,41	83,25	81,35
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	84,73	83,51	82,41	85,00	83,47
3	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	83,90	83,88	83,37	85,75	82,13
4	Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA)	82,64	81,85	80,72	86,50	81,48
5	Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	79,31	81,57	81,70	89,50	83,46
6	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	77,70	79,80	79,74	79,75	80,74
7	Ijin Pemasangan Reklame	89,86	89,18	88,03	80,50	81,55
8	Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta	81,07	81,75	82,53	83,75	83,82
9	Kesehatan Dasar	81,04	81,30	81,87	85,25	84,12
10	Pasar	75,51	74,30	73,21	69,50	72,83
11	Kartu Kuning	82,94	83,11	80,86	84,00	85,15
12	Pembayaran Pajak	79,67	81,71	88,70	88,26	88,34
13	Akte Kelahiran Umum	81,83	82,12	84,73	91,00	89,16
14	KTP & Kartu Keluarga	77,84	80,03	75,55	86,25	81,84
15	Pemadam Kebakaran	80,63	80,81	79,22	74,50	75,18
16	Pelayanan Air Bersih	79,30	80,11	79,52	80,70	81,35
17	Rumah Potong Hewan (RPH)	84,73	85,85	83,97	76,75	81,74
18	Pendidikan Dasar & menengah	75,67	76,55	76,85	71,00	77,89
19	Jalan	74,11	73,02	72,91	67,75	69,76
20	Terminal	69,59	69,11	69,21	65,50	69,44
21	Persampahan	73,86	75,22	74,81	80,50	79,11
Rata-Rata IKM		80,16	80,55	80,25	80,18	80,66

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan asset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Berikut ini diuraikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja di urusan pendidikan.



**Tabel 2. 15 Hasil Kinerja Urusan Pendidikan
Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2011-2015**

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	99.16	99.93	99.93	99.99	99.96
	Fasilitas Pendidikan					
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	35.33	69.77	32.49	35.32	56.07
3	Angka Putus Sekolah (%):					
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.49	0.03	0.001	0.01	0.004
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.25	0.05	0.04	0.13	0.05
	c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.21	0.08	0.04	0.19	0.01
4	Angka Kelulusan (%):					
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	97.94
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	93.44	100	100	100	98.74
	c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	92.41	99.99	100	100	97.64
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	86.84	94.66	89.74	90.33	78.56
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	95.44	92.04	81.37	94.66	69.7
7	Guru Kualifikasi S1/D4	64.73	65.85	66.54	86.73	89.55

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

Penduduk Kota Depok yang berusia di atas 15 tahun dan tidak buta aksara di tahun 2015 mencapai 99,96% mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 99,16%. Pada level pendidikan pra sekolah, perkembangan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Depok selama periode 2011-2015 mengalami kenaikan, pada tahun 2011 angka partisipasi PAUD sebesar 35,33%, maka pada tahun 2015 telah menjadi 56,07%.

Grafik 2.19
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/SMK/MA
Kota Depok Tahun Periode 2011-2015



Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI dalam rentang waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2011 APS SD/MI berada di tingkat 0,49%, maka pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 0,004% atau dapat dikatakan hampir tidak ada APS di tingkat SD/MI.

Angka Putus Sekolah SMP/MTs juga mengalami penurunan yang berarti selama periode 2011-2015. Jika pada tahun 2011, tingkat APS SMP/MTs Kota Depok ada di tingkat 0,25 %, maka pada tahun 2015 mengalami penurunan hanya menjadi 0,05%. Selama periode 2011-2015, Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA di Kota Depok juga mengalami tren penurunan, pada tahun 2011, tingkat APS SMA/SMK/MA Kota Depok ada di tingkat 0,21%, maka pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 0,01%. Dari grafik 2.19 terlihat bahwa secara umum angka putus sekolah di Kota Depok di semua jenjang Pendidikan mendekati nol atau tidak ada siswa yang putus sekolah.



Terkait dengan angka kelulusan (AL), diketahui bahwa angka kelulusan SD/MI di Kota Depok dari mulai tahun 2011 hingga 2015 telah mencapai rata-rata 100%. Untuk angka kelulusan (AL) SMP/MTs diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 rata-rata kelulusan mencapai 98,36 %.

Di tingkat sekolah menengah, angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Kota Depok pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 rata-rata kelulusan telah mencapai 98,1 %.

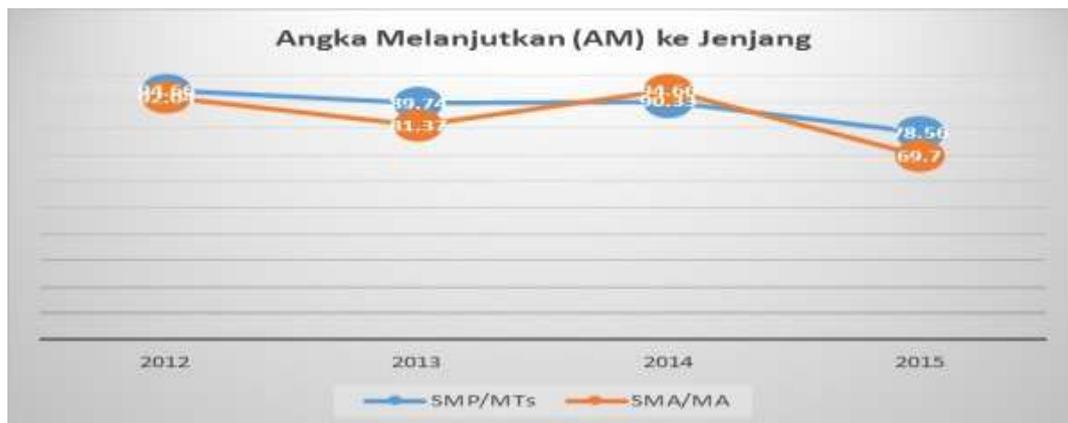
Grafik 2.20
Perkembangan Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/SMK/MA
Kota Depok Tahun Periode 2011-2015



umber : LKPJ AMJ Kota Depok

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kota Depok selama periode 2011-2015 rata-rata mencapai 88,03%. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Depok selama periode 2011-2015 rata-rata mencapai 86,64 %.

Grafik 2.21
Angka Melanjutkan SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA
Kota Depok Tahun Periode 2011-2015



Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

Dalam aspek kualitas pengajar, tingkat guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Depok selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2011 baru mencapai 64,73% guru yang memenuhi kualifikasi ini, maka pada tahun 2015 sudah mencapai 89,55%.

B. Kesehatan

Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

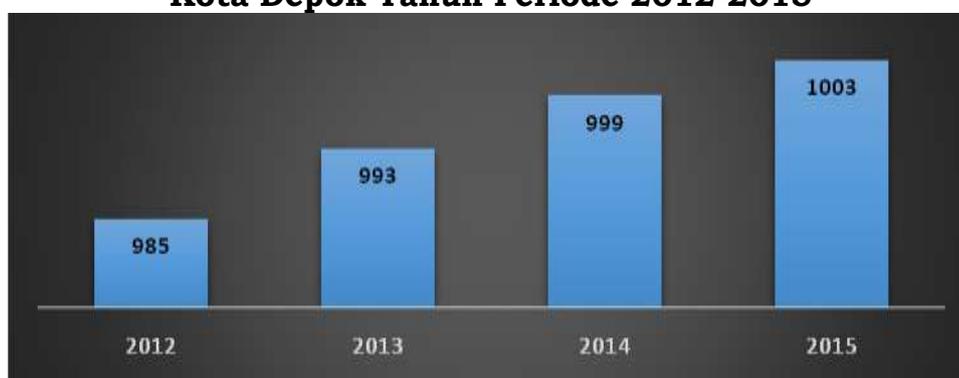


Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Jumlah balita (0-4 tahun) di Kota Depok berdasarkan Depok Dalam Angka Pada Tahun 2014 adalah sebesar 202.831 anak. Jumlah posyandu sampai dengan Tahun 2014 adalah sebesar 999 posyandu. Maka Rasio per satuan Balita di Kota Depok adalah lebih dari 200 balita per posyandu. Idealnya satu posyandu melayani 100 balita.

Grafik 2.22.
Jumlah Posyandu
Kota Depok Tahun Periode 2012-2015



Sumber : Profil Kesehatan Kota Depok Tahun 2015



Tabel 2.16.
Hasil Kinerja Urusan Kesehatan
Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Posyandu	985	993	999	1003
2	Rumah Sakit	16	17	20	20
3	Tenaga Medis:				
	Dokter Spesialis	270	324	635	521
	Dokter Umum	366	218	365	366
	Dokter Gigi	216	113	187	159
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2.82	2.64	1.78	1.57
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	76	100	79,79
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	99.52	99.65	55	92,88
7	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	93.7	100	100	100
8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	57.2	55.59	44,09	53,77
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100
12	Cakupan kunjungan bayi (%)	91.82	97.09	97.6	95,59
13	Cakupan puskesmas (%)	100	100	100	100
14	Cakupan puskesmas pembantu (%)	100	100	100	100

Sumber : LKPJ AMJ, DDA dan Profil Kesehatan Kota Depok

Terkait ketersediaan Puskesmas bagi masyarakat di Kota Depok pada tahun 2012 terdapat 32 unit Puskesmas dengan tiga puskesmas sebagai PONEB dan empat Puskesmas sebagai puskesmas 24 Jam dan pada tahun 2015 terdapat 9 Puskesmas sebagai Puskesmas 24 Jam.

Jumlah rumah sakit di Kota Depok selama periode 2012-2013 menurut data profil kesehatan Kota Depok mengalami kenaikan dari 16 Rumah sakit menjadi 20 Rumah sakit dengan proporsi terbesar rumah sakit swasta.



Dalam ketersediaan SDM kesehatan, idealnya rasio dokter umum sebesar 18 perseratus ribu penduduk. Pada tahun 2012, rasio dokter umum perseratus ribu penduduk kota Depok mencapai 19,28 dan tahun 2014 naik menjadi 46,32 perseratus ribu jumlah penduduk.

Untuk perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Depok selama periode 2012-2015 mengalami fluktuasi. Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Pada tahun 2011 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah mencapai 100%, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 79,79% di tahun 2015. Perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Depok mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012 cakupannya mencapai 99,52%, maka pada tahun 2015 sudah mencapai 92,88%.

Perkembangan cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Depok selama periode 2012-2015 telah mencapai 100%. Di tahun 2012 cakupan dkelurahan UCI telah mencapai 99,52% dan mencapai 100% pada tahun 2015. Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Untuk kinerja cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Depok sudah mencapai tingkat yang optimal, dimana dari periode 2012 hingga 2015 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Depok juga belum optimal dilakukan, rata-rata temuan baru mencapai 56,4 persen pertahunnya.



Dalam cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD selama ini di Kota Depok telah menunjukkan tingkat yang optimal. Selama periode 2012-2015 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sudah mencapai 100%.

Perkembangan cakupan kunjungan bayi selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rat-rata cakupan kunjungan bayi mencapai 95,5 % setiap tahunnya.

Untuk cakupan puskesmas di Kota Depok selama periode 2012-2015 sudah mencapai 100%, begitu pula dengan puskesmas pembantu dimana jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu disetiap kecamatan telah tersedia.

C. Pekerjaan umum

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Dari sisi prasarana dan sarana transportasi, lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat transportasi antar kota yang paling banyak diminati, terdapat 5 Stasiun Kereta Api yakni Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam sedangkan rute yang dilayani saat ini adalah Depok – Angke, Depok – Bekasi, Depok – Bojong Gede, Depok – Jakarta Kota, Depok – Manggarai dan Depok – Tanah Abang.



Tabel 2.17. Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status Jalan (Km) Di Kota Depok Sampai dengan Tahun 2015

KEADAAN JALAN	STATUS JALAN						
	JALAN NEGARA		JALAN PROPINSI		JALAN KAB/KOTA		
	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	%	(km)
1	2	3	4	5	6	7	8
JENIS PERMUKAAN							
a. diaspal	41,63		11,67		101,08		
b. kerikil							
c. tanah							
d. Lainnya (Rigid Pavement Perkerasan Kaku/Beton					375,07		
JUMLAH I		41,63		11,67			476,15
KONDISI JALAN							
a. Baik	41,63		9,09		467,69	98,22	
b. Sedang							
c. Rusak			2,58		8,47	1,78	
d. Rusak Berat							
JUMLAH II		41,63		11,67			476,15
KELAS JALAN							
a. Kelas I	41,63						
b. Kelas II			11,67				
c. Kelas IIIa					78,62		
d. Kelas IIIb					397,53		
e. Kelas IIIc					-		
g. Kelas tidak dirinci					-		
JUMLAH III		41,63		11,67			476,15

Sumber : Dinas BMSDA Kota Depok 2014

Jika dirinci menurut status pemerintah yang berwenang maka panjang jalan negara 41,63 km, jalan provinsi 11,67 km dan jalan kota sepanjang 476,15 km. Secara umum, kondisi jalan kota yang dalam kondisi baik adalah sepanjang 454,84km(95,52%) dan meningkat menjadi 98,22% pada tahun 2015. Jalan lingkungan dalam kondisi baik (dibeton) pada Tahun 2014 sebesar 77,38 % naik menjadi 85,87 % pada tahun 2015.



Tabel 2.18
Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Umum				
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	84.23	90.2	95.52	98.22
2	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	86.74	88.89	88	-

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

Survei titik kemacetan Tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 20 titik kemacetan di Kota Depok. Faktor penyebab kemacetan tersebut beragam, baik akibat terbatasnya kapasitas jalan, percampuran moda lokal dan regional, proses naik-turun penumpang, radius persimpangan maupun keberadaan PKL dan angkutan informal (ojek) yang makin meningkatkan beban jalan. Adapun fokus penanganan kemacetan pada Tahun 2014 ada di 2 (dua) titik yang ditargetkan yaitu Simpang jalan kemakmuran, simpang jalan raden saleh, namun tidak dapat dilaksanakan karena pembebasan lahan tidak terealisasi. Adapun penanganan titik macet dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut :

Tabel 2.19. Penanganan Titik Macet dalam 5 tahun Terakhir

2011	2012	2013	2014	2015
1. Simpang Depok, Kel Sukamaju 2. Jl. Bahagia Keadilan-Jl. Juanda, Kel Bhakti Jaya 3. Jl. Cinere (dari propinsi)	1. Pembangunan Jalan Fly over UI Kec. Beji 2. Jl. Margonda (Ramanda-Kartini) 3. Jl. Tembus sejajar Rel Dewi Sartika – Arif Rahman Hakim 4. Jl. Kartini-Citayam	1. Jalan Pitara Raya 2. Jalan Tapos-Cibinong 3. Jalan Tumaritis Depdagri	Tidak terealisasi pada 1. Simpang Jalan Kemakmuran, 2. Simpang Jalan Raden Saleh karena pembebasan lahan tidak selesai	1. Jl. Asmawi – Jl. Kukusan Raya (lanjutan) 2. Jl. RTM (lanjutan)

Sumber : LKPJ, diolah



Pertumbuhan penduduk di Kota Depok berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kondisi ini menyebabkan munculnya simpul-simpul kemacetan. Untuk menyelesaikannya permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang lebih komprehensif, selain penanganan fisik dibutuhkan juga penanganan masalah nonfisik/sosial seperti peningkatan kesadaran dan penegakan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Depok mengalami perkembangan selama periode 2012-2014. Pada tahun 2012, rumah tinggal bersanitasi berada di tingkat 86,74% dari total rumah tinggal yang ada. Kemudian di tahun 2014, tingkat capaiannya sudah mencapai 88%. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi (1) Fasilitas air bersih (2)Pembuangan tinja (3)Pembuangan air limbah (air bekas) (4)Pembuangan sampah.

Walaupun terjadi peningkatan kinerja, namun hal ini menunjukkan bahwa sebagian pembangunan rumah tinggal di Kota Depok masih belum memenuhi aspek dasar yang dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan ialah melalui bantuan penyediaan MCK dan *septic tank* komunal terutama di kawasan kampung yang kumuh. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2013 bahwa jumlah keluarga yang belum memiliki septiktank sebanyak 11.693 keluarga dan sebanyak 21,34% warga Depok masih buang air besar diluar septictank seperti pada koya, sungai, kolam dan lainnya.

Dalam hal pengelolaan air limbah di Kota Depok diolah hanya dengan menggunakan satu buah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang terletak di Kalimulya dengan kapasitas sangat terbatas dan teknologi yang belum memadai.



Berkenaan dengan drainase, secara umum sistem drainase di Kota Depok terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Depok, yang terdiri dari sungai. Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Namun, ada beberapa ruas jalan belum memiliki saluran drainase sehingga beberapa daerah menjadi rawan banjir dan genangan. Penyebab terjadinya daerah rawan banjir adalah karena tertutupnya *street inlet* oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan.

Survei titik banjir menurut Dinas BMSDA Tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat setidaknya 52 titik banjir di Kota Depok. Dari sisi program penanggulangan banjir, pemerintah daerah Kota Depok melakukan berbagai kegiatan, yaitu konservasi situ dan sempadan sungai yang terealisasi antara lain : 3 bangunan irigasi, 54 saluran drainase, 8 Daerah Aliran Sungai, 4 sempadan dan 1 setu. Adapun penanganan masalah banjir dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2014 terlaksana di 2 titik lokasi banjir (drainase) yakni di perumahan Sri Wedari Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, dan kampung Utan Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung.

Namun demikian, permasalahan banjir masih terlihat diberbagai lokasi yang merupakan masalah yang dihadapi suatu perkotaan. Sehingga diperlukan pendekatan menyeluruh untuk mengatasinya, tidak hanya yang berjangka pendek tetapi juga jangka panjang melalui pengendalian tataruang kota secara ketat, gerakan penghijauan, pemeliharaan drainase yang telah dibangun, dan pentingnya keterlibatan masyarakat.



D. Perumahan

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Perkembangan cakupan rumah tangga pengguna air bersih perpipaan di Kota Depok cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2014 telah mencapai 12,43%, dengan adanya perubahan manajemen pengelola air bersih dari Kota Bogor ke Depok serta bertambahnya jumlah rumahtangga diharapkan peningkatan pelayanan perpipaan air bersih di Kota Depok semakin tumbuh baik.

Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian PDAM Kota Depok, pengelolaan air bersih yang sebelumnya dikelola oleh UPT Air Bersih dengan berdirinya PDAM Kota Depok, maka pengelolaannya diserahkan kepada PDAM Kota Depok. Dari data PDAM jumlah pelanggan Kota Depok sampai dengan tahun 2014 yang dilayani oleh Kota Depok sebanyak 50.559 SR. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyediaan air bersih berasal dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a) Masyarakat lebih menyukai menggunakan air bawah tanah,
- b) Belum adanya regulasi yang membatasi pemanfaatan air bawah tanah, dan
- c) Masih rendahnya minat masyarakat dalam mendaftarkan sebagai konsumen, disamping juga Wilayahnya yang sangat menyebar.

E. Penataan Ruang

Dengan terbitnya regulasi baru di bidang penataan ruang yaitu Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032, yang sarat dengan muatan dan amanat baru, antara lain tentang pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH), zonasi, penegakan sanksi, dan penyediaan ruang kota bagi sektor informal dan pejalan kaki. Pengendalian tataruang dan banjir perlu dibarengi dengan upaya penghijauan dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat pencemaran.



Mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan sampai dengan Tahun 2032, bahwa setiap pemerintah daerah dapat menyediakan RTH publik sebesar 20% dan RTH Privat sebesar 10 %, hal ini masih menjadi kendala di Kota Depok. Pencapaian kinerja RTH di Kota Depok sampai dengan Tahun 2014 baru mencapai 9,085% RTH publik dan 6,27 % RTH privat. Perlu upaya keras dan komitmen yang tinggi untuk dapat mewujudkan RTH publik mencapai 20% di Kota Depok. Permasalahan pelaksanaannya RTH seringkali terkendala dengan pembebasan lahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong peran serta masyarakat dalam gerakan penghijauan di lingkungan masing-masing yang dapat diintegrasikan dengan gerakan pengelolaan sampah, serta mendorong sektor swasta khususnya di bidang perumahan untuk berkontribusi dalam pengembangan RTH.

F. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Depok No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dan dilakukan perubahan pada tahun 2015 dan pada saat ini telah disepakati oleh propinsi untuk menjadi Peraturan Kepala Daerah sebagai revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025.

RPJMD Kota Depok juga sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Depok No. 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016. Selama periode 2011-2015 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal). Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Depok juga sudah terakomodasi secara optimal. Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplemetasikan lebih lanjut di dalam RKPD.



Tabel 2.20
Hasil Kinerja Urusan Perencanaan
Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
5	Perencanaan Pembangunan				
1	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan Perda		-	-	1 dok Naskah Akademis revisi RPJPD
2	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan Perda/Perkada	2 dok sistem evaluasi kinerja RPJMD	-		1 RPJMD 2016 - 2021 TEKNOKRATIK
3	Tersedianya Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan Perda	1 dokumen RKPD 2013	2 dok (RKPD 2014 dan Perubahan 2013)	2 dokumen (1 dok RKPD 2015 dan 1 dok RKPD Perubahan 2014)	2 Dok (RKPD 2016 dan RKPD P 2015)

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

G. Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Rasio ijin trayek di Kota Depok cenderung stabil dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota Depok yang tidak menambah jumlah armada angkutan umum. Rasio ijin trayek tahun 2012 mencapai 0,32 persen dan menurun pada tahun 2015 yaitu mencapai 0,28 persen.

Sedangkan jumlah angkutan kota menurut trayek di Kota Depok Tahun 2014 sebanyak 2.884 kendaraan dan terbangun 1 (satu) Koridor Angkutan Pemandu Moda Depok-Bandara Soekarno Hatta sebagai salah satu transportasi massal.

**Tabel 2.21. Lintasan dan Jumlah Angkutan Kota Tahun 2014**

No	Kode	Lintasan	Jumlah
1	D.01	Terminal Depok - Depok Dalam PP.	156
2	D.02	Terminal Depok - Depok II Tengah / Timur PP.	553
3	D.03	Terminal Depok - Parung PP.	548
4	D.04	Terminal Depok - Beji - Kukusan PP.	170
5	D.05	Terminal Depok - Citayam - Bojonggede PP.	376
6	D.06	Terminal Depok - Pasar Cisalak PP.	287
7	D.07	Terminal Depok - Rawa Denok PP.	46
8	D.07A	Terminal Depok - Pitara - Citayam PP.	74
9	D.08	Terminal Depok - BBM - Kampung Sawah PP.	40
10	D.09	Terminal Depok - Studio Alam - Kampung Sawah PP.	56
11	D.10	Terminal Depok - Parung Serab - Kampung Sawah PP.	81
12	D.11	Terminal Depok - Kelapa Dua - Palsigunung PP.	145
13	D.15	Terminal Depok - Jl. R. Sanim - Simpangan- Limo PP.	36
14	D.17	Terminal Jatijajar - Bandaran Pucung - Bhakti ABRI - Tapos - Cibubur	13
15	D.21	Term.Sub Sawangan - Bedahan - Duren Seribu PP.	19
16	D.25	Bedahan - Term.Sub Sawangan - Abdul Wahab - Curug - BSI PP.	31
17	D.26	Term.Sub Sawangan - Citayam PP.	27
18	D.27	Perum Arco - Sawangan - Cinangka PP.	11
19	D.35	Pasar Palsigunung - Sipangan RTM - Pangk. Sugutamu	17
20	D.35 A	Pasar Palsigunung - Pasar Cisalak	5
21	D.69	Pasar Cisalak - Pekapuran - Leuwinanggung PP.	86
22	D.107	Pasar Cisalak - Gas Alam - Leuwinanggung PP.	107
		JUMLAH	2884

Sumber : Dinas DLLAJ Kota Depok 2014

Pada saat ini Kota Depok hanya memiliki satu terminal yaitu Terminal Terpadu Kota Depok yang merupakan terminal tipe C yang terletak di Pusat Kota yaitu di jalan Margonda, tetapi secara fungsi, terminal ini difungsikan sebagai terminal tipe A karena melayani juga jenis angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKADP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). Terminal ini berhubungan langsung dengan Stasiun KRL Depok Baru sehingga memudahkan untuk pergerakan orang dan barang yang akan berganti moda dari angkutan jalan raya (Angkot, AKDP & AKAP) ke angkutan KRL.



Selain Terminal Terpadu dalam kota, kota Depok juga ditunjang oleh beberapa Pangkalan / Sub Terminal. Keberadaan pangkalan / sub terminal ini ditetapkan berdasarkan rute trayek angkutan kota dan sebagian lagi timbul dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan penumpang. Pangkalan angkutan kota di Kota Depok terletak di Pasar Cisalak, Pasar Palsigunung, Simpangan (Simpang Jl. Tole Iskandar dengan Jl. Raya Bogor), Jl. Raya Bogor, Simpang Meruyung, Kukusan, Jl. Raya Parung dan Jl. Sawangan serta terminal bus regional ke Jatijajar yang pada saat ini belum dapat digunakan yang juga merupakan salah satu solusi sehingga perlu dipercepat penyelesaiannya, pada tahun 2015 terbangunnya 1 (satu) Koridor Angkutan Pemandu Moda Depok-Bandara Soekarno Hatta sebagai salah satu transportasi massal serta APTB Depok Jakarta. Realisasi *Transit Oriented Development* (TOD) kawasan terminal Depok dengan Stasiun Kereta Api serta kawasan lainnya merupakan pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi sehingga menciptakan suatu kota yang efisien yang dirancang untuk memaksimalkan akses ke transportasi umum.

Tabel 2.22
Hasil Kinerja Urusan Perhubungan
Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Perhubungan				
1	Rasio ijin trayek (%)	0.32	2.7	0.15	0.28
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	2	1	2

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

H. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah padat perkotaan, perbaikan akses terhadap sumber air bersih dan pengelolaan air limbah.



Perlindungan kawasan konservasi dan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung

Tabel 2.23
Hasil Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Lingkungan Hidup				
1	Persentase penanganan sampah (%)	41,3	45	49,05	63,7
2	Persentase Penduduk berakses air bersih (%)	82,4	87	87,5	92,20
3	Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat (%)	86,74	94,42	87,85	93,60

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

Untuk infrastruktur penanganan sampah di Kota Depok, dikelola di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) melalui unit pengelolaan sampah (UPS) skala kawasan dan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik diproses menjadi produk daur ulang. Konsep penanganan sampah ini merupakan konsep pengelolaan sampah terpadu yang menggabungkan konsep ramah lingkungan dengan penanganan skala kawasan. Upaya ini sangat penting untuk mengurangi beban yang diterima oleh TPA Cipayung yang semakin terbatas kapasitas lahannya.

Pada Tahun 2015 telah beroperasi 32 lokasi UPS dari jumlah tersebut 17 diantaranya UPS organik. Sementara UPS yang sudah terbangun sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 45 UPS. Cakupan penanganansampah yang terangkut saat ini (2015) baru mencapai 63,7% dan terus mengalami peningkatan dari 41,3 % tahun 2012. Hal ini dikarenakan kemampuan sumberdaya Dinas yang meliputi armada dan SDM yang masih belum optimal.



Upaya terobosan melalui pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) masih dirasakan belum optimal terkait dengan persoalan teknis dan sosial terutama akibat belum memadainya sosialisasi kepada masyarakat terdekat dengan lokasi. Serta dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Persampahan, terdapat perubahan sistem pengolahan sampah di UPS, yaitu UPS hanya menerima dan mengolah sampah organik yang telah terpilah menjadi kompos, maka upaya mengoptimalkan UPS, perlu upaya terobosan lain dalam rangka mendongkrak kapasitas pelayanan persampahan melalui pendekatan kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka menerapkan aplikasi pengolahan sampah sebagaimana diamanatkan oleh Perda ini menjadi salah satu upaya alternatif terbaik yang dapat dilakukan Kota Depok dalam mensiasati masalah TPA yang sudah kadaluarsa dan meningkatkan cakupan pengelolaan persampahan Kota Depok, selain dengan menggiatkan Gerakan Depok Memilah dengan banyaknya komunitas Bank Sampah dan pengelolaan sampah pola kerjasama dengan pihak swasta. Pengolahan sampah Non Organik, oleh masyarakat disediakan sebanyak 428 Unit bank sampah yang melayani masyarakat setiap satu minggu sekali dengan jadwal yang ditentukan masing-masing. Hal ini merupakan bentuk lain dari partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Depok.

Sistem Pengelolaan Sampah dengan pemilahan di sumbernya ini membawa Kota Depok meraih prestasi dalam Sanipura Award Tahun 2014 yang merupakan penghargaan bergengsi di bidang inovasi sanitasi.

Dari data BPS tahun 2014, rumah tangga di Kota Depok menggunakan fasilitas air minum sendiri sebanyak 93,02 persen, dari jumlah tersebut 45,56 persen rumah tangga lebih memilih menggunakan sumber air tanah dengan menggunakan pompa, sedangkan 3,06 persen rumah tangga di Kota Depok menggunakan leding (meteran dan eceran) sebagai sumber air minum.

**Tabel 2.24. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Depok Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Air kemasan	27,31	37,32	44,50	43,1	47,28
Leding	7,16	1,67	2,26	3,3	3,06
Pompa	61,95	57,61	47,82	51,0	46,50
Sumur terlindung	3,28	3,08	5,03	2,5	2,94
Sumur tak terlindung	0	0,32	0	0	0,06
Mata air terlindung	0	0	0,39	0	0,06
Mata air tak terlindung	0	0	0	0	0
Lainnya	0,3	0	0	0,1	0,11
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100

Sumber: Inkesra 2015

Dari data tergambar bahwa persentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat telah mencapai 93,60 % pada tahun 2015 meningkat dari 86,74% pada tahun 2012. Kesadaran masyarakat dan peran pemerintah dalam meningkatkan kesehatan melalui sanitasi dasar menjadi hal utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

I. Kependudukan dan Catatan Sipil

Dengan jumlah penduduk sebanyak 2,106 juta dengan laju kependudukan rata-rata selama tahun 2012-2015 sebesar 3,68 persen, maka penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dikelola secara baik, dengan Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Depok pada tahun 2012-2015 telah mencapai 100%. Dalam hal penerapan KTP Nasional berbasis NIK, khusus untuk Kota Depokbaru mulai terlaksana pada tahun 2011 dan menjadi percontohan Nasional.



Tabel 2.25
Hasil Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemerintah Daerah Kota Depok Periode 2012-2015

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Kependudukan dan Catatan Sipil				
1	Laju pertumbuhan Penduduk	4,18	3,34	3,64	3,57
2	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	100	100	100	100
3	Kepemilikan KTP (%)	100	100	100	99,48
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	64,46	65,06	81	25,39

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

Sedangkan kepemilikan KTP penduduk Kota Depok dari tahun 2012-2015 telah mencapai 100%, hal ini dikarenakan sistem dan SDM pengelolaan kependudukan telah disebar diseluruh Kelurahan yang terintergrasi dengan pusat data dan layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran di Kota Depok per 1000 penduduk pada tahun 2012 mencapai 64,46% namun mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu sebesar 25,39 %. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak bayi yang lahir tanpa disertai akta kelahiran. Kota Depok saat ini telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara *online*.

J. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Depok cukup mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2012 tingkat partisipasi berada di posisi 89,71%, maka pada tahun 2013-2015 sudah di atas 90% setelah mengalami peningkatan pada tahun 2013. Namun di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 90,45%.



Tabel 2.26
Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemerintah Daerah Kota Depok

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak				
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	89,71	96,12	90,67	90,45

Sumber :LKPJ AMJ

K. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awal selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat yang saling asih, bergotong dan terdorong untuk maju.

Tabel 2.27
Hasil Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pemerintah Daerah Kota Depok

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
1	Cakupan peserta KB aktif (%)	76,39	76,46	76,42	72,2
2	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	16,06	19,68	17,26	16,66

Sumber :LKPJ AMJ

Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB aktif di Kota Depok cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012, cakupan peserta KB aktif mencapai 76,39%, maka di tahun 2015 hanya sebesar 72,2%. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu Wilayah Kerja pada kurun waktu tertentu. Penurunan dari cakupan peserta KB aktif ini perlu menjadi salah satu perhatian, terutama terkait dengan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk alami Kota Depok.



Sedangkan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I mengalami peningkatan dari 16,06 % pada tahun 2012 menjadi 16,66 pada tahun 2015.

L. Ketenagakerjaan

Kondisi ekonomi wilayah Kota Depok dilihat dari aspek ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada rentang 2013-2014 terjadi penambahan jumlah pekerja dari 826.191 pekerja (2013) menjadi 877.684 pekerja (2014), terdapat kenaikan 6,23% (sumber: Inkesra 2013 dan 2014). Dalam hal lapangan kerja, mayoritas dikontribusikan dari sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebesar 33,52%, sektor jasa kemasyarakatan lainnya sebesar 28,35% dan sektor pertambangan/penggalan, listrik, gas&air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan sebesar 24,27%, ketiga sektor tersebut menjadi kontributor terbesar penyerapan tenaga kerja di Kota Depok. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap tenaga kerja yang paling sedikit sebesar 1,74 persen. Hal ini sejalan dengan semakin minim dan berkurangnya lahan pertanian di Kota Depok.



Tabel 2.28. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama Di Kota Depok, Tahun 2014

Lapangan Usaha	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	14.282	2,44	1.033	0,35	15.315	1,74
2. Industri Pengolahan	73.528	12,56	32.827	11,24	106.355	12,12
3. Perdagangan, Rumah makan dan Hotel	167.117	28,54	127.090	43,50	294.207	33,52
4. Jasa Kemasyarakatan	137.537	23,49	111.287	38,10	248.824	28,35
5. Lainnya (pertambangan/penggalian, listrik, gas&air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan)	193.091	32,98	19.892	6,81	212.983	24,27
Jumlah	585.555	100,00	292.129	100,00	877.684	100,00

Sumber : BPS Kota Depok

Tabel 2.29. TPAK, TPT, dan TKK Tahun 2011 – 2013 di Kota Depok

Indikator/Tahun	2011	2012	2013	2014
TPAK (persen)	63,18	63,81	62,74	63,34
TPT (persen)	10,60	9,42	7,67	8,44
TKK (persen)	89,40	90,58	92,33	91,56

Sumber : BPS Kota Depok

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kota Depok Tahun 2014 sebesar 63,34 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 63 sampai 64 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu. Rasio ini khusus untuk penduduk yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja.



Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi TKK maka kesempatan kerja semakin tinggi. TKK Kota Depok tahun 2014 sebesar 91,56 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 92 orang merupakan penduduk bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT kota Depok Tahun 2014 sebesar 8,44 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 8 sampai 9 orang yang merupakan pengangguran.

Tingkat Kesempatan Kerja Kota Depok dari Tahun 2011 hingga 2014 menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan. Begitu pula Tingkat Pengangguran Terbuka dalam rentang waktu yang sama memperlihatkan trend penurunan. Kondisi sosial ekonomi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya disebabkan tingkat daya beli masyarakat yang tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Depok yang menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, migrasi penduduk berpendidikan tinggi ke Kota Depok, serta pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pada Tahun 2014 berdasarkan data inkesra Tahun 2014, penduduk Kota Depok yang termasuk ke dalam angkatan kerja sekitar 958.587 orang, terdiri dari atas laki-laki sebanyak 635.613 orang dan perempuan 322.974 orang. Dari jumlah tersebut, 877.684 orang yang bekerja, terdiri dari laki-laki sekitar 585.555 orang dan perempuan sebanyak 292.129 orang. Dengan demikian masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 80.903 orang yang terdiri atas laki-laki sekitar 50.058 orang dan perempuan 30.845 orang.



Di Kota Depok yang termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 554.739 orang, dengan rincian 139.380 orang sedang sekolah, 366.062 orang mengurus rumahtangga dan lainnya sebanyak 49.297 orang.

Tabel 2.30. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2014 (dipublikasikan tahun 2015)

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja	635.613	83,76	322.974	42,81	958.587	63,34
a. Bekerja	585.555	92,12	292.129	90,45	877.684	91,56
b. Pengangguran	50.058	7,88	30.845	9,55	80.903	8,44
Bukan Angkatan Kerja	123.265	16,24	431.474	57,19	554.739	36,66
a. Sekolah	63.971	51,90	75.409	17,48	139.380	25,13
b. Mengurus Rumahtangga	21.673	17,58	344.389	79,82	366.062	65,99
c. Lainnya	37.621	30,52	11.676	2,71	49.297	8,89
Jumlah	758.878	100,00	754.448	100,00	1.513.326	100,00

Sumber : Inkesra, 2015

M. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UKM sudah terbukti ketahanannya terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.



Tabel 2.31
Hasil Kinerja Urusan KUMKM
Pemerintah Daerah Kota Depok

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Koperasi dan UKM				
1	Persentase koperasi aktif (%)	60,57	62	62,62	62,7

Sumber : LKPJ AMJ

Kegiatan pembinaan Koperasi di Kota Depok dilakukan melalui pembinaan SDM, penguatan kelembagaan dan fasilitasi pemodal, percepatan pelayanan dengan pengembangan Teknologi Informasi untuk keterhubungan antarkoperasi, terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, terlaksananya pemeringkatan koperasi, terlaksananya pembinaan koperasi oleh pokja koperasi, terlaksananya pembubaran, penggabungan dan peleburan badan hukum koperasi, terselenggaranya pekan koperasi, evaluasi KSP/USP koperasi, terfasilitasinya kelembagaan 550 koperasi primer dan 2 sekunder, dan tersosialisasikannya UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah persentase Koperasi aktif Tahun 2012 sebesar 60,57 % dan terus mengalami peningkatan menjadi 62,7% pada tahun 2015.

Dengan melihat manfaat, kontribusi serta sifatnya yang “*easy entrance*” UMKM harus dibantu dan difasilitasi oleh berbagai *stakeholders*, seperti pemerintah, perbankan, Lembaga Keuangan Mikro/koperasi, serta pelaku usaha besar sehingga potensi yang besar yang dimiliki UMKM dapat terus dikembangkan.

N. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ialah melalui penegakan Perda yang telah disusun. Penegakan Perda di Kota Depok selama ini sudah cukup optimal dilakukan. Penegakan perda digunakan dalam rangka peningkatan iklim investasi di Kota Depok.

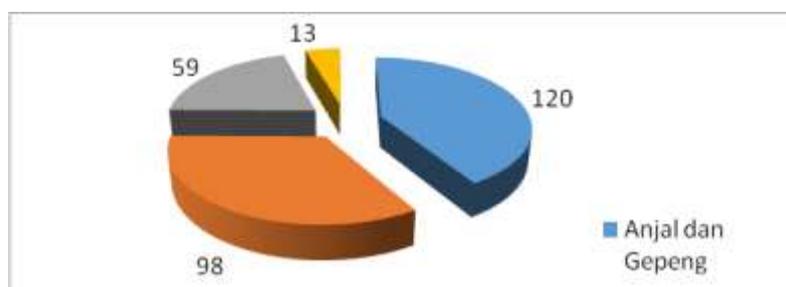
Tabel 2.32
Hasil Kinerja Urusan Otonomi Daerah
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2012-2015

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Otonomi Daerah				
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,5	0,5	0,47	0,47
2	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan				-
3	Penduduk Miskin (%)	2,75	2,46	2,32	2,01
4	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80,55	80,26	80,18	80,66

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

Kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat di Kota Depok secara umum terkendali. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya melahirkan munculnya permasalahan kriminalitas, penyandang masalah sosial, migran liar, penghuni liar, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada Tahun 2014, dari total 290 kali penertiban yang dilakukan satpol PP sebanyak Anjal dan gepeng 120 org, PSK 98 org, spanduk 59 pelanggaran, reklame 13 pelanggaran.

Grafik 2.23. Jenis Penertiban Satpol PP Tahun 2014





Namun dengan jumlah personil Satpol PP yang belum memenuhi standar per 10.000 jumlah penduduk, kegiatan penegakan ketertiban umum tetap dilakukan, jika dilihat pada tabel diatas, bahwa rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk baru mencapai 0,5 pada tahun 2012 dan mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,47 pada tahun 2015, hal ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk namun tidak diikuti oleh kenaikan jumlah personil Polisi Pamong Praja.

Di Kota Depok, ketersediaan indeks kepuasan layanan masyarakat selama periode 2012-2015 selalu ada setiap tahunnya dan meningkat, pada tahun 2012 indeks mencapai 80,55 dan meningkat menjadi 80,66 pada tahun 2015 dan masuk dalam kategori BAIK menurut Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Depok telah mengupayakan dengan beberapa hal. Salah satunya menerapkan *Electronic Procurement* dalam proses pelelangan, dalam konteks *E-Government*, dirintis tata kelola perencanaan dan penganggaran telah terintegrasi berbasis IT, melakukan restrukturisasi birokrasi melalui penguatan fungsi badan pelayanan perijinan terpadu, juga dilakukan penerapan ISO di seluruh SKPD Kota Depok secara bertahap, Ini semua dilakukan untuk dapat meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat.

Tata kelola keuangan daerah Kota Depok telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2012. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Depok meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat kepuasan publik juga dirasakan belum optimal. Masalah ini diindikasikan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat tentang beberapa jenis pelayanan umum, seperti mahalnya biaya pendidikan di Kota Depok. Penyelenggaraan pendidikan di beberapa tempat masih mengikuti mekanisme pasar. Selain itu, masih dijumpai beberapa keluhan, seperti dalam hal pengangkutan sampah, penyediaan air bersih, penyediaan layanan kesehatan, dan pengelolaan jalan Kota.



Bertambahnya titik reklame hingga di kawasan hunian juga menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat.

Selain itu, kendala penting untuk segera diatasi adalah rendahnya kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima kepada masyarakat. Adanya beberapa kasus oknum PNS yang terlihat dalam kasus korupsi masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN. Dalam menjalankan peran pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota harus membuka akses informasi pelayanan, misalnya linformasi pada anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTRK, layanan KTP, KK dan surat-surat keterangan lainnya.

Tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menjadi sorotan utama masyarakat Kota Depok yang berakibat pada rendahnya motivasi para pengelolanya, hilangnya harapan dan kepercayaan masyarakat kota, hilangnya kepercayaan para pelaku usaha dan investor dan melambatnya roda pembangunan. Dengan adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola pemerintahan kota, dipastikan akan menghasilkan percepatan pembangunan. Potensi penguat proses pembangunan kota terdapat pula dari masyarakat. Secara terstruktur dan terencana, masyarakat harus dilibatkan dalam proses dan pengawasan pembangunan, termasuk dalam upaya tindak pencegahan korupsi.

O. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sehingga masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial sebagai upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.



Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Yang dimaksudkan sebagai subyek adalah sebagai aktor penggerak bukan penerima manfaat atau hanya obyek saja.

Rukun Waga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian, Jumlah tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif selama periode 2012-2015 telah mencapai 100% begitu pula dengan jumlah Posyandu aktif.

Tabel 2.33. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kota Depok

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan masyarakat dan desa				
1	PKK aktif (%)	100	100	100	100
2	Posyandu aktif (%)			100	100

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

P. Statistik

Buku Kota Depok Dalam Angka selama periode 2012-2015 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kota Depok yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Depok.



Tabel 2.34
Hasil Kinerja Urusan Statistik
Pemerintah Daerah Kota Depok

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
	Statistik				
1	Buku "Kota Depok dalam angka"	ada	ada	ada	ada (1 Dok)
2	Buku "PDRB Kota Depok"	ada	ada	ada	ada

Sumber :LKPJ AMJ

Q. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Daerah Kota Depok telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui <http://www.depok.go.id>.

Tabel 2.35
Hasil Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Daerah Kota Depok

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
	Komunikasi dan informatika				
1	Web site milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada
2	Pameran/expo	ada	ada	ada	ada

Sumber :LKPJ AMJ

Transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Kota Depok telah menjadi tuntutan masyarakat. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RDTRK, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola Pemerintah diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan dan meningkatnya kepercayaan publik.



Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat luas sudah dirasa cukup besar. Dalam mewujudkan Depok sebagai *Cyber City*, inisiasi hal ini telah dimulainya pembangunan jaringan internet yang akan menjangkau seluruh wilayah Kota. Fasilitas hotspot (wi-fi) gratis di area publik seperti sepanjang jalur margonda dan Kantor Pemerinthan.

Kegiatan promosi melalui pameran/expo merupakan media yang cukup ampuh dalam memperkenalkan produk/jasa tertentu. Perkembangan pelaksanaan pameran/expo yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama periode lima tahun dilakukan minimal 1 kali.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Disamping urusan wajib, pemerintah Kota Depok juga memiliki fokus urusan pilihan yang sesuai dengan potensi dan kondisi obyek Kota Depok. secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Depok dalam periode 2011-2015.

A. Pertanian

Walaupun Kota Depok bukan merupakan daerah pertanian, namun masih terdapat beberapa kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup dominan. Produktivitas produksi pangan setiap tahunnya adalah masalah lahan baku sawah yang dapat digunakan untuk ditanami padi, seperti pada tahun 2014 adalah 175 Ha, dengan kenyataan bahwa rata-rata petani padi merupakan penggarap, luasan sawah seluas 384 Ha pada akhir tahun 2013 hanya dimanfaatkan seluas 175 Ha pada tahun 2014, selebihnya ditanami tanaman lain (palawija dan sayuran) dan sebagian lagi tidak dapat digunakan. Baik tanaman padi dan palawija produksi terus mengalami penurunan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dikarenakan luas lahan yang semakin menurun, produksi pangan Kota Depok dari tahun 2011- 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah. Dari luas panen sebanyak 54 Ha, produksi jagung yang terhitung dipanen sebagai produksi palawija hanya seluas 5 Ha pada tahun 2014. Begitupun dengan produksi sayuran, relatif stabil.



Tabel 2.36. Indikator dan Capaian Program Peningkatan Produksi dan Penganeekaragaman Konsumsi pangan

No	Indikator Program	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	Produksi Pangan :					
1	Produksi Padi (Ton)	5.443,42	3.800,36	2.452	2.351	1.544,4
2	Produksi Palawija (Ton)	5.969,83	4.642,18	2.374	3.357	1.405
3	Produksi Hortikultura (ton)	12.541	7832,30	5,79	5.753	9.757
4	Ikan Konsumsi (ton)	1.712	1792,41	1.851,42	1.950,18	1.512,47
5	Produksi Daging (kg)	12.556.041	10.494.365	10.346.359	12.415.631	2.490.375
6	Produksi Susu (litr)	2.556.588	1.485.862	1.411.569	1.552.726	11.814.660
7	Produksi Telur (butir)	63.691.270	59.921.829	54.133.135	56.839.792	1.116.387
8	Populasi ternak kecil (ekor)	6.136	11.450	6.090	6.375	56.839.800
9	Konsumsi Ikan (Kg/kap/thn)	22,2	22,4	22,6	24	24
10	Konsumsi Susu (Liter/kap/thn)	1,66	1,5	1,66	1,66	1,66

Sumber : LKPJ AMJ

Produktivitas hasil peternakan juga mengalami perubahan produksi dari tahun ketahun, namun konsumsi terhadap ikan dan susu semakin meningkat walupun belum signifikan.

**Tabel 2.37
Hasil Kinerja Urusan Pertanian
Pemerintah Daerah Kota Depok**

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
	Pertanian				
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	2,09	1,96	1,93	1,83

Sumber :LKPJ AMJ

Kontribusi sektor pertanian di Kota Depok terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2012 kontribusi sektor pertanian mencapai 2,09% dari total PDRB, maka di tahun 2015 kontribusinya hanya mencapai 1,83%.



Penurunan kontribusi sektor pertanian ini salah satunya diakibatkan semakin minimnya lahan pertanian di Kota Depok. Konversi lahan pertanian menjadi lahan untuk niaga, jasa dan perumahan semakin tahun semakin meningkat.

B. Pariwisata

Kota Depok sedang merintis sebagai destinasi wisata baru terutama untuk wisatawan lokal, sebagai Kota Niaga dan Jasa dengan potensi wisata alam setu akan menjadi andalan wisata alam selain wisata rekreasi lainnya. Perkembangan pariwisata Kota Depok ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur kota, seperti: pengetahuan/pendidikan, *heritage*, kuliner, belanja dan lainnya.

Kota Depok saat ini didominasi oleh kegiatan wisata belanja, khususnya dengan perkembangan *rumah makan* yang marak, produk pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*), serta wisata berbasis pendidikan (*knowledge-based tourism*) juga menjadi unggulan utama kawasan wisata ini.

Tabel 2-38
Hasil Kinerja Urusan Pariwisata
Pemerintah Daerah Kota Depok

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
	Fokus Layanan Urusan Pilihan				
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,05	0,05	0,05	0,05

Sumber :LKPJ AMJ

Kontribusi sektor pariwisata di Kota Depok terhadap PDRB cenderung stabil penurunannya setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa potensi wisata di Kota Depok belum dapat dikelola secara optimal oleh swasta maupun Pemerintah.



C. Kelautan dan Perikanan

Jumlah produksi perikanan Kota Depok setiap tahunnya cenderung turun, pada tahun 2012, produksi perikanan mencapai 1.792 ton tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015 yang hanya mencapai 1.512 ton. Penurunan produksi ikan merupakan dampak dari berkurangnya luas lahan perikanan/kolam yang dialihfungsikan menjadi perumahan. Hal ini sangat disayangkan karena Pemerintah Kota Depok telah memiliki Balai Benih Ikan sebagai lembaga yang dapat mengembangkan produksi bibit yang akhirnya akan meningkatkan jumlah produksi ikan di Kota Depok. Dari sisi tingkat konsumsi ikan di Kota Depok, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dari 22,2 kg/kap/tahun menjadi 24 kg/kap/tahun.

Tabel 2.39
Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Pemerintah Daerah Kota Depok

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
	Perikanan dan Kelautan				
1	Produksi perikanan (ton)	1792,41	1.851,42	1.950,18	1.512,47

Sumber : LKPJ AMJ

D. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Depok dan terus menunjukkan trend perkembangan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian yang mencapai 37,98% pada tahun 2015 dari 36,75% pada tahun 2012.



Tabel 2. 40
Hasil Kinerja Urusan Perdagangan
Pemerintah Daerah Kota Depok

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
	Perdagangan				
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	36,75	37,38	38,01	37,98 %

Sumber : LKPJ AMJ

Dari sisi lain, Perkembangankelompok pedagang/usaha informal (PKL) di Kota hingga saat ini menjadi polemik tersendiri. Di satu sisi, aktivitas para PKL yang umumnya menggunakan sejumlah area fasilitas umum, sering mengganggu kepentingan umum dan menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas. Di sisi lain, PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu diberdayakan. Kebutuhan fasilitasi, penataan dan pembinaan PKL menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.

Sektor perdagangan Kota Depok juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat. Pada saat ini, pasar rakyat terdesak oleh semakin banyaknya hypermarket, supermarket dan toserba pada skala retail. Keberadaan retail/toko swalayan yang semakin banyak, menggeser keberadaan pasar tradisional dan warung-warung yang dikelola oleh masyarakat. Menjamurnya pasar modern tersebut telah menyebabkan omset pedagang tradisional menurun.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pasar dengan konsep baru, yaitu pembangunan pasar rakyat bersih. Dengan konsep ini diharapkan eksistensi pasar dapat lebih meningkat dan bisa menyaingi toko penjualan modern. Keberadaan pasar tradisional perlu juga direvitalisasi agar menjadi sarana ekonomi warga yang nyaman, bersih dan tidak mengganggu lalu lintas. Penataan berbagai jenis usaha ritel kecil-menengah-besar harus mampu menjadi sumber ekonomi masyarakat, namun di sisi lain keberadaannya jangan sampai kontraproduktif dengan kehidupan dan kenyamanan warga masyarakat.



E. Perindustrian

Perkembangan kontribusi sektor industri Kota Depok cenderung mengalami penurunan selama periode 2012-2015. Jika pada tahun 2012 sektor industri bisa memberikan kontribusi sebesar 35,36% terhadap perekonomian Kota, di tahun 2015, kontribusi mengalami penurunan hanya menjadi sebesar 33,92%. Pertumbuhan sektor (i) konstruksi/bangunan, (ii) perdagangan, hotel, dan restoran, serta (iii) perhubungan dan komunikasi yang relatif tinggi mengakibatkan kontribusi sektor industri mengalami penurunan.

Tabel 2.41
Hasil Kinerja Urusan Perindustrian
Pemerintah Daerah Kota Depok

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
	Industri				
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	35,36	35,3	34,16	33,92 %

Sumber :LKPJ AMJ

Selain itu, dengan semakin tingginya tingkat persaingan di sektor industri pengolahan, baik secara nasional ataupun global, juga mempengaruhi kinerja industri pengolahan lokal, khususnya yang berorientasi ekspor.

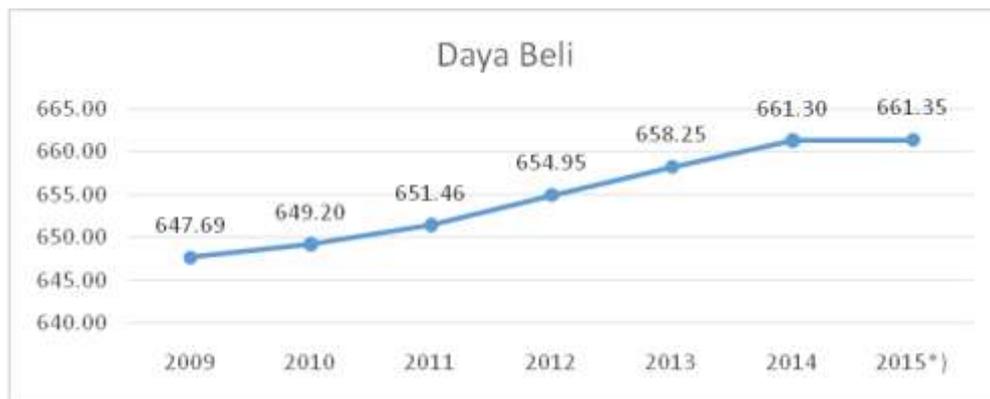
2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

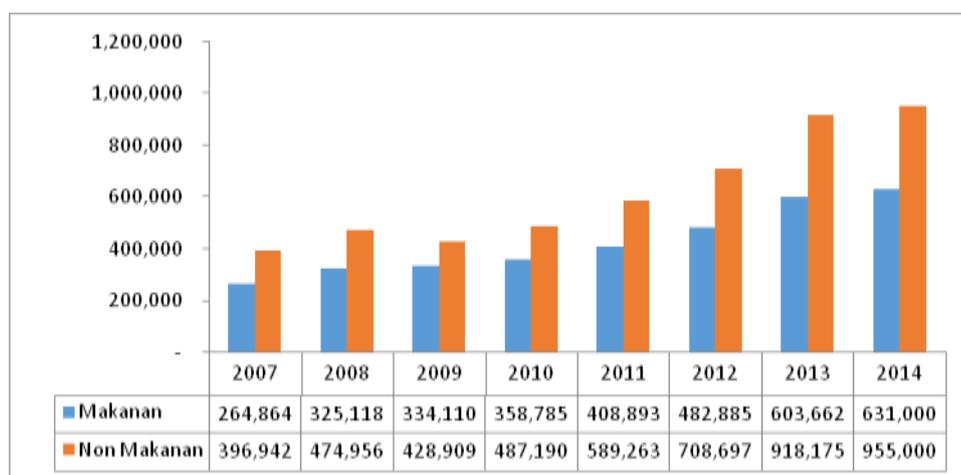
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total daerah.

Dari sisi daya beli masyarakat, pada Tahun 2015 terjadi peningkatan daya beli di Kota Depok yaitu sebesar 661,335ribu rupiah dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 661,30ribu rupiah. Hal ini menunjukkan daya saing Kota Depok sebagai potensi pasar juga cukup besar terhadap Wilayah lainnya di Provinsi Jawa Barat.

**Grafik 2.24. Daya Beli Masyarakat Kota Depok Tahun 2009-2014**

Sumber: IPM 2015, BPS

Dari data pola konsumsi menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran rumah tangga untuk belanja non makanan rata-rata lebih tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Depok secara umum sudah lebih sejahtera.

Grafik 2.25. Pola Konsumsi Masyarakat Kota Depok 2007-2014

Sumber: Diolah dari Data Inkesra Kota Depok 2015

2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi Kota Depok dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perijinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil



produksi. Kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat di Kota Depok secara umum terkendali. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya melahirkan munculnya permasalahan kriminalitas, penyandang masalah sosial, migran liar, penghuni liar, dan pada akhirnya menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada Tahun 2014, dari total 290 kali penertiban yang dilakukan satpol PP sebanyak Anjal dan gepeng 120 org, PSK 98 org, spanduk 59 pelanggaran, reklame 13 pelanggaran.

Pengurusan proses perizinan yang cukup lama telah menjadi salah satu kendala utama dalam iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kota Depok telah membentuk Unit Pelayanan Satu Pintu melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT).

Realisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) perizinan sebagai berikut :

Tabel 2.42. Realisasi Perizinan Dari Tahun 2009-2014

No	Jenis Perizinan	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	IPR (Izin Pemanfaatan Ruang)	850	1.158	1.171	1.296	1.543	1.972
2	HO (Izin Gangguan)	807	790	609	976	1.240	1.041
3	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	5.797	9.059	11.429	6.715	6.570	7.536
4	SIUP Kecil	-	-	-	764	794	696
5	SIUP Menengah	842	1.166	1.164	266	301	339
6	SIUP Besar	-	-	-	34	32	34
7	SIUP Mikro	-	-	-	66	50	59
8	Izin Usaha Industri (IUI)	67	106	131	42	53	51
9	TDI (Tanda Daftar Industri)	-	-	-	29	24	43
10	IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	81	70	131	39	83	155
11	Izin Tetap Usaha	110	149	126	123	157	149



No	Jenis Perizinan	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Pariwisata						
12	Izin Sementara Usaha Pariwisata	-	-	-	61	20	-
13	IPABT (Izin Pengambilan Air Bawah Tanah)	101	87	69	17	81	43
14	IPKS (Izin Penyelenggaraan Kesehatan)	86	152	132	74	122	97
15	IPREK (Izin Pemasangan Reklame)	2.154	2.241	1.119	1.863	1.681	1.626
16	SITU (Surat Izin Tempat Usaha)	668	771	775	46	-	-
17	Prinsip	-	-	-	35	9	2
18	Spanduk & Baligo	-	-	-	1.316	1.038	1.000
19	Parkir	18	22	11	6	2	10
20	Izin Lokasi	-	1	3	10	17	10
21	IPLC (Izin Pembuangan & Pemanfaatan Air Limbah)	36	49	15	29	29	26
22	IUKS (Izin Usaha Ketenagaan Listrik Sendiri)	-	10	4	6	-	-
23	IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan)	-	-	-	1	1	-
24	IUTM (Izin Usaha Toko Modern)	-	-	-	14	38	13
25	IUMGB (Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi)	20	7	7	1	-	-
TOTAL		11.637	15.838	16.896	13.829	13.885	14.905

Sumber : LKPJ AMJ Kota Depok

Namun hingga kini kinerja pelayanan, terutama terkait lama proses perizinan masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Ini terlihat dengan banyaknya jumlah keluhan yang menyebutkan bahwa pelayanan yang ada tidak tepat waktu.

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM.



Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2012-2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Depok mencapai 8,14% dan meningkat menjadi 12,94% pada tahun 2014.

Tabel 2.43**Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Depok**

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014
	Fokus Sumberdaya Manusia			
1	Rasio lulusan S1,S2 dan S3 (%)	8,14	11,01	12,94

Sumber : BPS & LKPJ AMJ Kota Depok

Cukup tingginya rasio lulusan S1/S2/S3 yang ada di Kota Depok didukung dengan banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah memiliki reputasi yang cukup baik pada skala Internasional maupun regional.

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kota Depok terus mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jumlah usia produktif atau bonus demografi. Pada tahun 2012 rasio ketergantungan mencapai 44,94% dan terus mengalami penurunan menjadi 40,84% pada tahun 2015. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Depok mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.44**Rasio Ketergantungan di Kota Depok**

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	2012	2013	2014	2015
	Fokus Sumberdaya Manusia				
1	Rasio ketergantungan (%)	44,94	43,79	41,52	40,84

Sumber : BPS Kota D (diolah)

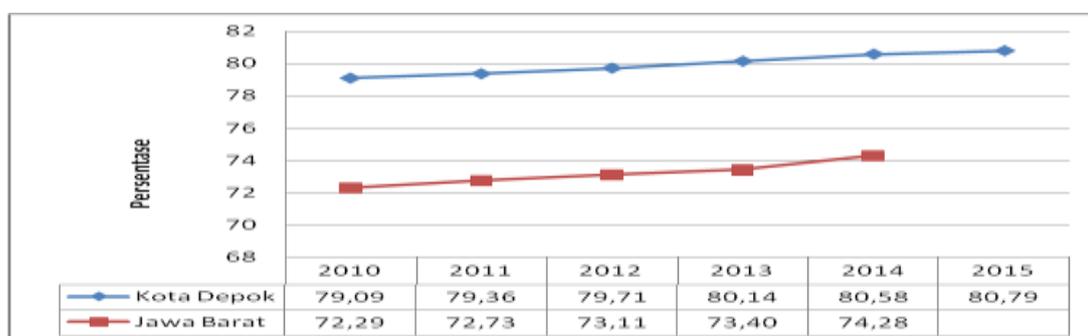


C. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan daerah, pada Tahun 2015 mengalami peningkatan 0,21 poin dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 80,79 poin (Tahun 2014 sebesar 80,58 poin) lebih tinggi dari Propinsi Jawa Barat sebesar 74,28. IPM diukur melalui 3 indikator yakni indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Tingginya nilai IPM Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif baik.

Grafik 2.26. IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2015



Sumber: LKPJ Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat, 2015



Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok per Kecamatan Tahun 2015 menunjukkan bahwa Kecamatan Sukmajaya memiliki nilai IPM tertinggi sebesar 81,94. Namun masih terdapat 7 kecamatan dengan nilai IPM kurang dari 78. Bahkan kecamatan Cipayung memiliki IPM terendah 70,74.

Tabel 2.45. Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2009-2015

NO	TAHUN	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka melek huruf (AMH)	Rata-rata Lama sekolah (RLS)	Daya Beli	IPM
1	2009	72,97	98,93	10,77	647,69	78,77
2	2010	73,09	98,94	10,94	649,20	79,09
3	2011	73,22	98,96	10,97	651,46	79,36
4	2012	73,34	99,01	10,98	654,95	79,71
5	2013	73,64	99,04	10,98	658,25	80,14
6	2014	73,75	99,07	11,16	661,30	80,58
7	2015	74,10	99,09	11,17	661,35	80,79

Sumber : BPS Kota Depok 2015

Tabel 2.46. Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka melek huruf (AMH)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Daya Beli	IPM
1	Sawangan	68,73	99,20	10,64	646,22	76,27
2	Bojongsari	69,81	97,46	10,22	636,19	75,40
3	Pancoran Mas	69,25	99,70	11,45	656,55	78,06
4	Cipayung	68,60	97,79	9,36	596,19	71,08
5	Sukmajaya	75,54	99,75	11,99	659,21	82,17
6	Cilodong	74,44	99,04	10,85	618,11	77,39
7	Cimanggis	74,70	99,47	11,11	657,04	80,83
8	Tapos	70,29	98,81	10,88	616,95	74,97
9	Beji	70,22	99,84	12,05	659,20	79,28
10	Limo	70,18	99,25	10,06	659,17	77,65
11	Cinere	72,68	99,08	11,91	667,02	80,98
	Kota Depok	74,10	99,09	11,17	661,35	80,79

Sumber : BPS Kota Depok 2015



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Kota Depok terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah.



3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri atas:

- Penerimaan pajak daerah
- Penerimaan retribusi daerah
- Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun pendapatan dari Dana perimbangan terdiri dari:

- Bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus

Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang sah bersumber dari:

- Hibah
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.

Kinerja pendapatan daerah Kota Depok menunjukkan peningkatan sejak tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan pendapatantahunan sebesar 16,74%. Pada tahun 2011 pendapatan Kota Depok adalah Rp 1.329.137.909.464,76 selanjutnya meningkat menjadi Rp. 2.462.139.246.348,96pada tahun 2015.



Sumber pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,71% per tahun. Pertumbuhan pendapatan juga didukung oleh Pendapatan Asli Daerah Kota Depok yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yaitu rata-rata sebesar 31,97% per tahun. Adapun komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu rata-rata sebesar 17,15% per tahun, terutama berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Jika melihat Tabel 3.1, keseluruhan komponen pendapatan Kota Depok menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif, kecuali komponen transfer Pemerintah Pusat – Dana bagi hasil pajak yang menunjukkan nilai pertumbuhan negatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh penerimaan pajak nasional yang juga menurun. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2011 – 2015 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 – 2015**

Kode	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.329.137.909.464,76	1.634.893.022.148,18	1.921.402.778.745,26	2.207.866.591.868,23	2.462.139.246.348,96	16,74%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	282.747.544.886,76	474.705.361.540,18	581.207.570.935,26	659.173.522.492,23	818.204.601.264,96	31,97%
1.1.1	Pajak Daerah	202.203.952.537,00	379.488.343.501,00	456.570.927.631,00	494.172.635.913,00	618.870.326.330,00	35,36%
1.1.2	Retribusi Daerah	35.958.362.743,00	40.585.045.845,00	47.171.323.260,00	76.315.802.066,00	47.049.097.296,00	13,13%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.345.662.646,00	5.470.961.595,00	10.040.329.713,00	11.005.792.223,00	10.311.292.640,00	15,33%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.239.566.960,76	49.161.010.599,18	67.424.990.331,26	77.679.292.290,23	141.973.884.998,96	41,79%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	679.024.056.556,00	815.919.647.774,00	879.183.182.460,00	971.981.431.339,00	975.526.903.366,00	9,71%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	131.022.561.556,00	89.805.418.774,00	91.003.761.460,00	99.723.799.339,00	73.559.860.366,00	-11,69%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	533.766.495.000,00	674.052.719.000,00	774.683.814.000,00	838.572.784.000,00	879.459.283.000,00	13,58%

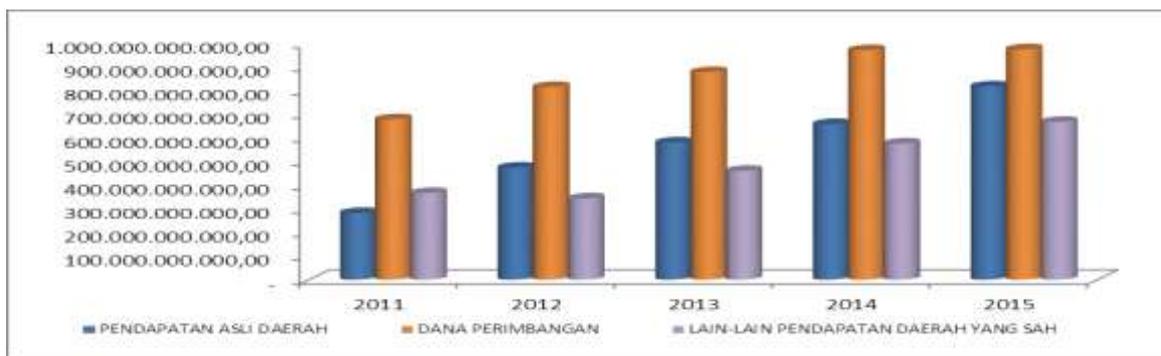


1.2.3	Dana Alokasi Khusus	14.235.000.000,00	52.061.510.000,00	13.495.607.000,00	33.684.848.000,00	22.507.760.000,00	77,02%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	367.366.308.022,00	344.268.012.834,00	461.012.025.350,00	576.711.638.037,00	668.407.741.718,00	17,15%
1.3.1	Hibah	6.499.965.000,00	-	-	-	-	-25,00%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	167.643.540.122,00	214.952.386.334,00	295.395.892.920,00	363.042.161.237,00	423.763.082.778,00	26,32%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	168.948.452.400,00	109.629.910.000,00	143.850.136.000,00	196.153.428.000,00	208.183.485.000,00	9,65%
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	24.274.350.500,00	19.685.716.500,00	21.765.996.430,00	17.516.048.800,00	36.461.173.940,00	20,07%
	JUMLAH	1.329.137.909.464,76	1.634.893.022.148,18	1.921.402.778.745,26	2.207.866.591.868,23	2.462.139.246.348,96	16,74%

Sumber : DPPKA, diolah

Jika dilihat dari tren persentase masing-masing komponen pendapatan daerah (Grafik 3.1), dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari PAD mengalami peningkatan tren sedangkan Dana Perimbangan mengalami peningkatan dan cenderung tetap pada tahun 2014-2015. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Depok relatif mulai cukup membaik dan mengarah pada kemandirian Pendapatan Daerah.

Grafik 3.1. Komponen Pendapatan Daerah



Apabila dilihat tabel 3.1. proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah, terlihat bahwa pendapatan dari Pajak Daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terkecil terhadap PAD Kota Depok.

3.1.1.1. Kinerja Pajak Daerah

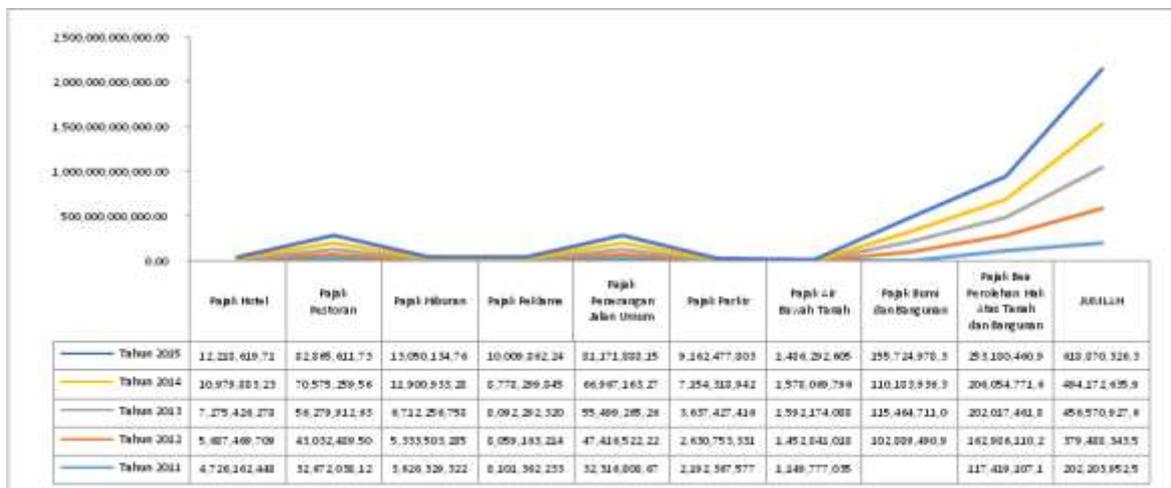
Pencapaian Pajak Daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 618.870.326.330,00, angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 202.203.952.537,00. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2011 ke tahun 2015 mencapai 35,36%. Peningkatan ini terjadikarena adanya pelimpahan PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah pada tahun 2012. Selanjutnya pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2012-2015 relatif sedang, yaiturata-rata sebesar 17,93%. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada berikut ini :

**Tabel 3.2. Realisasi Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Realisasi (Rp.)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pajak Hotel	4.726.162.448,00	5.687.469.709,00	7.275.426.278,00	10.979.883.235,00	12.218.619.716,00
2	Pajak Restoran	32.672.038.129,00	3.032.489.507,00	56.279.912.632,00	70.575.259.562,00	82.865.611.730,00
3	Pajak Hiburan	3.626.329.322,00	5.333.503.285,00	6.712.256.758,00	11.900.933.283,00	13.050.134.767,00
4	Pajak Reklame	8.101.362.233,00	8.059.163.214,00	8.092.292.320,00	8.778.299.845,00	10.009.862.247,00
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	32.316.808.670,00	7.416.522.222,00	55.499.265.262,00	66.967.163.272,00	81.171.888.159,00
6	Pajak Parkir	2.192.367.577,00	2.630.753.331,00	3.637.427.416,00	7.154.318.942,00	9.162.477.803,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	1.149.777.035,00	1.452.841.018,00	1.592.174.088,00	1.578.069.796,00	1.486.292.605,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan		02.889.490.965,00	115.464.711.044,00	110.183.936.303,00	155.730.178.397,00
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	117.419.107.123,00	62.986.110.250,00	202.017.461.833,00	206.054.771.675,00	253.175.260.906,00
	JUMLAH	202.203.952.537,00	79.488.343.501,00	456.570.927.631,00	494.172.635.913,00	618.870.326.330,00

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

Tren perkembangan realisasi pajak daerah tahun 2011-2014 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2011-2015

Sumber: DPPK Kota Depok, data diolah



3.1.1.2. Kinerja Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi Daerah dalam kurun waktu lima tahun telah menunjukkan hasil yang terus meningkat. Pada tahun 2011 retribusi Daerah hanya mencapai angka Rp. 35.958.362.743,00 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 sebesar Rp. 47.049.097.296,00. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan retribusi daerah dari tahun 2011-2015 mencapai 13,13 persen.

Data menunjukkan dari 3 (tiga) komponen retribusi daerah yaitu *Retribusi Perijinan Tertentu*, *Retribusi Jasa Umum*, dan *Retribusi Jasa Usaha*, pencapaian retribusi Perijinan Tertentu masih menduduki trend posisi tertinggi yaitu sebesar Rp. 27.167.709.870,00 pada tahun 2012 dan sebesar Rp. 32.839.073.085,00 pada tahun 2015. Sedangkan berturut-turut untuk realisasi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 15.992.979.349,00 dan Rp. 1.225.250.160,00 pada tahun 2011 dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 11.747.153.880,00 dan Rp. 2.462.870.331,00.

Pencapaian Retribusi Daerah Tahun 2011-2015 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Realisasi Retribusi Daerah Kota Depok Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi (Rp.)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Retribusi Jasa Umum	15.992.979.349	11.308.808.300	16.544.916.170	47.057.065.257	11.747.153.880
2	Retribusi Jasa Usaha	1.225.250.160	2.108.527.675	2.504.012.085	2.361.067.195	2.462.870.331
3	Retribusi Perijinan Tertentu	18.740.133.234	27.167.709.870	28.122.395.005	26.897.669.614	32.839.073.085
JUMLAH		35.958.362.743	40.585.045.845	47.171.323.260	76.315.802.066	47.049.097.296

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

Tren realisasi retribusi daerah Kota Depok tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2011-2014


Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

3.1.1.3. Kinerja Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Pada tahun 2011, realisasi bagian laba atas penyertaan modal yang dipisahkan sebesar Rp. 7.345.662.646,00 dan meningkat sebesar Rp. 10.311.292.640,00 pada tahun 2015, yaitu dari komponen Penyertaan Modal pada BUMD PT. Bank Jabar serta Bagi hasil dari pelaksanaan kegiatan PDAM Kabupaten Bogor.

Untuk lebih lengkapnya, pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2011-2015, dengan komponen Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4. Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Yang Dipisahkan Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi (Rp.)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	PDAM Kabupaten Bogor	2.000.000.000	-	3.907.215.835	4.009.440.522	3.897.223.731,00
2	BUMD PT. Bank Jabar	5.345.662.646	5.470.961.595	6.133.113.878	6.996.351.701	6.414.068.909
	JUMLAH	7.345.662.646	5.470.961.595	10.040.329.713	11.005.792.223	10.311.292.640,00

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

Tren perkembangan realisasi bagian laba atas penyertaan modal yang dipisahkan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4 Realisasi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal yang Dipisahkan Tahun 2011-2015



Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

3.1.1.4. Kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pencapaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang positif tiap tahunnya. Pada tahun 2015, pencapaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 141.973.884.998,96 meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 37.239.566.960,76. Adapun komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain, yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, dan PAD Lainnya. Peningkatan Lain-Lain PAD yang sah secara drastis terjadi pada tahun 2015, menyebabkan rata-rata pertumbuhan mencapai 41,79% per tahun. Kenaikan ini berasal dari adanya dana kapitasi dan non kapitasi BPJS Kesehatan sebagai dampak positif berlakunya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian dari komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



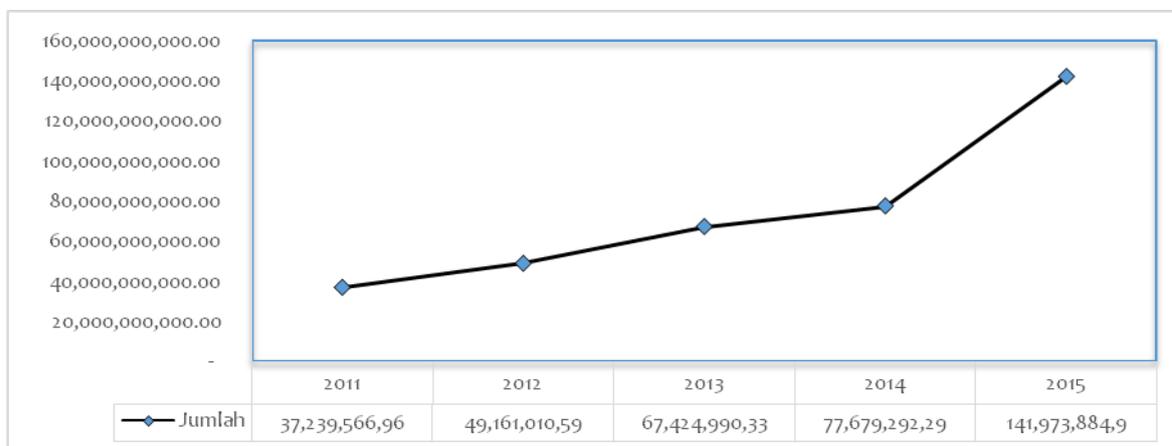
Tabel 3.5. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi (Rp.)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan	1.594.800.000,00	73.275.000,00	-	189.285.550,00	1.446.989.100,00
2	Penerimaan Jasa Giro	7.098.460.307,00	11.893.182.582,00	20.363.415.312,00	21.587.902.995,00	23.878.409.025,00
3	Penerimaan Bunga Deposito	12.614.725.971,00	10.079.379.067,00	9.062.063.029,00	11.093.150.681,00	27.844.306.628,00
4	Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	162.100.000,00	126.791.000,00	124.834.500,00	79.335.500,00	-
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	64.559.200,00	-	68.975.000,00	41.124.171,00	13.997,00,00
6	Pendapatan Denda Pajak	127.556.985,76	118.457.221,00	6.107.700.695,00	6.373.732.121,00	6.994.741.953,00,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	-	1.465.104.018,00	2.030.665.892,00	430.352.574,00	523.087.524,00,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	2.214.474.497,00	-	-	-	-
9	Pendapatan BLUD	-	14.074.278.472,00	24.151.076.043,10	34.648.862.751,08	35.681.372.073,00
10	PAD Lainnya	13.362.890.000,00	11.330.543.238,99	5.516.259.860,16	3.235.545.947,15	4.517.587.698,96
11	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	-	41.087.377.000,00
	JUMLAH	37.239.566.960,76	49.161.010.599,18	67.424.990.331,26	77.679.292.290,23	141.973.884.998,96

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

Tren perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2011-2015



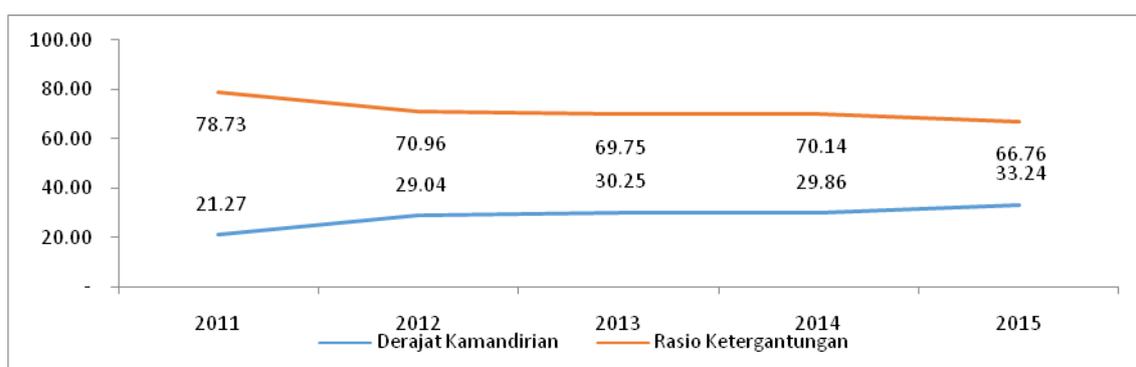
Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah



Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Kota Depok menunjukkan tren meningkat yang semula sebesar 21,27 pada tahun 2011 menjadi 33,24 pada tahun 2015. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Kota Depok menunjukkan tren menurun yang semula sebesar 78,73 pada tahun 2011 menjadi 66,76 pada tahun 2015. Meskipun ketergantungan Pemerintah Kota Depok terhadap bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat atau Daerah lainnya masih cukup tinggi, namun dengan perkembangan derajat kemandirian yang terus meningkat menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok relatif cukup baik.

Grafik 3.6 Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2011-2015



Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah



3.1.2. Dana Perimbangan

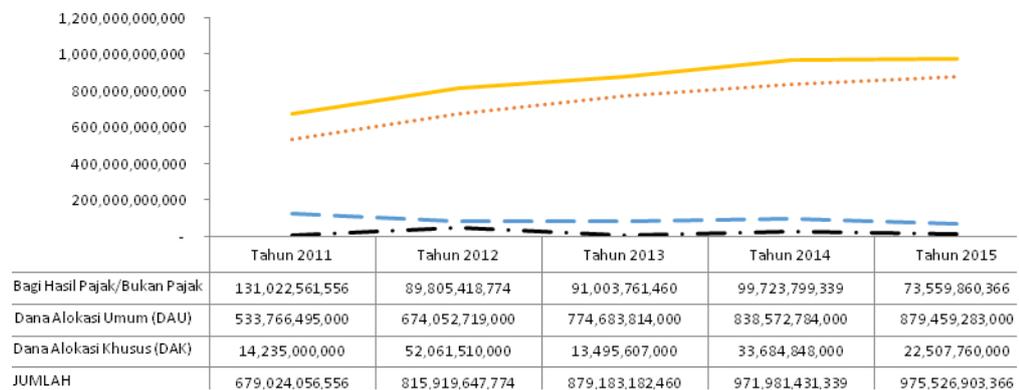
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi penerimaan Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Depok menunjukkan tren positif, hal ini terlihat dari realisasi dana perimbangan tahun 2011 sebesar Rp. 679.024.056.556,00 dan meningkat sebesar Rp. 975.526.903.366,00 pada tahun 2015. Capaian dari komponen dana perimbangan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi (Rp.)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bagi Hasil Pajak/Bukuan Pajak	131.022.561.556	89.805.418.774	91.003.761.460	99.723.799.339	73.559.860.366
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	533.766.495.000	674.052.719.000	774.683.814.000	838.572.784.000	879.459.283.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	14.235.000.000	52.061.510.000	13.495.607.000	33.684.848.000	22.507.760.000
	JUMLAH	679.024.056.556	815.919.647.774	879.183.182.460	971.981.431.339	975.526.903.366

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

Tren perkembangan realisasi dana perimbangan Kota Depok tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.7 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2011-2015**

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 668.407.741.718,00 jika dibandingkan pada tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 367.366.308.022,00. Termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Capaian dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



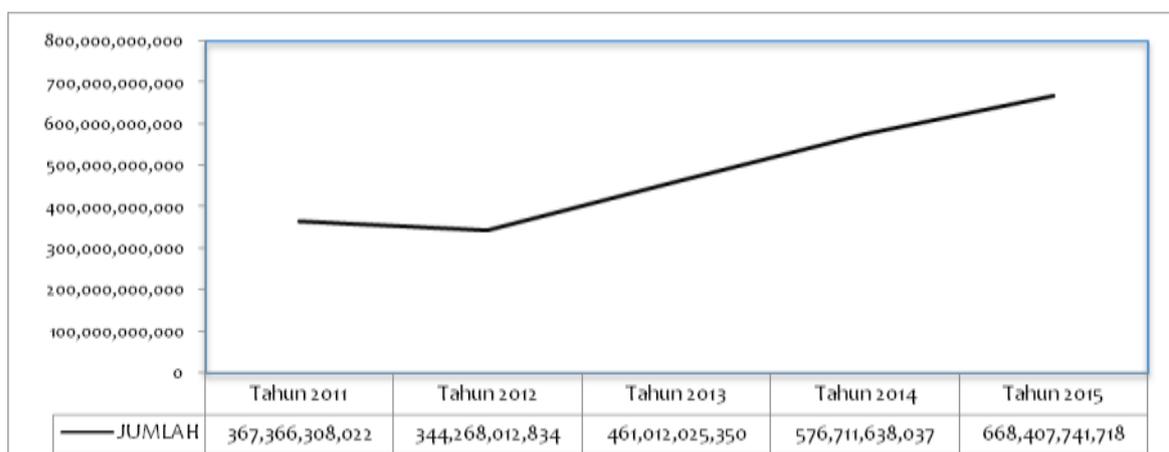
Tabel 3.7. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2011-2015

No	Uraian	Realisasi (Rp.)				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Hibah	6.499.965.000	-	-	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	167.643.540.122	214.952.386.334	295.395.892.920	363.042.161.237	423.763.082.778
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	168.948.452.400	109.629.910.000	143.850.136.000	196.153.428.000	208.183.485.000
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24.274.350.500	19.685.716.500	21.765.996.430	17.516.048.800	36.461.173.940
	JUMLAH	367.366.308.022	344.268.012.834	461.012.025.350	576.711.638.037	668.407.741.718

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

Tren perkembangan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.8 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2011-2015



Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah



3.1.4. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

3.1.4.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Sebagaimana amanah RPJMD Kota Depok 2011 – 2016, belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar perkotaan dan pelayanan umum lainnya, serta dalam rangka pemenuhan layanan pengembangan potensi unggulan daerah (*core competency*).

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2011-2016 diprioritaskan untuk membiayai program prioritas sebagaimana termuat dalam indikator makro kota dan prioritas daerah dari tahun 2011-2016 sebagai amanat dari RPJMD Kota Depok 2006-2011 dan RPJMD Kota Depok 2011-2016.



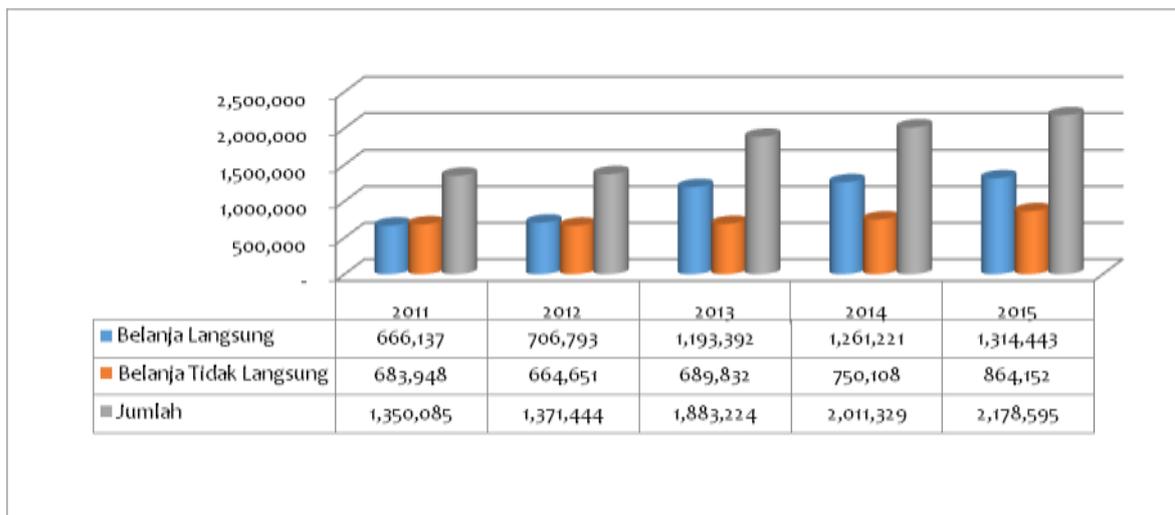
Adapun strategi Belanja Daerah adalah:

- a. Memprioritaskan belanja pada pemenuhan layanan dasar masyarakat dengan titik berat pada bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli yang dapat menunjang pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
- b. Memprioritaskan pada penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan, untuk menanggulangi permasalahan transportasi, persampahan, banjir, kawasan kumuh, layanan air bersih dan kebutuhan perkotaan lainnya;
- c. Memprioritaskan pada pengembangan pelayanan pemerintahan yang dapat mendukung terwujudnya kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan; dan
- d. Menggunakan prinsip-prinsip penggunaan anggaran secara efektif dan efisien berdasarkan tolak ukur kinerja.

3.1.4.2 Proporsi Belanja Daerah

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2011 -2015 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Perkembangan Realisasi Belanja daerah Kota Depok menunjukkan peningkatan yaitu sebesar Rp 1.350.085.338.873,00 pada tahun 2011 menjadi Rp 2.178.595.019.630,00 pada tahun 2015 (Tabel 3.8).

**Grafik. 3.9. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2015**

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

Tabel 3.8. Nilai Belanja Daerah Kota Depok

No	Uraian	Realisasi (Rp.)					
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
BELANJA DAERAH							
2.1	Belanja Tidak Langsung	Renca na	762.802.309.432,54	794.558.983.615,55	770.479.280.559,00	926.676.587.329,90	1.056.257.484.383,42
		Realis asi	683.947.885.939,00	664.651.499.274,00	689.832.315.500,73	750.107.532.194,00	864.151.528.424,00
		%	89,66	83,65	89,53	80,95	81,81
2.1.1	Belanja Pegawai	Renca na	534.187.085.856,99	646.948.218.631,00	701.356.531.255,00	801.061.083.088,00	870.570.112.945,00
		Realis asi	505.959.079.880,00	600.577.942.458,00	641.718.904.196,73	699.454.587.909,00	764.632.991.628,00
		%	94,72	92,83	91,5	87,32	87,83
2.1.2	Belanja Bunga	Renca na	220.000.000,00	-	-	-	-
		Realis asi	218.366.981,00	-	-	-	-
		%	99,26	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	Renca na	-	-	-	-	-
		Realis asi	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	Renca na	48.801.460.500,00	22.330.605.000,00	28.887.272.000,00	34.066.910.000,00	101.130.686.500,00
		Realis asi	47.039.340.500,00	21.224.965.000,00	26.248.762.000,00	32.004.090.000,00	84.950.222.000,00
		%	96,39	95,05	90,87	93,94	84,00



Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Renca na	135.710.634.613,00	47.689.567.757,00	27.659.280.000,00	27.433.000.000,00	50.912.000.000,00
		Realis asi	126.151.812.050,00	41.636.964.876,00	20.057.134.500,00	16.743.250.000,00	13.475.300.204,00
		%	92,96	87,31	72,52	61,03	26,47
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Renca na	-	-	-	-	-
		Realis asi	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Renca na	870.816.804,00	870.816.804,00	870.816.804,00	870.816.804,00	870.816.804,00
		Realis asi	870.816.804,00	870.816.804,00	870.816.804,00	870.815.835,00	704.255.474
		%	100	100	100	100	80,87
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	Renca na	43.012.311.658,55	76.719.775.423,55	11.705.380.500,00	63.244.777.437,90	32.773.868.134,42
		Realis asi	3.708.469.724,00	340.810.136,00	936.698.000,00	1.034.788.450,00	388.759.118,00
		%	8,62	0,44	8,00	1,64	1,19
2.2	Belanja Langsung	Renca na	816.239.727.730,49	1.060.050.232.401,00	1.587.961.000.417,00	1.742.874.003.855,00	2.106.797.142.051,00
		Realis asi	666.137.452.934,00	706.792.685.638,00	1.193.391.746.727,00	1.261.221.107.931,00	1.314.443.491.206,00
		%	81,61	66,68	75,15	72,36	62,39
	Jumlah Belanja	Renca na	1.579.042.037.163,03	1.854.609.216.016,55	2.358.440.280.976,00	2.669.550.591.184,90	3.163.054.626.434,42
		Realis asi	1.350.085.338.873,00	1.371.444.184.912,00	1.883.224.062.227,73	2.011.328.640.125,00	2.178.595.019.630,00
		%	85,5	73,95	79,85	75,34	68,88
	Surplus/(Defisit)	Renca na	281.211.695.517,82	302.710.195.925,58	490.117.591.150,35	440.341.092.838,29	767.178.559.581,52
		Realis asi	20.947.429.408,24	263.448.837.236,18	38.178.716.517,53	196.537.951.743,23	256.139.461.675,50
		%	7,45	-87,03	-7,79	-44,63	33,39

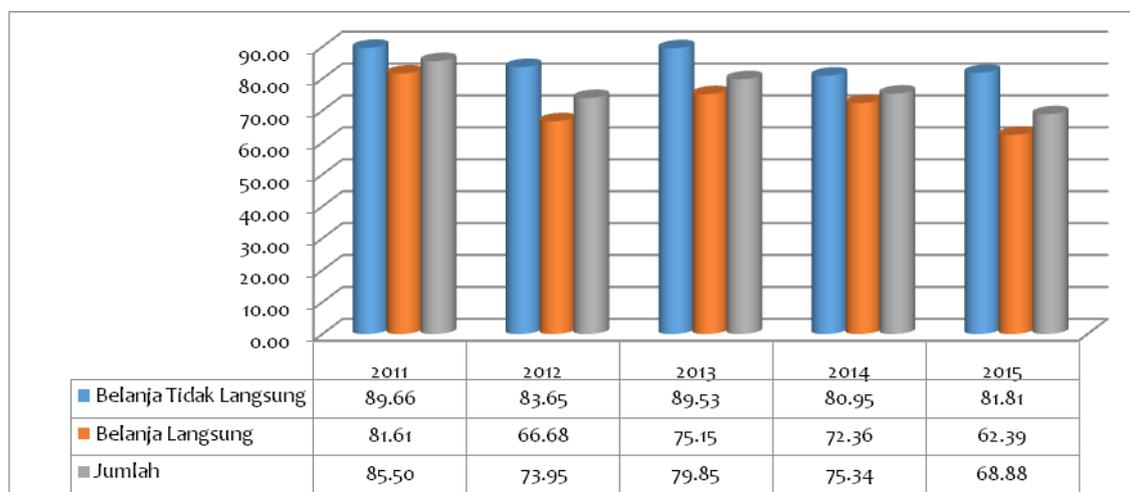
3.1.4.2.1 Belanja Tidak Langsung

Dari Tabel 3.8. diatas digambarkan bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 mencapai 81,81 persen. Persentase ini menurun dibandingkan tahun 2011 yang terealisasi 89,66 persen. Realisasi *Belanja Hibah* diberikan kepada pemerintah pusat, badan/lembaga/organisasi serta kelompok/anggota masyarakat. Sedangkan *Belanja Bantuan Sosial* disalurkan kepada berbagai kelompok dan anggota masyarakat yang memenuhi kriteria pemberian bantuan sosial.

3.1.4.2.2 Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2015 mencapai 62,39persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 72,36persen. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh adanya pelampauan target pendapatan, efisiensi belanja, anggaran tidak terserap karena keterbatasan waktu dan gagal lelang, terlambatnya penyaluran dana Bantuan keuangan dari Propinsi serta penyerapan anggaran pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan target. Realiasi Belanja Daerah dapat dilihat pada Grafik 3.10.

Grafik. 3.10. Persentase Realisasi Belanja Daerah



Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

3.2 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

3.2.1 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran, yang dirinci menurut sumber pembiayaan yaitu *penerimaan pembiayaan* dan *pengeluaran pembiayaan*. Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas Pembentukan Dana



Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan pembiayaan 2011-2015 diarahkan untuk menyeimbangkan selisih antara kemampuan pendapatan dengan belanja terutama guna menutupi defisit akibat belanja yang lebih besar dibanding pendapatan. Oleh sebab itu pembiayaan difokuskan kepada pendayagunaan secara optimal terhadap Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran, Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah.

3.2.2 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, realisasi Pembiayaan Kota Depok mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2015 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 782.504.806.500,52 atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 282.045.052.236,82. Secara rinci realisasi pembiayaan Kota Depok tahun anggaran 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9. Realisasi Pembiayaan Kota Depok Tahun Anggaran 2011-2015

No	Uraian	Realisasi (Rp.)					
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rencana	282,545,035,377.82	311,245,973,725.58	564,712,376,320.76	582,691,092,838.29	781,878,559,581.52
		Realisasi	282,045,052,236.82	309,110,081,884.58	564,712,376,320.76	582,690,607,838.29	782,504,806,500.52
		%	99.82	99.31	100.00	100.00	100.08
1,1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rencana	244,764,375,665.82	259,807,078,073.58	564,712,376,320.76	582,691,092,838.29	756,878,559,581.52
		Realisasi	244,764,288,165.82	258,482,862,299.58	564,712,376,320.76	582,690,607,838.29	756,878,559,581.52
		%	100.00	99.49	100.00	100.00	100.00
1,2	Pencairan dana cadangan	Rencana	-	-	-	-	25,000,000,000.00
		Realisasi	-	-	-	-	25,626,246,919.00
		%	-	-	-	-	102.50
1,3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rencana	-	-	-	-	-
		Realisasi	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-



No	Uraian		Realisasi (Rp.)				
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1,4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Rencana	-	-	-	-	-
		Realisasi	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-
1,5	Penerimaan ke mbalipemberian pinjaman	Rencana	-	-	-	-	-
		Realisasi	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-
1,6	Penerimaan piutang daerah	Rencana	37,780,659,712.00	51,438,895,652.00	-	-	-
		Realisasi	37,280,764,071.00	50,627,219,585.00	-	-	-
		%	98.68	98.42	-	-	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rencana	1,306,314,860.00	8,535,777,800.00	20,200,000,000.00	22,350,000,000.00	14,700,000,000.00
		Realisasi	1,290,544,755.00	7,846,542,800.00	20,200,000,000.00	22,350,000,000.00	14,700,000,000.00
		%	98.79	91.93	100.00	100.00	100.00
2,1	Pembentukan Dana Cadangan	Rencana	-	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
		Realisasi	-	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	-
		%	-	100.00	100.00	100.00	-
2,2	Penyertaan modal (investasi) daerah	Rencana	-	600,000,000.00	10,200,000,000.00	12,350,000,000.00	14,700,000,000.00
		Realisasi	-	600,000,000.00	10,200,000,000.00	12,350,000,000.00	14,700,000,000.00
		%	-	100.00	100.00	100.00	100.00
2,3	Pembayaran pokok utang	Rencana	1,306,314,860.00	2,935,777,800.00	-	-	-
		Realisasi	1,290,544,755.00	2,246,542,800.00	-	-	-
		%	98.79	76.52	-	-	-
2,4	Pemberian pinjaman daerah	Rencana	-	-	-	-	-
		Realisasi	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto	Rencana	281,238,720,517.82	302,710,195,925.58	544,512,376,320.76	560,341,092,838.29	767,178,559,581.52
		Realisasi	280,754,507,481.82	301,263,539,084.58	544,512,376,320.76	560,340,607,838.29	767,804,806,500.52
		%	99.83	99.52	100.00	99.99	100.08

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah



3.2.3 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset Daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada tahun 2010, Kota Depok memiliki aset senilai Rp. 3,577 trilyun naik menjadi 8,198 trilyun pada tahun 2014 (Tabel 3.10) dengan tingkat pertumbuhan 23,34% per tahun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2010 senilai Rp. 3,145 trilyun meningkat menjadi Rp 3,36,9873 trilyun pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,20% per tahun.

Adapun jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok hanya berupa kewajiban jangka pendek, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,508 milyar. Dari tahun 2010 hingga 2014, jumlah kewajiban Pemerintah Kota Depok relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2012 dan tertinggi tahun 2014.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan.



Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Depok tahun 2010 senilai Rp. 3,57 trilyun meningkat hingga senilai Rp 8,187 trilyun pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,32% per tahun. Neraca daerah Kota Depok ditunjukkan pada tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10. Neraca Daerah Kota Depok Tahun 2010-2014

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
AKTIVA	3.577.099.104.998,24	4.392.998.850.021,96	6.051.920.739.453,74	6.970.086.707.897,48	8.198.084.298.261,30
AKTIVA LANCAR	297.037.421.020,39	334.744.186.257,96	646.982.178.297,74	712.651.920.721,26	983.516.921.686,58
Kas	244.851.370.648,60	260.596.035.795,96	564.887.234.622,76	582.756.530.585,29	756.982.308.366,52
Piutang Pajak	229.796.332,00	585.753.067,00	52.415.747.343,50	59.931.434.200,00	276.388.458.362,00
Piutang Retribusi	0	0	8.522.682,00	89.391.500,00	102.921.180,00
Piutang Dana Bagi Hasil	36.503.696.512,00	50.403.239.269,00	-	35.567.772.871,00	-
Piutang Lain-lain	945.431.867,00	449.903.316,00	6.002.228.731,48	9.174.002.659,97	5.742.398.686,00
Penyisihan Piutang				-	88.855.513.143,00
Persediaan	14.507.125.660,79	22.709.254.810,00	23.668.444.918,00	25.132.788.905,00	33.156.348.235,06
INVESTASI JANGKA PANJANG	130.145.264.974,00	22.636.742.015,00	23.236.742.015,00	55.427.271.758,00	63.289.916.820,00
Investasi Permanen	130.145.264.974,00	22.636.742.015,00	23.236.742.015,00	55.427.271.758,00	63.289.916.820,00
AKTIVA TETAP	3.145.633.580.821,85	4.026.926.258.317,00	5.096.190.613.815,59	5.874.368.995.975,31	6.987.901.729.144,31
Tanah	1.534.638.364.040,00	1.585.986.905.229,00	2.275.388.725.576,59	2.446.050.708.898,59	2.736.698.688.630,59
Peralatan dan Mesin	298.462.759.846,00	1.458.450.071.391,00	1.632.320.761.330,00	473.613.890.737,00	583.283.336.132,00
Bangunan dan Gedung	513.368.297.329,00	582.997.382.547,00	634.961.165.219,00	983.643.517.117,80	1.158.766.053.744,67
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	775.926.635.864,07	365.410.432.938,00	403.770.658.843,00	1.861.318.429.487,72	2.411.237.287.802,05
Aset Tetap Lainnya	10.441.502.654,78	13.984.824.653,00	27.191.181.983,00	46.914.393.395,00	74.967.240.843,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	12.796.021.088,00	20.096.641.559,00	122.558.120.864,00	62.828.056.339,20	22.949.121.992,00
DANA CADANGAN	-	-	5.001.111.111,00	15.146.115.041,00	25.429.541.882,00
Dana Cadangan	-	-	5.001.111.111,00	15.146.115.041,00	25.429.541.882,00



URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014
ASET LAINNYA	4.282.838.182,00	8.691.663.432,00	280.510.094.214,41	312.492.404.401,91	137.946.188.728,41
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	13.150.000,00	-	-	-	-
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		3.738.190.000,00	115.445.190.000,00	115.445.190.000,00	112.406.440.000,00
Aset Tak Berwujud.	2.596.818.182,00	876.825.250,00	1.439.674.250,00	4.605.512.468,00	5.600.515.868,00
Aset Lain-lain.	1.672.870.000,00	4.076.648.182,00	163.625.229.964,41	192.441.701.933,91	19.939.232.860,41
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.577.099.104.998,24	4.392.998.850.021,96	6.051.920.739.453,74	6.970.086.707.897,48	8.198.084.298.261,30
KEWAJIBAN	1.509.731.666,19	4.379.777.800,00	725.291.232,00	9.481.211.719,73	10.284.423.505,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.509.731.666,19	4.379.777.800,00	725.291.232,00	9.481.211.719,73	10.284.423.505,00
Hutang PFK	819.929,00	-	-	19.261.764,00	9.741.330,00
Pendapatan Diterima Dimuka					
Hutang Jangka Pendek Lainnya	1.508.911.737,19	4.379.777.800,00	725.291.232,00	9.461.949.955,73	10.274.682.175,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Hutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA	3.575.589.373.332,05	4.388.619.072.221,96	6.051.195.448.221,74	6.960.605.496.177,75	8.187.799.874.756,30
EKUITAS DANA LANCAR	295.527.689.354,20	330.364.408.457,96	646.256.887.065,74	703.170.709.001,53	973.232.498.181,58
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	244.764.375.665,82	259.618.584.633,58	564.712.376.320,76	582.691.092.838,29	756.878.559.581,52
Pendapatan yang Ditangguhkan	86.175.053,78	977.451.162,38	174.858.302,00	46.175.983,00	94.007.455,00
Cadangan Piutang	37.678.924.711,00	51.438.895.652,00	58.426.498.756,98	104.762.601.230,97	193.378.265.085,00
Cadangan Persediaan	14.507.125.660,79	22.709.254.810,00	23.668.444.918,00	25.132.788.905,00	33.156.348.235,06
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Jangka Pendek	-1.508.911.737,19	-4.379.777.800,00	-725.291.232,00	9.461.949.955,73	10.274.682.175,00
EKUITAS DANA INVESTASI	3.280.061.683.977,85	4.058.254.663.764,00	5.399.937.450.045,00	6.242.288.672.135,22	7.189.137.834.692,72
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	130.145.264.974,00	22.636.742.015,00	23.236.742.015,00	55.427.271.758,00	63.289.916.820,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.145.633.580.821,85	4.026.926.258.317,00	5.096.190.613.815,59	5.874.368.995.975,31	6.987.901.729.144,31
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk dana cadangan)	4.282.838.182,00	8.691.663.432,00	280.510.094.214,41	312.492.404.401,91	137.946.188.728,41



Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	5.001.111.111,00	15.146.115.041,00	25.429.541.882,00
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	5.001.111.111,00	15.146.115.041,00	25.429.541.882,00

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah yang dapat dilakukan melalui perhitungan rasio (Tabel 3.11). Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (*Leverage*). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. *Current Ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya yang didapatkan dari aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Dari tabel 3.11 dapat diketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah Kota Depok berada diatas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kota Depok dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. *Quick Ratio*, yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid,dimana Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan yang dapat dihitung dari jumlah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.



Dengan melihat tabel 3.11, Rasio Cair Pemerintah Daerah Kota Depok capaiannya lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.11. Hasil Perhitungan Neraca Daerah Kota Depok

NO	Uraian	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1.	Rasio lancar (current ratio)	19.674,85	7.642,95	89.203,09	7.516,46	9.563,17
2.	Rasio quick (quick ratio)	18.713,94	7.124,45	85.939,79	7.251,38	9.240,78
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,05	0,11	0,01	0,16	0,15
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,04	0,10	0,01	0,14	0,13
5.	Rata-rata umur piutang		0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman.

Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kota Depok tergolong kecil, yaitu hanya 0,05 persen pada tahun 2010 dan 0,15 persen pada tahun 2014. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang pemerintah daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Dari tabel 3.11 diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kota Depok tergolong baik dengan nilai rasio 0,04persen pada tahun 2010 dan 0,13 persen pada tahun 2014.

Hasil analisis terhadap *Current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Depok adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Depok relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

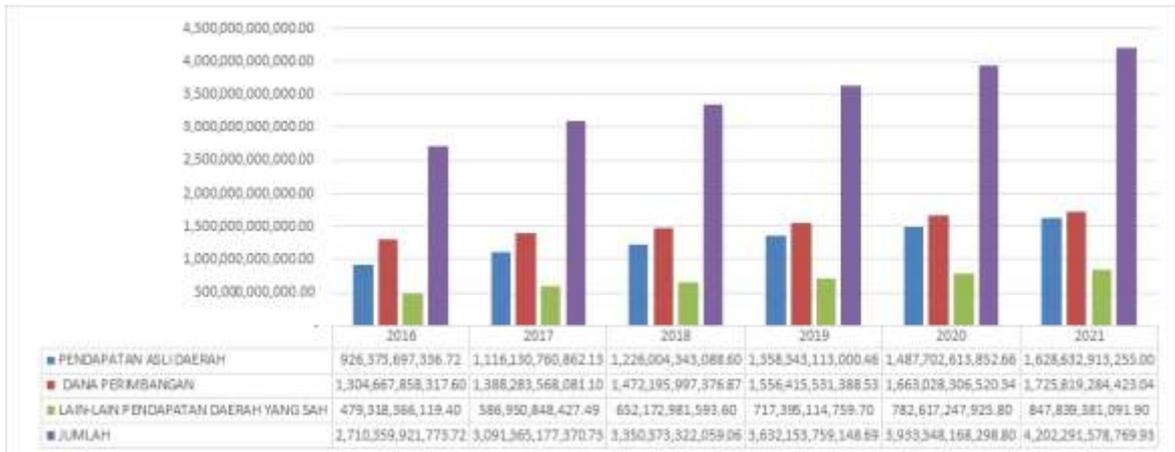
3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Dengan melihat performa Pendapatan Daerah Kota Depok tahun 2011-2015, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi lagi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama periode tahun 2011 – 2015, yang kemudian disesuaikan dengan perkiraan inflasi dan kondisi perekonomian nasional.



Proyeksi pendapatan Daerah Kota Depok disajikan dalam grafik 3.11 berikut:

Grafik 3.11. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Depok 2016-2021

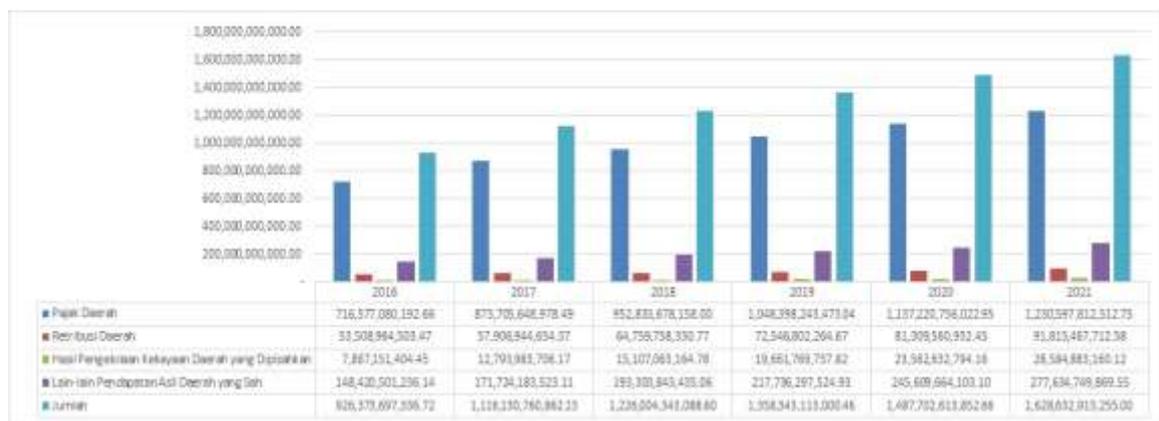


Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 2.710 trilyun, dan meningkat menjadi Rp. 4,202 trilyun pada tahun 2021. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dari proyeksi tersebut, ketergantungan Kota Depok masih cukup tinggi namun berkurang secara bertahap pada tahun 2021 seiring dengan menurunnya pertumbuhan dana perimbangan. Sementara Pendapatan Asli daerah diproyeksikan dapat tumbuh rata-rata tahunan sebesar 15,50 persen, meningkat dari proyeksi awal Rp. 926,37 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.628,63 Milyar pada tahun 2021. Dari Grafik 3.12. terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Depok masih mengandalkan sektor Pajak Daerah sebagai faktor penopang utama yang berasal dari Pajak PBB dan BPHTB.

Untuk meningkatkan PAD seperti yang diproyeksikan diatas, masih banyak yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Depok, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya lain dapat ditempuh melalui penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, integrasi sistem perijinan dengan sistem pendapatan asli daerah, kemudahan dan perluasan sarana pembayaran pajak, retribusi, serta pengelolaan sumber daya Daerah lain yang produktif.

Grafik 3.12. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok 2016-2021 (Rupiah)



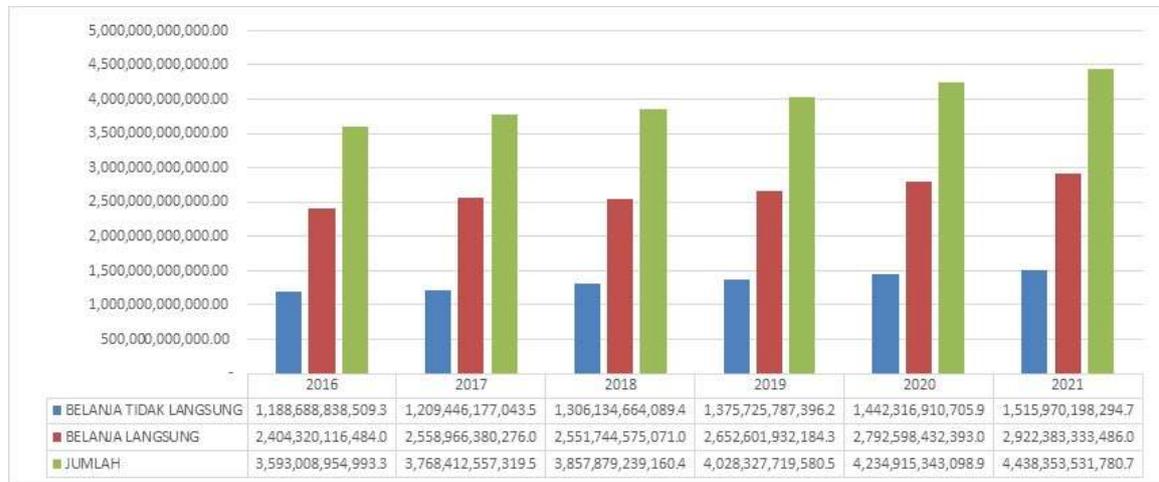
Sumber: DPPKA Kota Depok, data diolah

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung beberapa tahun sebelumnya, serta rencana-rencana strategis Pemerintah Kota Depok lima tahun kedepan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah diatas, serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi SiLPA yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki jumlah yang sangat signifikan. Pada tahun 2015, komposisi belanja daerah Kota Depok terdiri dari pos belanja langsung (66,61%) dan pos belanja tidak langsung (33,39%).

Untuk lima tahun ke depan, belanja daerah Pemerintah Kota Depok diproyeksikan, sebagai berikut :

Grafik. 3.13. Proyeksi Belanja Daerah Kota Depok 2016– 2021 (rupiah)



Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok

Proyeksi belanja daerah Kota Depok 5 tahun kedepan akan lebih banyak dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung yang merupakan belanja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Kota Depok, proyeksi komposisi belanja langsung pada tahun 2021 adalah sebesar 65,84% dari total Belanja Daerah, sedangkan belanja Tidak langsung adalah sebesar 34,16 % dari total Belanja Daerah.

Rata-rata pertumbuhan tahunan belanja daerah adalah sebesar 5,77%, yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan tahunan belanja langsung 5,69%, serta pertumbuhan tahunan belanja tidak langsung sebesar 6,26%.

Belanja Tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai yang pada tahun 2021 diproyeksikan mencapai 84,70% dari total belanja tidak langsung atau 28,93% dari total Belanja daerah. Belanja pegawai ini merupakan belanja untuk pembayaran gaji/uang representasi dan tunjangan seluruh pegawai, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerahserta Pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok.

Grafik 3.14. Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung Kota Depok 2016 – 2021



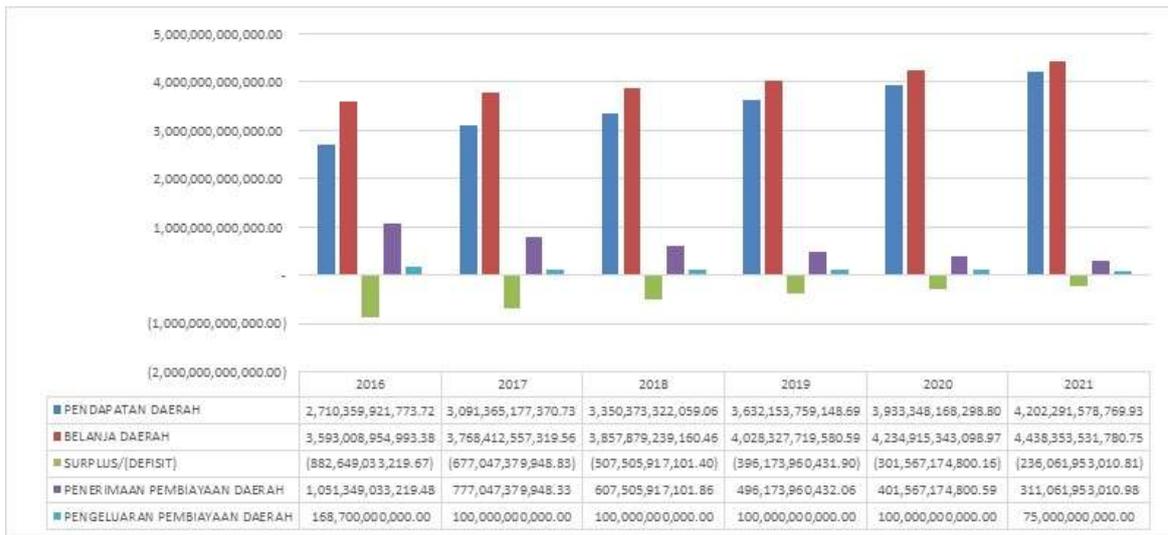
Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kota Depok, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja yang direncanakan atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus didanai dengan pembiayaan daerah yang cukup besar terutama yang bersumber dari SiLPA.



Grafik 3.15. Proyeksi Surplus/Defisit APBD Kota Depok 2016 – 2021 (dalam rupiah)



Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok

Kebijakan Pemerintah Kota Depok lima tahun ke depan dalam pendanaan belanja daerah adalah berupaya untuk semakin meningkatkan proporsi pendapatan daerah dalam pendanaan belanja daerah. Hal ini tercermin dari upaya penurunan defisit anggaran yang terus menurun. Desain rata-rata pertumbuhan tahunan belanja daerah mencapai 5,87%, lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan tahunan pendapatan daerah yang mencapai 9,85%. Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, percepatan pengadaan barang/jasa serta manajemen pengelolaan kegiatan yang lebih baik.

**Grafik 3.16 Proporsi Pendanaan Belanja Daerah Tahun 2016-2021**

Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok

Komposisi pendanaan belanja daerah dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa belanja daerah berasal pendapatan daerah, yaitu rata-rata sebesar 84,74 %, sedangkan sisanya sebesar 15,26% didanai dari penerimaan pembiayaan daerah terutama dari SiLPA. Dalam lima tahun kedepan secara bertahap peran pendapatan akan lebih dimaksimalkan sedangkan peran penerimaan pembiayaan diturunkan sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Pada tahun 2021 diharapkan 93,11%belanja daerah akan didanai dari pendapatan daerah sedang sisanya dari pembiayaan daerah hanya sebesar 6,89%.

Secara lebih rinci proyeksi pembiayaan daerah Kota Depok tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.12

Tabel 3.12. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2021

Korek	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	PEMBIAYAAN						
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,051,349,033,219.48	777,047,379,948.33	607,505,917,101.86	496,173,960,432.06	401,567,174,800.59	311,061,953,010.98
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	1,051,349,033,219.48	777,047,379,948.33	607,505,917,101.86	496,173,960,432.06	401,567,174,800.59	311,061,953,010.98
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah						
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman						



	Daerah						
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah						
	JUMLAH	1,051,349,033,219.48	777,047,379,948.33	607,505,917,101.86	496,173,960,432.06	401,567,174,800.59	311,061,953,010.98
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	168,700,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	75,000,000,000.00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	168,700,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	75,000,000,000.00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang						
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah						
	JUMLAH	168,700,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	75,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	882,649,033,219.48	677,047,379,948.33	507,505,917,101.86	396,173,960,432.06	301,567,174,800.59	236,061,953,010.98

Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok



Tabel. 3.13. Proyeksi APBD tahun 2016-2021

Korek	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH	2,710,359,921,773.72	3,091,365,177,370.73	3,350,373,322,059.06	3,632,153,759,148.69	3,933,348,168,298.80	4,202,291,578,769.93
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	926,373,697,336.72	1,116,130,760,862.13	1,226,004,343,088.60	1,358,343,113,000.46	1,487,702,613,852.66	1,628,632,913,255.00
1.1.1.	Pajak Daerah	716,577,080,192.66	873,705,648,978.49	952,833,678,158.00	1,048,398,243,473.04	1,137,220,756,022.95	1,230,597,812,512.75
1.1.2.	Retribusi Daerah	53,508,964,503.47	57,906,944,654.37	64,759,758,330.77	72,546,802,264.67	81,309,560,932.45	91,815,467,712.58
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,867,151,404.45	12,793,983,706.17	15,107,063,164.78	19,661,769,737.82	23,562,632,794.16	28,584,883,160.12
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148,420,501,236.14	171,724,183,523.11	193,303,843,435.06	217,736,297,524.93	245,609,664,103.10	277,634,749,869.55
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1,304,667,858,317.60	1,388,283,568,081.10	1,472,195,997,376.87	1,556,415,531,388.53	1,663,028,306,520.34	1,725,819,284,423.04
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	65,569,120,677.60	55,116,565,419.20	44,664,010,160.80	34,211,454,902.40	45,834,287,383.20	13,306,344,385.60
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	996,878,711,300.00	1,082,469,275,400.00	1,168,059,839,500.00	1,253,650,403,600.00	1,339,240,967,700.00	1,424,831,531,800.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	242,220,026,340.00	250,697,727,261.90	259,472,147,716.07	268,553,672,886.13	277,953,051,437.14	287,681,408,237.44
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	479,318,366,119.40	586,950,848,427.49	652,172,981,593.60	717,395,114,759.70	782,617,247,925.80	847,839,381,091.90
1.3.1.	Hibah						
1.3.2.	Dana Darurat						
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	461,024,376,119.40	519,542,207,832.49	578,060,039,545.60	636,577,871,258.70	695,095,702,971.80	753,613,534,684.90
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	13,293,990,000.00	62,408,640,595.00	69,112,942,048.00	75,817,243,501.00	82,521,544,954.00	89,225,846,407.00
	JUMLAH	2,710,359,921,773.72	3,091,365,177,370.73	3,350,373,322,059.06	3,632,153,759,148.69	3,933,348,168,298.80	4,202,291,578,769.93
2.	BELANJA DAERAH	3,593,008,954,993.38	3,768,412,557,319.56	3,857,879,239,160.46	4,028,327,719,580.59	4,234,915,343,098.97	4,438,353,531,780.75
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,188,688,838,509.38	1,209,446,177,043.56	1,306,134,664,089.46	1,375,725,787,396.24	1,442,316,910,705.97	1,515,970,198,294.75
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,029,150,125,584.67	1,034,520,012,688.31	1,117,247,059,485.62	1,172,876,742,543.79	1,225,506,425,604.92	1,284,075,808,446.10
2.1.2.	Belanja Bunga						
2.1.3.	Belanja Subsidi						
2.1.4.	Belanja Hibah	60,007,695,000.00	78,965,210,333.33	87,468,383,333.33	95,971,556,333.34	104,474,729,333.34	112,977,902,333.34
2.1.5.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa						
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	63,354,544,000.00	59,784,480,097.20	65,242,747,345.80	70,701,014,594.40	76,159,281,843.00	81,617,549,091.60
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	870,816,804.00	870,816,804.00	870,816,804.00	870,816,804.00	870,816,804.00	870,816,804.00



Pemerintah Kota Depok

Korek	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintahan Desa dan Partai Politik						
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	35,305,657,120.71	35,305,657,120.71	35,305,657,120.71	35,305,657,120.71	35,305,657,120.71	36,428,121,619.71
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2,404,320,116,484.00	2,558,966,380,276.00	2,551,744,575,071.00	2,652,601,932,184.35	2,792,598,432,393.00	2,922,383,333,486.00
	JUMLAH	3,593,008,954,993.38	3,768,412,557,319.56	3,857,879,239,160.46	4,028,327,719,580.59	4,234,915,343,098.97	4,438,353,531,780.75
	SURPLUS/(DEFISIT)	(882,649,033,219.67)	(677,047,379,948.83)	(507,505,917,101.40)	(396,173,960,431.90)	(301,567,174,800.16)	(236,061,953,010.81)
3.	PEMBIAYAAN						
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,051,349,033,219.48	777,047,379,948.33	607,505,917,101.86	496,173,960,432.06	401,567,174,800.59	311,061,953,010.98
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	1,051,349,033,219.48	777,047,379,948.33	607,505,917,101.86	496,173,960,432.06	401,567,174,800.59	311,061,953,010.98
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah						
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah						
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah						
	JUMLAH	1,051,349,033,219.48	777,047,379,948.33	607,505,917,101.86	496,173,960,432.06	401,567,174,800.59	311,061,953,010.98
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	168,700,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	75,000,000,000.00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	168,700,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	75,000,000,000.00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang						
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah						
	JUMLAH	168,700,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00	75,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	882,649,033,219.48	677,047,379,948.33	507,505,917,101.86	396,173,960,432.06	301,567,174,800.59	236,061,953,010.98
	Rencana APBD	3,761,708,954,993.38	3,868,412,557,319.56	3,957,879,239,160.46	4,128,327,719,580.59	4,334,915,343,098.97	4,513,353,531,780.75

Sumber: Diolah dari Data DPPK Kota Depok



BAB IV

ISU STRATEGIS KOTA DEPOK

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batasbatas administrasi negara, dan situasi nasional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan fakta-fakta.



Karena itu, penyusunan rencana jangka menengah daerah yang dikonseptualisasi akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan di segala bidang diharapkan lebih dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan yang menggambarkan penciptaan realitas dasar diantara arus eksternalisasi isu global mampu mempengaruhi isu nasional dan regional.

Penentuan isu strategis didahului dengan review terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kota Depok. Hasil review akan melengkapi draft isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kota Depok.

4. 1. Isu Nasional dan internasional

4.1.1 RPJPN dan RPJMN

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai negara berpendapatan tinggi dan maju dan terlepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah. Banyak negara berkembang yang terperangkap dalam posisi negara berpendapatan menengah (*Middle Income Trap/MIT*) dan tidak berhasil bertransformasi menjadi negara maju. Untuk itu sesuai arahan RPJPN, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada 2030. Berdasarkan arahan tersebut diatas, pembangunan Indonesia dalam periode 2015-2019, diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.



Dalam kaitan ini, struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan SDM berkualitas, dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Reformasi komprehensif di segala bidang pembangunan sangat diperlukan untuk menjamin proses transformasi positif yang dapat mendorong perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara berkelanjutan. Sasaran utama lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan secara signifikan, pemerataan pembangunan di seluruh Wilayah tanah air, terjaganya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan, dan ketertiban hukum.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju : dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.

Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun Wilayah.

Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.



Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 8 (delapan) misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap Wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa Dalam Negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan Otonomi Daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur Hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.



4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.



7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola Wilayah laut Nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pematapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Upaya pelaksanaan RPJPN tahap tiga dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, mengacu pada agenda 9 prioritas nasional RPJMN 2015-2019 yang dikenal dengan NAWA CITA:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Adapun Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai dalam pembangunan Nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

Setiap program prioritas, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kota Depok, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2019.



4.1.2. RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, dengan titik berat pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (*pro poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro job*), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (*pro environment*). Dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 terdapat beberapa isu strategis yang akan diselesaikan yaitu : Pertumbuhan penduduk dan persebarannya, Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, Pengangguran dan ketenagakerjaan, Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya *Jabar Green Province*, Kualitas demokrasi, Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana, Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal, Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat, Penanggulangan penduduk miskin, Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA), Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS), Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU), Ketahanan Pangan dan Keamanan dan ketertiban daerah. Dari isu tersebut, arah kebijakan umum RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah

1. **Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing** dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Jawa Barat;
2. **Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan** dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;



3. **Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik** dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. **Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan** dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
5. **Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal** dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.

4.1.3 Evaluasi RPJPD Kota Depok tahun 2006-2025 (tahap I dan II)

Menurut Permendagri No. 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), Kota Depok yang merupakan kota otonom kawasan perkotaan besar, perlu menyediakan pelayanan minimal sesuai dengan fungsi kawasan perkotaan, yaitu sebagai :

- 1) Tempat permukiman perkotaan. Pelayanan yang perlu disediakan adalah perumahan (rumah layak huni dan terjangkau, rumah susun), air minum (jaringan perpipaan air minum), drainase (jaringan system drainase), prasarana jalan lingkungan (jalan lingkungan, jalan setapak, penerangan jalan umum), persampahan (tempat pengolahan akhir, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pembuangan sementara), air limbah (sistem pembuangan air limbah domestik secara terpusat, sistem pembuangan air limbah rumah tangga/setempat), energi (jaringan listrik dan gas), komunikasi dan informasi (jaringan telepon, telepon umum, stasiun relay, kantor pos, stasiun radio, website daerah), ruang terbuka hijau dengan luas minimal 30% luasan kawasan.



- 2) Pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan. Pelayanan yang harus disediakan adalah perkantoran pemerintah, pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan, Balai Pelatihan Ketenagakerjaan, Pusat Informasi Ketenagakerjaan, Perizinan Ketenagakerjaan, Pelayanan perizinan, sarana monitoring polusi udara, laboratorium penelitian lingkungan, pos pemadam kebakaran, hidran umum, pusat evakuasi bencana, menjaga ketentraman dan ketertiban.
- 3) Pelayanan sosial. Pelayanan yang harus tersedia adalah Pendidikan (Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini, SD/MI/Paket A atau yang sederajat, SD berstandar internasional, SMP/MTs/Paket B atau yang sederajat, SMA/MA/Paket C atau yang sederajat, SMK atau yang sederajat, perpustakaan, museum dan pusat kebudayaan), kesehatan (posyandu, klinik bersalin, puskesmas pembantu, puskesmas/balai pengobatan, tempat praktek dokter, apotik/rumah obat, rumah sakit, rumah sakit bersalin), pelayanan sosial (panti asuhan, panti jompo, pusat rehabilitasi narkoba, pusat rehabilitasi masalah sosial, rumah singgah), rekreasi dan olahraga (balai pertemuan, gedung kesenian, tempat rekreasi, gelanggang olahraga, stadion), sarana peribadatan, taman pemakaman umum, dan taman makam pahlawan.
- 4) Pusat Kegiatan Ekonomi. Kota harus menyediakan pasar, pusat perdagangan, Rumah Potong Hewan dan Unggas, pergudangan, ruang untuk sektor informal dan UKM, jasa keuangan, pusat informasi daerah, penginapan, pelayanan transportasi meliputi jaringan jalan dan perambuan, terminal penumpang, terminal barang, fasilitas perlengkapan jalan (halte, trotoar), fasilitas pendukung keselamatan (pengujian, dll), jaringan pelayanan angkutan, pelayanan angkutan, dan manajemen rekayasa.



Berpedoman pada Standar Pelayanan Perkotaan tersebut, Kota Depok memiliki tugas menyediakan 4 fungsi pelayanan dasar perkotaan, fokus perhatian pembangunan daerah adalah pada infrastruktur dasar, ekonomi, sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kota Depok juga harus dibangun dengan azas berkelanjutan yaitu melalui keseimbangan dalam keterkaitan antara ekonomi, sosial dan lingkungan (ekologi) guna membangun masyarakat yang makmur dan berkualitas.

Capaian kinerja terhadap 4 fungsi pelayanan dasar tersebut sejak tahun 2006, yang merupakan tahun mulai berlakunya RPJPD Kota Depok 2006-2025, menghasilkan berbagai kemajuan baik dalam bidang prasarana dan sarana kota maupun dalam pencapaian Visi Kota sebagaimana ditunjukkan dalam perkembangan kesejahteraan masyarakat, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi dan indikator-indikator kesejahteraan lainnya. Namun di balik keberhasilan tersebut, seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan wilayah perkotaan, terutama akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan komunikasi dan informatika yang pesat serta Globalisasi, maka tantangan serta permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan tidak ringan. Pelayanan perkotaan di segala bidang berkejaran dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang kian meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga menuntut Tatakelola Kota yang makin adaptif, efisien dan efektif, termasuk dalam meningkatkan kapasitas Keuangan Daerah guna memenuhi kebutuhan anggaran yang makin besar.

Pengendalian dan evaluasi capaian kinerja RPJPD sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok yakni, “ *Depok Kota Niaga Dan Jasa, Yang Religius dan Berwawasan Lingkungan* “, masih cukup relevan.



Namun demikian, pengendalian dan evaluasi kinerja makro Kota Depok yang dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD sampai dengan tahun 2014, menemukan berbagai perkembangan kota yang tidak sesuai lagi dengan prediksi pada RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025, antara lain sebagai berikut:

- a. Dari aspek Geomorphologi dan lingkungan hidup, tercatat bahwa tekanan terhadap Sumber daya lahan meningkat, Kualitas udara mulai menurun, RTH mulai menurun, Pengolahan limbah industri 'belum' tersedia, Sampah meningkat dan yang tertangani belum optimal. Yang mendasar adalah bahwa RTH di tahun 2025 diproyeksikan akan lebih rendah dari 30%, sehingga perlu disiapkan langkah antisipasi dalam mengawal pertumbuhan pembangunan yang dilakukan.
- b. Dari aspek Demografi, Migrasi penduduk semakin tinggi dengan segala dampaknya, Laju penduduk masih tinggi, dan meningkat. Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2005 – 2015 sebesar 4.04%. Jumlah penduduk 2015 sebanyak 2.106.102 jiwa dengan seks ratio penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 101,69. Angkatan kerja meningkat, meski tidak sebanding dengan penyerapannya, angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 877.684 dan yang berpendidikan D3 ke atas sebesar 15,22% . Dengan prioritas di bidang pendidikan, diproyeksikan kualitas SDM Kota Depok akan semakin baik.
- c. Dari aspek ekonomi dan sumber daya alam, tercatat bahwa PDRB Tahun 2014 mencapai Rp 26.73 Triliun, PAD tahun 2014 sdh mencapai Rp 659,17Miliar, APBD Tahun 2014 sdh mencapai Rp Rp 2.6 Triliun, Kontribusi sektor primer paling kecil, tekanan pada sektor pertanian, kecuali beberapa komoditi (belimbing, Ikan hias). Kontribusi PDRB ADHK sektor primer tahun 2014 hanya 2,28% dari total PDRB, dan sepertinya akan semakin kecil dimasa mendatang. Kontribusi sektor sekunder, masih tinggi dan ada peningkatan (terutama industri pengolahan). Kontribusi PDRB sektor sekunder saat ini sekitar 50,14% dari total PDRB, dan kemungkinan meningkat terbuka. Kontribusi sektor tersier masih dominan, meskipun ada penurunan (angkutan dan komunikasi).



Sektor tersier ini memberi kontribusi sekitar 47,58%. Dari tahun 2009-2014, perhotelan tidak mengalami perkembangan, digantikan oleh tumbuh kembangnya apartemen. Sektor Perbankan dan Jasa juga terjadi peningkatan. Di tahun 2025 sektor tersier masih akan menjadi sektor unggulan dengan kontribusi di atas 50%, khususnya sub sektor perdagangan dan pendidikan yang akan menjadi kompetensi inti Kota Depok.

- d. Dari aspek Sosial Budaya dan Politik, Tingkat kemiskinan Kota Depok di Tahun 2010 sebesar 2,75 %, Tahun 2012 sebesar 2,46%, pada Tahun 2013 sebesar 2,32% dan pada tahun 2014 sebesar 2,18% berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (10,96 %) maupun Provinsi Jawa Barat (9,18 %). Artinya penduduk diatas garis kemiskinan pada Tahun 2014 sebesar 97,82%.
- e. Dari aspek pendidikan dan kesehatan, Jumlah SD di Kota Depok sebanyak 410 buah dan SMP/ sederajat 177 buah. Dari jumlah sekolah tersebut, terdapat 279 SD Negeri dan 19 SMP Negeri. Jika dihitung kapasitas daya tampung sekolah negeri di Kota Depok yaitu Kapasitas daya tampung SMPN baru mencapai 26,59% dari total siswa SMP di kota Depok, dan kapasitas daya tampung SMAN/SMKN baru mencapai 20,48% dari total siswa SMA di Kota Depok. Untuk Sarana Kesehatan di tahun 2013 terdapat 20 RS (1 RSUD Kelas B), 35 Puskesmas, 113 poliklinik, 4 Pustu. Dengan prioritas di bidang pendidikan, infratraktur ini diproyeksikan di tahun 2025 akan terus meningkat.
- f. Dari aspek pemerintahan, Pemekaran menjadi 11 Kecamatan dengan segala konsekuensinya

Dari data analisa pelaksanaan RPJPD tahap I dan Tahap II (sampai dengan tahun 2014), didapatkan prediksi serta estimasi yang disusun pada tahun 2006 untuk mengGrafikkan masa depan Kota Depok perlu dilakukan perbaikan karena tidak sesuai dengan perkembangannya secara faktual. Beberapa aspek dan parameter pembangunan juga perlu ditambahkan untuk lebih melengkapi data yang ada sehingga Grafikan tentang kondisi Kota Depok ke depan diharapkan bisa lebih komprehensif.



4.2 Isu-isu Internasional

4.2.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada tanggal 30 Mei 2013, High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda mengeluarkan “*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (New Global Partnership) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Komitmen ini kemudian berujung pada terbentuknya kerangka SDGs pada Bulan September 2015 yang disahkan oleh PBB di New York.

Terdapat 17 tujuan SDGs yang terdiri dari: tidak adanya kemiskinan; bebas dari kelaparan; sehat dan sentosa; pendidikan berkualitas; persamaan gender; air bersih dan sanitasi; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya ketimpangan; kota dan komunitas berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; perubahan iklim ditangani; sumberdaya laut dipelihara; ekosistem darat dipelihara; perdamaian, keadilan dan lembaga yang efektif; serta adanya kerjasama global.

4.2.2 Kerjasama Internasional

Peran konstruktif dan kepemimpinan Indonesia semakin diakui di kancah internasional. Saat ini, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat, demokrasi yang dinamis, negara terkemuka dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan anggota dari G-20. Sementara itu, Pemerintah, melalui kementerian Perdagangan juga telah menginisiasi kerjasama ekonomi dengan beberapa blok perdagangan semisal Trans Pacific Partnership (TPP), Indonesia-EU, Free Trade Area of The Asia Pacific (FTAAP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).



Indonesia juga telah memasuki era perdagangan bebas wilayah ASEAN dan sekitarnya dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan juga telah mengisi peran yang cukup signifikan pada level kerjasama Global dan Multilateral.

Bagi Indonesia keterlibatan ini merupakan sebuah wadah yang jika dioptimalisasi maka Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Indonesia berupaya mengatasi tantangan dalam negeri dan pada saat yang sama memainkan peran penting di panggung pembangunan dunia. Pada forum-forum tersebut Indonesia berhasil mengembangkan diri sebagai negara terkemuka dalam mengatasi tantangan pembangunan global yang mempengaruhi kemakmuran dalam negeri. Selain itu, Indonesia ingin mencapai "daya saing ekonomi dari sumber daya alam terus meningkat, sumber daya manusia yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi" pada tahun 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah memanfaatkan keberadaannya di forum-forum global dan regional tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Pemerintah Republik Indonesia saat ini telah melakukan kerja sama pembangunan internasional, dimana kerja sama tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia sampai dengan tahun 2025 telah direncanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang dibagi dalam empat periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2025.

4.2.3 Krisis Global

Lima tahun kedepan akan menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia. Berbagai isu domestik dan internasional akan terus menghantui kinerja perekonomian Indonesia kedepan. Kabar baiknya adalah, Tekanan inflasi sudah mulai melunak sebagai konsekuensi dari turunnya tren harga-harga komoditas di pasar internasional.



Perekonomian global yang belum menunjukkan tanda-tanda pulih memberikan imbas yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat serta menyebabkan tren depresiasi rupiah yang cukup persisten. Sementara itu secara internal, belum tuntasnya infrastruktur pendukung produksi juga turut menyumbang melambatnya kinerja ekspor yang pada gilirannya turut memberikan tekanan yang berlebihan pada rupiah

Stagnasi yang melanda di negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi perlambatan tersebut. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, apalagi pada saat ini Indonesia sedang hangat-hangatnya menjalin kerjasama dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. Perlambatan ekonomi di Tiongkok berdampak pada sektor riilnya sehingga membawa dampak terhadap turunnya harga komoditas di pasar internasional.

Patut menjadi catatan bahwa faktor-faktor utama yang dewasa ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat rentan akan *shock*. Meskipun mengalami pelambatan, akan tetapi jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti AS, Tiongkok dan Singapura yang cenderung stagnan dan mengalami penurunan pertumbuhan, perekonomian Indonesia sebenarnya masih menunjukkan kinerja menuju ke arah yang semakin baik. Ekspansi fiskal melalui pengeluaran pemerintah diharapkan semakin meningkat pada periode selanjutnya sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus positif untuk menggerakkan perekonomian.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Kota Depok, sebagian atau seluruh aspek dalam isu-isu internasional yang telah dijabarkan diatas, dapat dipilih sebagai aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Kota Depok 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu SDGs, peningkatan daya saing serta daya tahan daerah terhadap krisis sebagai isu strategis RPJMD Kota Depok serta mengkaitkan isu-isu tersebut dengan dengan permasalahan riil di lapangan.



4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dokumen RPJPD Kota Depok disusun dengan memperhatikan dokumen RPJP Daerah lainnya, hal ini dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang Daerah dengan daerah-daerah lain terkait. Hasil telaahan RPJPD Daerah lainnya pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Perlunya penelaahan RPJPD daerah lain karena beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Hasil identifikasi kebijakan dokumen RPJPD daerah lain tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Identifikasi Kebijakan RPJPD Daerah lain

No.	Daerah Lain	Kebijakan Terkait
1.	DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan keterpaduan perencanaan tata ruang regional dan pembangunan sarana dan prasarana untuk membuat hubungan fungsional yang sinergis antara Jakarta dengan daerah sekitarnya (Bodetabekjur);2. Meningkatkan kualitas manajemen pengendalian banjir (Jabodetabekjur);3. Mewujudkan hubungan antar Wilayah yang lebih sinergis dan berkelanjutan dalam rangka mendukung daya saing kota Jakarta;



No.	Daerah Lain	Kebijakan Terkait
		4. Peningkatan kerjasama antar daerah dan Pusat;
2.	Kabupaten Bogor	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan sarana pengolahan sampah Regional di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor (termasuk pengolahan sampah B3);2. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi meliputi Jl. Raya Bogor Koridor Cibinong-Cilodong, Jl. Raya Pondok Rajeg; Jl. Tol Bojonggede-Antasari-Depok; Jl. Tol Kemang-Parung-Depok Pasar Jum'at;3. Pembangunan terminal terpadu di Cibinong, Bojonggede yang berbatasan dengan Kota Depok;

4.3 Penetapan Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/ institusi di masa yang akan datang.

Setelah mempertimbangkan isu global nasional dan lokal dari berbagai aspek pembangunan sebagaimana telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Depok.



Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kota Depok 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 10 (sepuluh) isu strategis Kota Depok, sebagai berikut;

1. Infrastruktur
2. Daya saing dan Ketahanan Ekonomi
3. Kualitas Lingkungan Hidup
4. Ekonomi Kreatif dan UMKM Berbasis Potensi Lokal
5. Tata Kota
6. Ketahanan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan
7. Ketimpangan
8. Kemiskinan dan Pengangguran
9. Kesehatan
10. Kualitas Sumber Daya Manusia

4.3.1. Infrastruktur

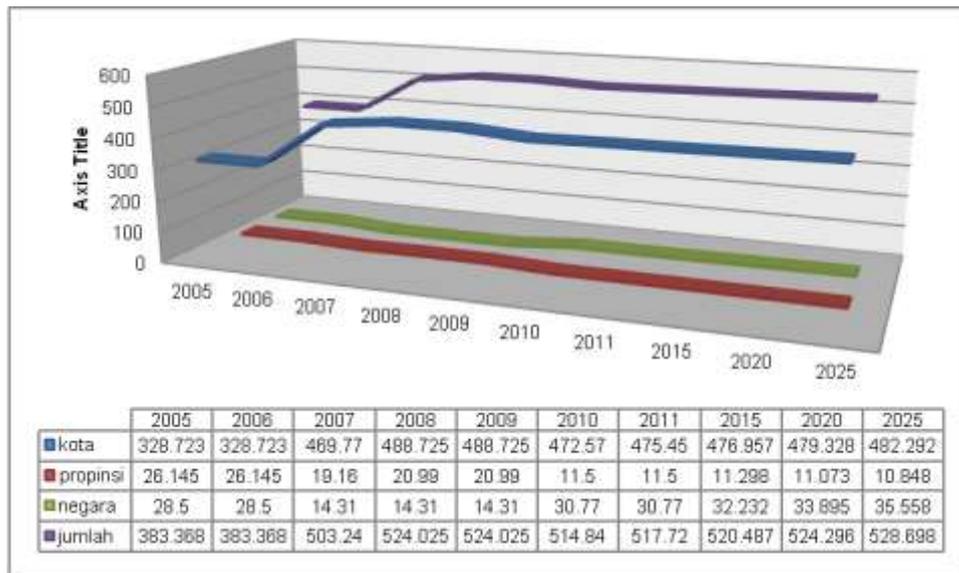
Infrastruktur dasar daerah merupakan sistem yang mendukung kegiatan masyarakat, di dalamnya meliputi jaringan telekomunikasi, transportasi, listrik, sumberdaya air dan sanitasi. Bagi masyarakat perkotaan, keberadaan infrastruktur yang modern sangat dibutuhkan sehingga merupakan tantangan tersendiri ke depan karena penyediaannya akan terbentur pada kapasitas keuangan daerah. Pengembangan infrastruktur kota harus memenuhi prinsip fungsionalitas terutama dalam mendorong peran kota sebagai penggerak ekonomi wilayah terutama sebagai elemen yang mendorong efek aglomerasi. Pertambahan penduduk kota yang semakin cepat akan berujung pada tingkat intensitas aktifitas warga kota yang semakin intensif, sehingga memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ruang dan pemenuhan kebutuhan berbagai macam infrastruktur dan fasilitas perkotaan.



4.3.1.1. Perhubungan

Sejalan dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian, kebutuhan akan sarana dan prasarana jalan semakin meningkat, apalagi dengan banyaknya pembangunan perumahan yang menuntut adanya akses jalan. Panjang jalan diperkirakan akan terus meningkat, namun berdasarkan data yang ada, perkembangannya agak lambat. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2010 terbangun jalan sepanjang 1.891 km jalan kota, tetapi kenyataannya sampai dengan tahun 2015 hanya terbangun sepanjang 476,15 km. Estimasi perkembangan panjang jalan di Kota Depok sampai dengan akhir periode RPJPD dapat dilihat pada **Grafik 4.1**. Secara kualitatif proporsi jalan dalam kondisi baik mencapai 476,15 km jalan kota, 11,67 km jalan provinsi, dan 41,63 km jalan Negara.

Panjang jalan yang terbatas selain mengurangi mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu tantangan utama Kota Depok ke depan adalah mewujudkan pembangunan jalan dalam proporsi yang lebih maksimal dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan luas wilayah. RTRW Kota Depok 2012-2032 merencanakan pembangunan berbagai jalur jalan strategis, utamanya *Depok Outer Ring Road (DORR)* yang meliputi jalur yang cukup panjang, mulai dari terminal Jatijajar melingkar ke selatan hingga barat Kota Depok terus ke Utara bersambung dengan jalur Juanda dan bertemu kembali dengan Jatijajar. Dari terminal Jatijajar juga didorong pembangunan jalan menuju tol Jagorawi sehingga keterkaitan antarwilayah di Jabodetabek meningkat yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi regional.

Grafik. 4.1 . Estimasi Perkembangan Panjang Jalan di Kota Depok

Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Kecukupan jalur jalan juga akan mencegah kemacetan kota yang makin akut di Kota Depok. Dari sekitar 20 titik macet yang terpantau pada tahun 2012, prioritas yang perlu ditangani adalah ruas-ruas jalan utama. Pemisahan pergerakan lokal dan regional melalui relokasi terminal bus regional ke Jatijajar merupakan solusi lainnya sehingga perlu dipercepat penyelesaiannya, di samping perlunya manajemen transportasi (manajemen rekayasa) yang lebih efektif, edukasi kepada masyarakat, penegakan peraturan, dan kecukupan fasilitas perlengkapan jalan (halte dan trotoar) dan perambuan.

Tidak hanya masalah lokal, kemacetan juga menjadi masalah bersama dan saling keterkaitan di wilayah Jabodetabek sehingga perlu adanya integrasi moda regional. Masterplan transportasi Jabodetabek diharapkan bisa segera terimplementasi sehingga masalah kemacetan bisa ditangani secara bersama-sama. Rencana umum moda transportasi massal Kota Depok mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 54 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal pada Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi pedoman dalam rangka pembangunan jaringan angkutan umum massal di Jabodetabek dalam jangka pendek, menengah dan panjang.



Sasaran Rencana Umum tersebut adalah mewujudkan angkutan umum sebagai tulang punggung sistem transportasi Jabodetabek dan menerapkan kebijakan manajemen permintaan (*transport demand management/TDM*), mengurai dan mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pengguna jasa transportasi, memadukan pola jaringan transportasi, meningkatkan jaringan jalan dan jalur kereta api, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sedangkan Arah pembangunan angkutan massal meliputi pembangunan berbasis jalan dan rel yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung yang sesuai standar (koridor jalur khusus bus, pengembangan sistem tiket, fasilitas *park and ride*, fasilitas integrasi antarmoda, fasilitas pesepeda dan jalan kaki, peningkatan kapasitas ruas jalan dan simpang), pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan pengembangan angkutan massal yang ramah lingkungan. Dalam rencana umum tersebut, tercantum rencana pembangunan jaringan angkutan massal berbasis jalan trayek Depok-Manggarai, Depok-Dukuh Atas, dan trayek Depok-Cawang (trayek utama) sebagai program jangka panjang. Di Depok juga akan dikembangkan fasilitas integrasi dan *park and ride*, selain jaringan trayek pengumpan.

Upaya menyediakan *park and ride* yang mulai dirintis di Kota Depok, baik oleh Pemerintah maupun PT KAI, perlu ditambah jumlahnya guna mengurangi jumlah kendaraan yang menuju Jakarta. Selain itu fasilitas parkir juga perlu diperbanyak guna mencegah terjadinya parkir di pinggir jalan yang bisa memicu kemacetan. Dalam kaitan ini, sangat penting ketegasan dalam menegakkan peraturan tentang izin mendirikan bangunan yang mewajibkan adanya fasilitas parkir.

Meskipun tidak berkewenangan dalam pembangunan jalan tol, Pemerintah Kota Depok perlu memberikan dorongan terhadap percepatan pembangunan jalan tol Cijago dan Desari yang diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan. Permasalahan bidang perhubungan lainnya adalah kurangnya jumlah jembatan penyeberangan orang (JPO), sehingga ikut menambah kemacetan. Pembangunan JPO yang sudah dimulai agar dilanjutkan sampai memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Prasaranan perhubungan lainnya yang relatif kurang adalah penerangan jalan umum (PJU), sehingga perlu mendapat perhatian yang sama.



4.3.1.2. Sumber Daya Air

Tantangan lain yang cukup berat dalam pemenuhan infrastruktur dasar kota adalah drainase serta penataan situ, sungai dan irigasi. Panjang drainase meningkat dalam kurun 3 tahun terakhir, namun masih dianggap belum memadai untuk memenuhi standar pelayanan kota, sehingga harus ada upaya menempatkannya sebagai salah satu prioritas karena vital perannya sebagai sarana pengendali banjir kota. Demikian halnya dengan penataan situ dan sungai beserta sempadannya. Sungai dan situ berperan vital dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat sehingga kelestariannya harus dijaga melalui kebijakan revitalisasi dan penataan. Aspek lain dari situ dan sungai adalah perlunya perlindungan dari pencemaran oleh limbah dan sampah yang merupakan ancaman serius di Kota Depok selain ancaman alih fungsi secara ilegal.

Pembangunan dan revitalisasi irigasi diperlukan dalam rangka menyediakan keperluan air untuk budidaya pertanian produktif (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan hortikultura). Masalah yang dihadapi adalah kurangnya irigasi dan minimnya pemeliharaan serta bercampurnya saluran irigasi dengan drainase. Pembangunan irigasi tergantung komitmen terhadap pentingnya pembangunan pertanian kota yang masih berpotensi menyejahterakan masyarakat dan melindungi keberadaan ruang terbuka hijau kota.

Tantangan lain dalam bidang sumberdaya air adalah pengendalian penurunan muka air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pembatasan penggunaan air tanah bukan domestik, dan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

4.3.2 Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi

4.3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto

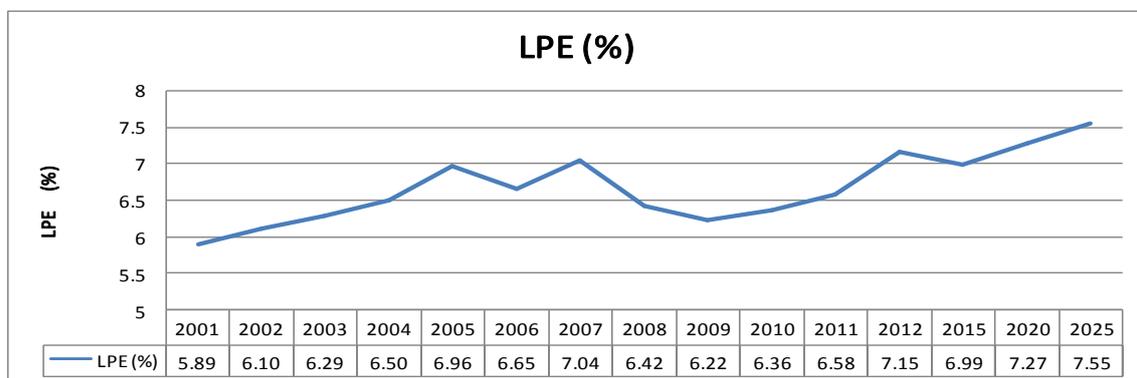
PDRB Kota Depok (atas dasar harga berlaku) selama 7 (tujuh) tahun terakhir (2008-2014) mengalami peningkatan mencapai hampir 100 %, Sedangkan PDRB (atas dasar harga konstan) mengalami pertumbuhan rata-rata 6,82 % tiap tahun. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan atau lebih dikenal dengan Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Barat.



Fakta ini menunjukkan bahwa Kota Depok dengan keuntungan letak geografisnya, merupakan kawasan cepat tumbuh yang dicirikan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, oleh karenanya masih bisa dipacu lebih tinggi lagi. Secara empiris di berbagai kawasan cepat tumbuh menunjukkan bahwa kalau pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sekitar 5-7% pertahun, maka pada kawasan cepat tumbuh bisa tumbuh lebih dari 7% pertahun, atau bisa sekitar 9% pertahun bahkan 11%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama sepuluh tahun terakhir serta proyeksinya sampai tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik 4.2.

Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai terobosan dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Daya saing ditentukan oleh kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, sumberdaya manusia, dan utamanya iklim berinvestasi. Iklim investasi terkait dengan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan, regulasi yang mendukung usaha, stabilitas daerah serta tingkat kriminalitas. Hambatan investasi dan berusaha karena biaya ekonomi tinggi, banyaknya regulasi yang memberatkan, serta keamanan dan ketertiban daerah, perlu ditekan atau ditiadakan agar Kota Depok menjadi kota yang ramah untuk investasi. Indeks integritas pelayanan publik Kota Depok yang relatif rendah harus menjadi pemicu bagi perbaikan daya saing Kota Depok ke depan.

Grafik 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok sampai dengan Tahun 2025



Sumber: diolah dari PDRB Kota Depok 2001-2012

PDRB Kota Depok disumbang terutama oleh sektor tersier (50-54 %) dan sekunder (44-47%), sedangkan sektor primer cenderung mengalami penurunan.



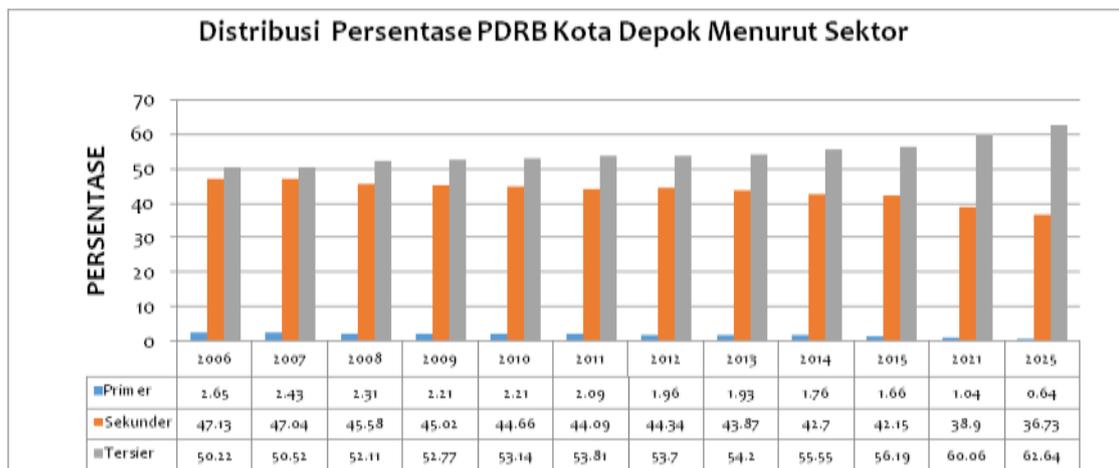
Proyeksi PDRB Kota Depok sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik4.3, sedangkan pada Grafik4.4. dapat dilihat tren perkembangan distribusi PDRB tiap-tiap sektor, tampak bahwa sektor tersier mengalami kecenderungan meningkat, dan sebaliknya sektor primer dan sekunder.

Grafik4.3. Estimasi Perkembangan PDRB Sampai Dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS),2006-2013

Grafik 4.4. Estimasi Perkembangan Distribusi Presentase Sektor Sampai Dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS), 2006-2013

4.3.2.2 Sektor Primer

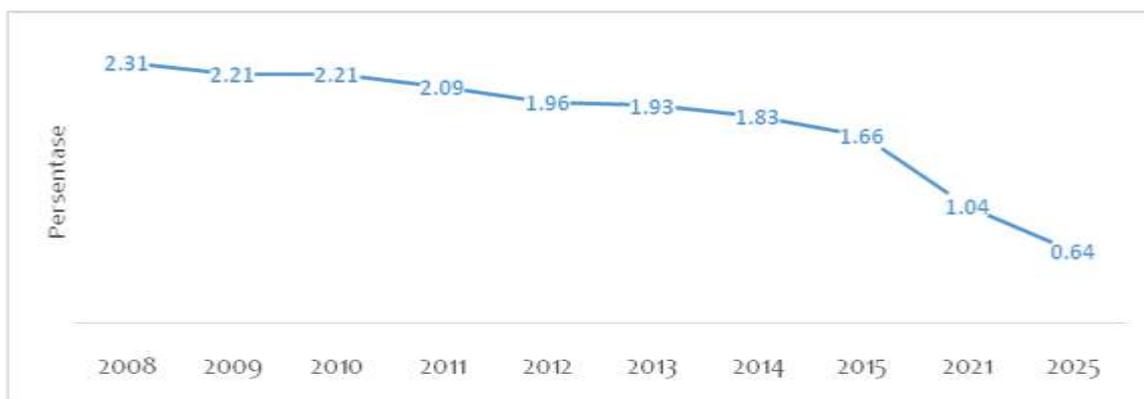
Sektor primer yang berkembang di Kota Depok hanya lapangan usaha pertanian, sedangkan pertambangan dan penggalian tidak ditemukan. Lapangan usaha pertanian terdiri dari tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, sedangkan kehutanan tidak ditemukan di Kota Depok. Subsektor peternakan merupakan lapangan usaha yang dominan (mencapai 66%).

Dalam struktur ekonomi Daerah, sektor primer sebagaimana lazimnya di kawasan perkotaan, hanya sedikit memberikan kontribusi terhadap PDRB, yaitu 2,1% -2,64 % dalam 5 tahun terakhir ini. Meskipun PDRB lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan tiap tahun (relatif kecil), kontribusinya terhadap perekonomian Daerah ke depan cenderung semakin mengecil.

Peranan kelompok sektor primer dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2010-2014 menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurun dari 2,21% (2010) menjadi 1,83 % (2014).

Perkembangan sektor primer semakin menurun karena proses pembangunan yang lebih pesat di luar sektor primer sehingga mengurangi lahan dan tanah yang dipergunakan untuk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Grafik4.5. menunjukkan proyeksi distribusi pertanian terhadap PDRB sampai dengan tahun 2025.

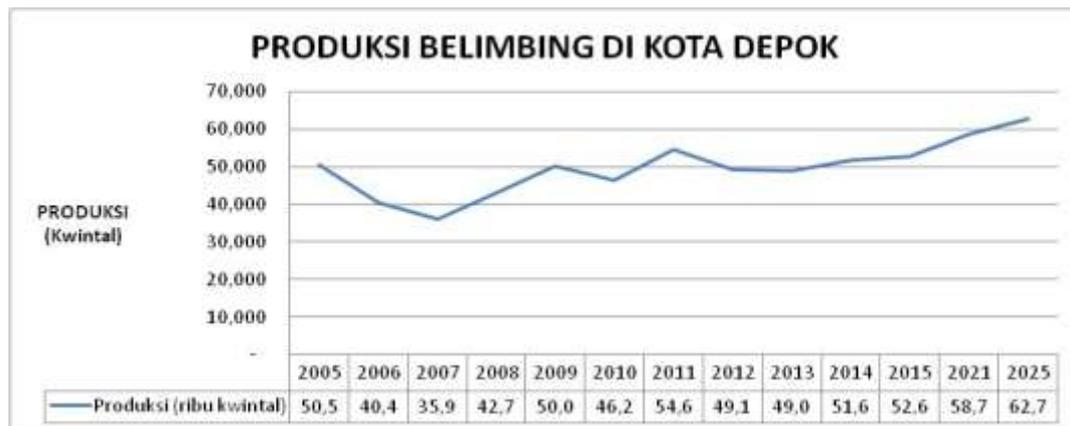
Grafik4.5. Proyeksi distribusi pertanian terhadap PDRB sampai dengan tahun 2025



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS), 2006-2014

Meskipun kontribusinya terhadap perekonomian Daerah rendah, sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian karena terdapat komoditas unggulan Daerah yang perlu dipertahankan dan dikembangkan, selain kontribusinya terhadap ruang terbuka hijau Kota. Komoditas unggulan Daerah adalah belimbing, tanaman hias, ikan hias dan usaha pemotongan hewan (RPH).

Komoditas lokal pertanian berpotensi untuk berkembang jika mendapat perhatian serius seperti terlihat proyeksinya pada Grafik4.6.

Grafik4.6. Proyeksi Perkembangan Produksi Belimbing sampai dengan Tahun 2025

Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2005-2013

Produksi belimbing yang memiliki keunggulan mutu secara nasional, bisa semakin meningkat jika ada jaminan ketersediaan lahan budidaya, yang mulai berkurang oleh kepentingan sektor lain. Demikian halnya dengan ikan hias dan tanaman hias, yang masih bisa dibudidayakan di pekarangan (Grafik4.7 dan 4.8). Pangsa pasar ketiga komoditas masih terbuka dan diharapkan dapat menjadi unggulan di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada juga berpotensi dikembangkan menjadi RPH regional untuk menangkap peluang kebijakan DKI Jakarta yang merencanakan penyediaan hewan potong di luar wilayahnya.

Grafik4.7. Proyeksi Perkembangan Produksi Ikan Hias dan Pembenihan Sampai Dengan Tahun 2025

Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2006-2012

Grafik 4.8. Proyeksi Perkembangan Produksi Ikan Air Tenang Sampai Dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2006-2012

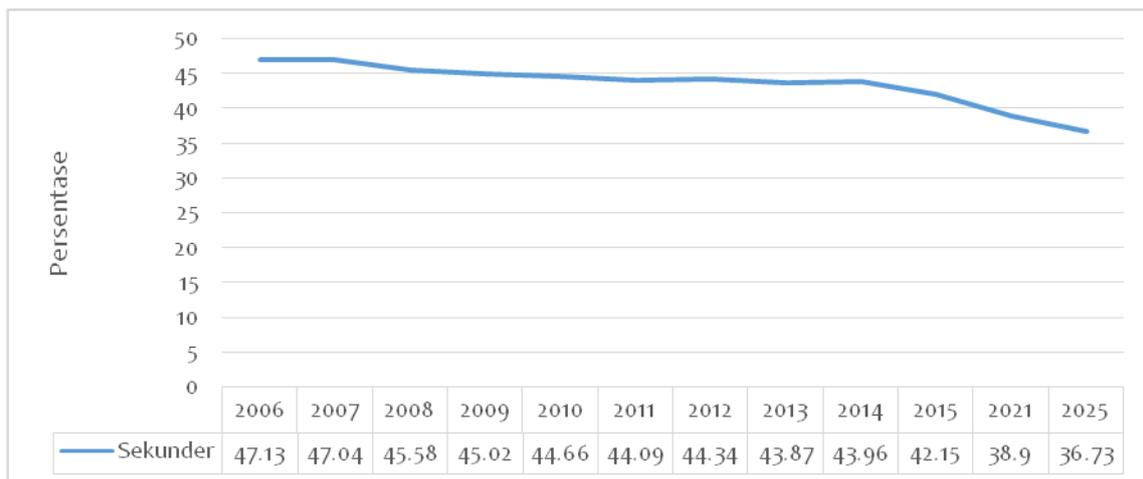
Selain ketersediaan lahan, permasalahan lain yang dihadapi sektor pertanian adalah masih lemahnya kelembagaan petani, produktivitas dan akses terhadap sumberdaya modal dan pasar. Perlu upaya perlindungan lahan usaha produktif serta fasilitasi dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses kepada sumberdaya produktif sehingga masyarakat pertanian berminat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas serta mendiversifikasi usahanya, khususnya yang bernilai ekonomi dan bernilai tambah tinggi. Perbaiki sistem usahatani yang ada tidak saja memperbaiki bagian hulu tetapi juga pada bagian hilirnya sehingga meningkatkan jangkauan dan pangsa pasar produk pertanian unggulan Kota Depok, tidak saja di tingkat lokal dan regional, tetapi bisa menjadi komoditas ekspor karena secara kualitatif produk pertanian Depok memenuhi syarat.

Dengan iklim usaha pertanian yang menarik maka usahatani akan menjadi lebih kompetitif sehingga kecenderungan alih fungsi lahan dan usaha bisa dikurangi karena usahatani masih menarik minat masyarakat terutama kalangan muda. Sektor pertanian menurut data BPS tahun 2013, menyerap tenaga kerja paling kecil, yaitu kurang dari 1,83% dari total angkatan kerja yang ada. Sedangkan laju pertumbuhan sektor pertanian hanya 0,51%.

4.3.2.3 Sektor Sekunder

Sektor sekunder terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha listrik, gas dan air minum, serta lapangan usaha bangunan/konstruksi. Peranan kelompok sektor sekunder dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2009-2013 menurut PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurun dari 44,65 % (2010) menjadi 43,96 % (2014). Keadaan ini dipengaruhi oleh penurunan peran sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Peranan kelompok sektor sekunder dalam struktur perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2009-2014 menurut PDRB atas Dasar Harga Konstan relatif stabil dari 49,97 % (2009) menjadi 50,13 % (2014). Meskipun tetap memberikan kontribusi signifikan, pada masa mendatang kontribusi sektor sekunder cenderung menurun terhadap total PDRB seperti diperlihatkan pada Grafik 4.9.

Grafik 4.9. Tren Perkembangan Kontribusi Sektor Sekunder Sampai dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS), 2006-2014

Seiring dengan kontribusinya yang menurun, persentase angkatan kerja yang bergerak di sektor sekunder diperkirakan akan semakin kecil di masa mendatang. Subsektor yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah industri olahan, sedangkan subsektor listrik, gas dan air minum serta bangunan/konstruksi semakin menurun serapannya.



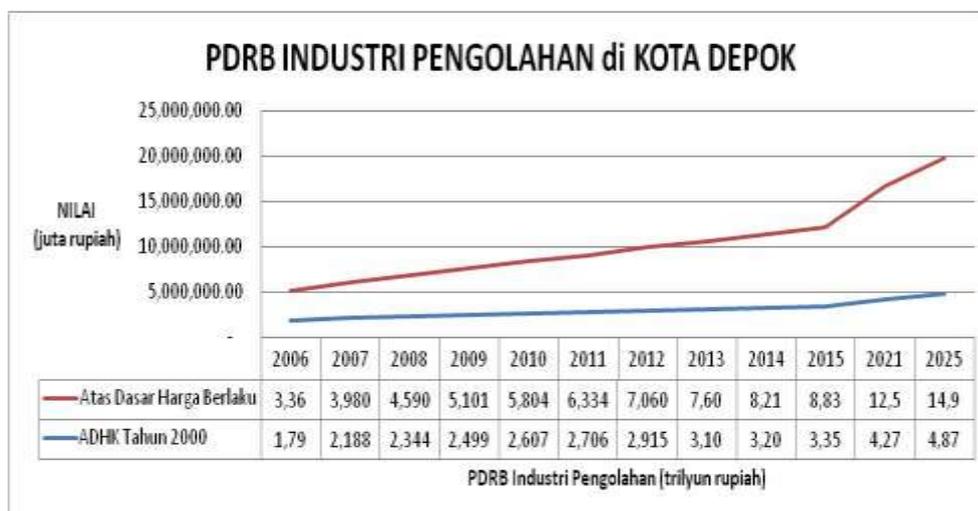
a) Industri Pengolahan

Subsektor ini mencakup industri besar dan sedang, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Industri besar dan sedang mencakup perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 19 orang, sedangkan industri kecil 5 sampai 19 orang dan industri kerajinan rumah tangga dengan tenaga kerja 1 sampai 4 orang.

Industri pengolahan yang cukup prospektif untuk dikembangkan di Kota Depok adalah sub sektor tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, serta sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau. Kedua sub sektor ini sifatnya juga industri yang *labour intensive*, sehingga penyerapan tenaga kerjanya juga cukup besar. Gangguan negatif terhadap dua sub sektor ini dapat berdampak buruk terhadap perekonomian Kota Depok.

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan sektor industri mencapai 38,99% (2013), diperkirakan akan mengalami penurunan pada masa mendatang, namun sebagai sektor basis, sektor industri pengolahan masih tetap signifikan mempengaruhi struktur PDRB Kota. Sedangkan laju pertumbuhan sektor industri dalam 5 tahun terakhir juga mengalami fluktuasi, tumbuh sebesar 6,57% pada tahun 2009 lalu menurun di tahun 2011 menjadi 3,77% lalu tumbuh 7,73 pada 2012 dan melambat menjadi 6,47% di tahun 2013.

Grafik4.10. Perkembangan PDRB Industri Pengolahan di Kota Depok



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS), 2006-2013



Pertumbuhan industri kecil dan menengah menunjukkan kecenderungan meningkat, namun sektor ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain belum tertatanya struktur industri berbasis potensi lokal, kurangnya fasilitas usaha dan promosi produk, kurangnya koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah, dan besar serta sektor ekonomi lainnya, dan perlunya minimalisasi ekonomi biaya dari aspek institusi, infrastruktur, dan logistik. Tantangan lainnya adalah kurang berkembangnya diversifikasi unggulan daerah. Perlu upaya fasilitasi dan mediasi oleh dinas terkait sehingga industri sebagai salah satu sektor basis daerah dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga bernilai tambah tinggi dan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, serapan tenaga kerja oleh sektor industri dianggap belum optimal, mencapai 16,51% dari total angkatan kerja, cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Jenis industri yang labour intensive (menyerap tenaga kerja besar) di Kota Depok adalah industri makanan, minuman dan tembakau, selain subsektor tekstil, barang dan kulit serta alas kaki.

Salah satu potensi sektor industri adalah industri kreatif. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok menyebutkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri kreatif Depok pada tahun 2013 mencapai 11,73 persen atau Rp. 2,7 triliun. Khusus kuliner, PDRB-nya mencapai Rp. 228,43 miliar yang sekarang ini terpusat di kawasan Margonda. Potensi ini perlu terus dikapitalisasi sehingga menjadi kekuatan ekonomi kota yang handal, apalagi peluangnya masih sangat terbuka karena mengandalkan pada inisiatif dan kreativitas masyarakat. Mewujudkan Depok sebagai kota kreatif akan mendukung sekali bagi tumbuhnya industri kreatif.

b) Listrik, Gas dan Air Minum

Industri energi listrik di Kota Depok akan menjadi semakin penting di masa mendatang. Perbaikan teknologi dan peningkatan efisiensi perangkat listrik rumah tangga dan perangkat listrik pada industri diperkirakan belum akan mengurangi kebutuhan energi listrik. Dengan semakin berkembangnya perumahan, perkantoran dan perdagangan di Kota Depok, maka kebutuhan akan energi listrik, gas dan air minum meningkat pula.

Perkembangan daya tersambung dan jumlah pelanggan sangat tergantung pada kemampuan PLN dalam menyediakan energi yang dijual, karena kebutuhan diperkirakan lebih besar dari penyediaan yang ada maka akan menimbulkan distorsi antara kebutuhan dan ketersediaan energi. Perkembangan kebutuhan Listrik PLN dapat dilihat pada **Grafik4.11**.

Grafik4.11. Perkembangan Kebutuhan Listrik di Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032, Pada Tahun 2011 Kota Depok memerlukan daya sebesar 238.946.830VA yang terbagi kedalam kebutuhan rumah tangga sebesar 170.676.307 VA, penerangan jalan umum (PJU) sebesar 25.601.446 VA serta fasilitas sosial dan fasilitas umum sebesar 42.669.077 VA. Untuk kebutuhan non rumah tangga (fasos fasum dan penerangan jalan), kebutuhan tertinggi adalah untuk Kecamatan Sukmajaya dengan total kebutuhan listrik sebesar 13.845.763 VA atau mencapai 5,79 % dari total kebutuhan listrik Kota Depok, dimana kebutuhan PJU sebesar 5.192.161 VA dan fasos fasum sebesar 8.653.602 VA. Sedangkan kebutuhan terkecil untuk Kecamatan Limo dengan kebutuhan listrik hanya mencapai 2.788.082 VA atau sebesar 1,17 % dari total kebutuhan listrik di Kota Depok pada tahun 2011. Pada Tahun 2021 kebutuhan listrik di Kota Depok meningkat menjadi 366.807.951 VA dengan total kebutuhan untuk rumah tangga sebesar 262.005.679 VA, penerangan jalan umum sebesar 39.300.852 VA dan fasos fasum sebesar 65.501.420 VA.



Pada tahun 2021 kebutuhan listrik terbesar adalah untuk Kecamatan Sukmajaya sebesar 74.391.347 VA yang terbagi menjadi kebutuhan rumah tangga sebesar 53.136.676 VA, sarana penerangan jalan umum sebesar 7.970.501 VA dan fasos fasum sebesar 13.284.169 VA.

Pada Tahun 2026, Kota Depok memerlukan daya sebesar 1,817,889,434 VA, dengan rincian kebutuhan untuk rumah tangga sebesar 1,298,492,453 VA, sarana penerangan jalan umum sebesar 194,773,868 VA dan fasos fasum sebesar 324,623,113 VA. Untuk lebih jelas mengenai rencana kebutuhan energi listrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Depok Tahun 2026

TAHUN	KEBUTUHAN LISTRIK (VA)			
	RUMAH TANGGA	SARANA PJU	FASOS FASUM	TOTAL
2011	170.676.307	25.601.446	42.669.077	238.946.830
2016	211.466.692	31.720.004	52.866.673	296.053.369
2021	262.005.679	39.300.853	65.501.420	366.807.951
2026	1,298,492,453	194,773,868	324,623,113	1,817,889,434

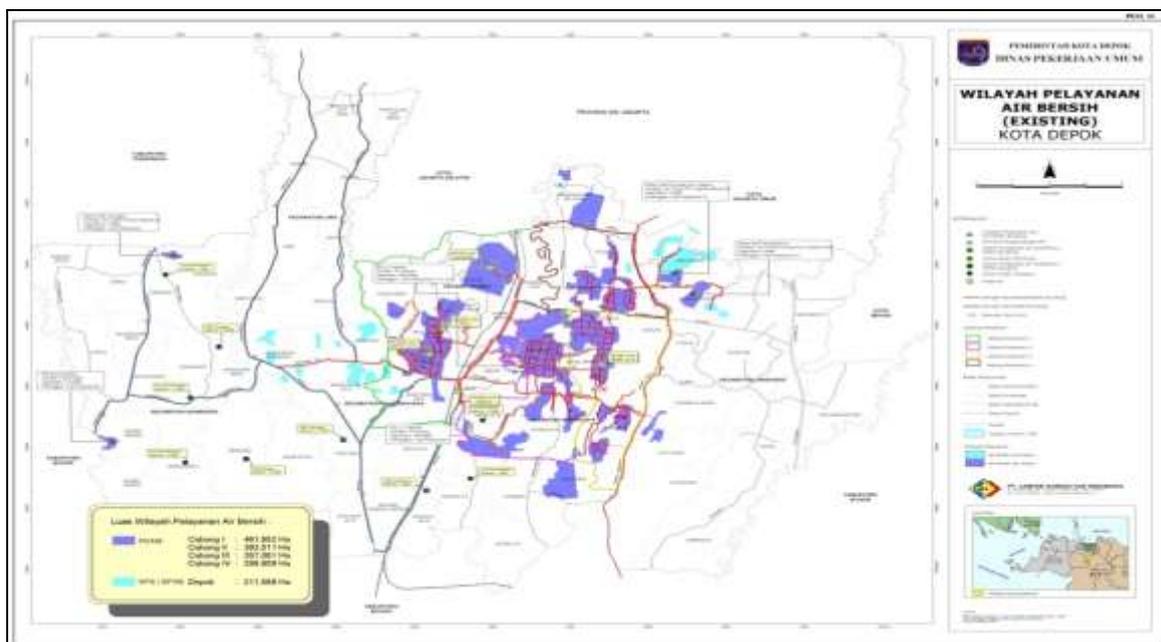
Sumber : Naskah Akademis Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032

Penyediaan air bersih di Kota Depok polanya mirip dengan penyediaan listrik oleh PLN. Jumlah pelanggan dan pemakaian air bersih Kota Depok diperkirakan akan meningkat terus, oleh karena itu manajemen pengelolaan air bersih perlu terus diperbaiki dan dikembangkan sesuai peningkatan kebutuhan pasar. Dengan telah berdirinya Badan Usaha Milik Daerah PDAM Kota Depok, maka peluang untuk meningkatkan kapasitas pelayanan diharapkan dapat diwujudkan. Kondisi eksisting perkembangan jumlah pemakaian air bersih di Kota Depok dapat dilihat pada Grafik4.12.

Grafik4.12. Perkembangan Jumlah Pemakaian Air Bersih Perpipaandi Kota Depok

Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2005-2013

Sebaran layanan air bersih perpipaan di Kota Depok sampai dengan tahun 2013 masih terpusat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoranmas, Kecamatan Sukmajaya, kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Cilodong. Sedangkan layanan air bersih di enam kecamatan lainnya relatif masih sedikit sebagaimana diperlihatkan pada Grafik di bawah ini. Rencana pengembangan layanan air bersih sampai tahun 2025, perlu penyebaran merata di seluruh kecamatan.

Gambar 4.1. Sebaran Layanan Air Bersih Perpipaan di Kota Depok Tahun 2013

Sumber : PDAM Tirta Asasta (2013)



c) *Bangunan/Konstruksi*

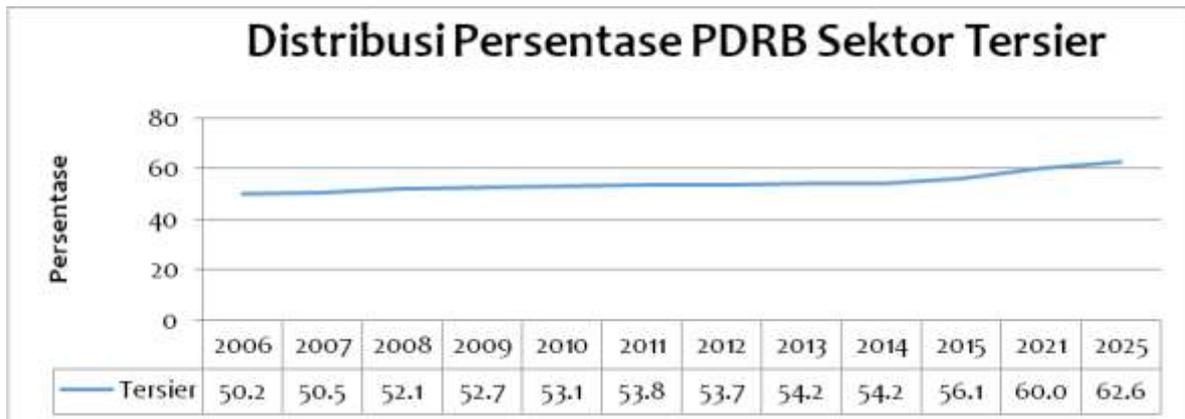
Sebelumnya diprediksi bahwa subsektor bangunan/konstruksi akan mengalami penurunan, namun kenyataannya mengalami peningkatan. PDRB lapangan usaha konstruksi pada tahun 2005 mencapai Rp. 397.586,61 ribu, meningkat menjadi Rp. 763.196,78 ribu pada tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi subsektor bangunan merupakan yang paling pesat diantara sektor sekunder. Dalam lima tahun terakhir tumbuh dalam kisaran 6,72%-14,23%. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya laju pembangunan dan perkembangan perekonomian di Kota Depok, seiring dengan perkembangan wilayah pinggiran DKI Jakarta lainnya (Bekasi, Tangerang, Bogor).

Kontribusi subsektor bangunan/konstruksi akan dipacu lebih besar lagi melalui pembangunan properti ke arah vertikal karena secara horizontal dihadapkan pada keterbatasan lahan. Kota Depok sangat tepat untuk dijadikan tujuan investasi pemukiman karena dekat dengan pusat bisnis, kampus dan sekolah dan juga kemudahan akses ke Ibukota dan wilayah Jabodetabek lainnya, apalagi dengan akan terbangunnya jalan tol Antasari-Depok (Desari) dan tol Cinere-Jagorawi (Cijago), jalur rel listrik yang menghubungkan dengan bandara dan lain sebagainya.

4.3.2.4 Sektor Tersier

Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, lapangan usaha angkutan dan komunikasi, lapangan usaha bank & lembaga keuangan lainnya, serta lapangan usaha Jasa-jasa. Selama kurun waktu lima tahun (2005-2010), PDRB sektor tersier menunjukkan pola peningkatan, demikian pula dengan laju pertumbuhan ekonominya, meskipun terjadi fluktuasi di awal periode. Sebelumnya diprediksi bahwa sektor tersier tidak akan bertumbuh pesat, namun nyatanya pertumbuhannya melebihi yang diperkirakan dan terus akan mengalami peningkatan sampai tahun 2025. Kontribusi sektor tersier terhadap total PDRB diprediksi akan mengalami pertumbuhan terus-menerus hingga tahun 2015 (lihat Grafik4.13).

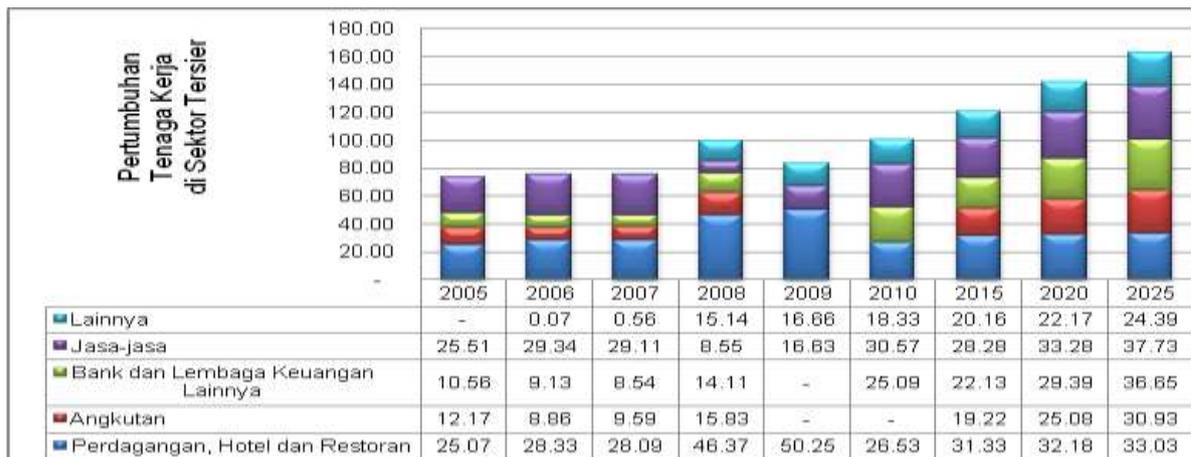
Grafik 4.13 Tren Perkembangan Distribusi Sektor Tersier Sampai Dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok (BPS), 2006- 2014

Subsektor yang menyumbang paling besar dan pesat pertumbuhannya adalah perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor jasa-jasa serta bank dan lembaga keuangan lainnya memberikan sumbangan yang cenderung stabil. Kalau dirinci lagi, maka subsektor perdagangan besar dan eceran yang berpengaruh besar dalam perekonomian daerah.

Seiring dengan peningkatan PDRB sektor tersier, persentase angkatan kerja Kota Depok yang bergerak di sektor tersier yang saat ini sudah sangat besar, akan semakin meningkat di masa mendatang. Tenaga kerja sektor tersier yang saat ini mencapai 74.12% dari total angkatan kerja di Kota Depok, pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan pekerja di sektor ini rata-rata akan meningkat sebesar 24.22% pada tahun 2015, menjadi 28.42% pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 32.55% di tahun 2025. Peningkatan ini karena terkait dengan sektor unggulan Kota Depok yang merupakan Kota pemukiman di sekitar Wilayah DKI Jakarta. Grafik perkembangan persentase tenaga kerja sektor tertier di Kota Depok dapat dilihat pada Grafik 4.14.

**Grafik 4.14 Perkembangan Persentase Tenaga Kerja Sektor Tersier di Kota Depok**

Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

a) Perdagangan, Hotel dan Restoran

Laju Pertumbuhan Ekonomi subsektor perdagangan, hotel dan restoran agak berfluktuasi, pernah mengalami pertumbuhan cepat paling besar di tahun 2011 sebesar 8,55 kemudian menurun pada tahun 2012 menjadi 7,24 dan kembali menurun pada tahun 2013 menjadi 6,93.

Perkembangan perdagangan Kota Depok dapat dilihat melalui nilai ekspornya. Selama dasa warsa 1990 sampai 1999 Kota Depok diklasifikasikan sebagai kota yang tinggi ekspor industri manufakturnya. Oleh sebab itu pada tahun 2010 diperkirakan angka ekspor mencapai 925 juta \$. Namun, faktanya nilai ekspor Kota Depok tidak bisa mencapai angka itu terkait dengan adanya krisis global pada tahun 2008/2009. Nilai ekspor kembali meningkat pada tahun 2010, dan setelah tahun 2014 diprediksi angka ekspor akan terus berkembang bersamaan dengan pulihnya perekonomian dunia. Prediksi ini termasuk pesimis karena memperhatikan adanya kemungkinan faktor persaingan dari negara lain, biaya produksi yang semakin meningkat, kondisi perekonomian yang masih dianggap belum kondusif dan faktor-faktor lainnya.

Ekspor Kota Depok Tahun 2013 paling banyak ke negara Philipina disusul kemudian ke negara Amerika Serikat. Grafik prediksi nilai ekspor Kota Depok sampai tahun 2025 (dalam satuan satu juta US\$) dapat dilihat pada Grafik 4.15.

Grafik 4.15 Perkembangan Ekspor Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Dalam bidang perhotelan, selama tiga tahun terakhir terjadi penurunan jumlah kamar hotel, tapi dari segi kualitas ada kecenderungan peningkatan, yaitu dari Melati 1 dan 2 meningkat kualitasnya menjadi bintang 2. Berdasarkan laporan dari BPS Kota Depok tahun 2011, jumlah hotel berbintang di Kota Depok ada 3 buah yaitu bintang tiga 1 buah dengan jumlah kamar 78 dan bintang dua 1 buah dengan jumlah kamar 54. Sedangkan hotel dengan kelas melati di Kota Depok ada 10 buah. Jumlah hotel perlu terus didorong untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik akan penginapan, ruang pertemuan, pameran, dan lain-lain.

Tantangan yang dihadapi sektor perdagangan adalah perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor ini. Perlu upaya untuk melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat dengan pemodal besar maupun para retailer. Tantangan lainnya adalah penataan dan pembangunan pasar tradisional dan modern secara lebih merata, peningkatan penggunaan pasar lelang serta sistem resi gudang untuk membantu industri kecil, dan perlunya program pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai usaha mikro yang memiliki peran penting dalam mengurangi angka pengangguran.

Dalam rangka meningkatkan PDRB perdagangan, masih dirasakan kurangnya pemanfaatan pangsa pasar domestik, sehingga perlu upaya optimal dan terpadu dalam rangka pengembangan perdagangan di berbagai wilayah sub pelayanan Kota (SPK) sebagaimana diarahkan oleh RTRW 2012-2032.



Untuk pusat pertokoan dan pasar lingkungan, masih terbuka peluang pengembangan di SPK Citayam, Tapos dan Cimanggis. Toko modern berupa minimarket dan supermarket bisa dibangun di seluruh SPK. Sedangkan untuk hypermarket bisa dibangun di PPK Margonda dan seluruh SPK kecuali SPK Cipayung. Pusat Perbelanjaan dan Niaga masih bisa dikembangkan di SPK Sawangan, SPK Citayam, SPK Tapos, dan SPK Cimanggis. Adapun untuk Pengembangan Skala Regional, tantangan ke depan adalah membangun pasar induk di SPK Tapos, Pengembangan SNADA di SPK Citayam, dan Pembangunan pusat grosir di PPK Margonda. Melalui peningkatan infrastruktur dasar yang lebih merata, maka akan menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam sektor perdagangan sehingga tidak cenderung mengumpul di wilayah tertentu saja.

Seiring penguatan pasar domestik, tantangan lainnya adalah pengembangan pasar di level regional Jabodetabek. Dalam kerangka itu perlu dijalin kerjasama dengan daerah-daerah tetangga melalui kerjasama mutualisme dengan berbasis pada komoditas unggulan masing-masing, sehingga terhindar dari kompetisi tak sehat dan diharapkan dapat diwujudkan pembagian peran sebagai produsen dan pemasar serta pengeksport sehingga tercipta rantai suplai yang efisien.

Dalam bidang perdagangan luar negeri, perlunya upaya peningkatan hasil ekspor karena permintaan dunia yang terpengaruh krisis global. Masih banyak lagi tantangan di sektor perdagangan ini, yaitu perlunya peningkatan promosi produk industri Kota Depok, pentingnya aspek metrologi (kemetrologian legal), standardisasi produk ekspor dan impor, pengawasan barang, pengujian mutu dan pengaduan konsumen. Potensi ekonomi kreatif juga merupakan tantangan tersendiri yang menarik karena kontribusinya yang cukup signifikan terhadap PDRB Kota Depok (mencapai 12%). Depok dengan keunggulan sumberdaya manusianya, merupakan modal dasar penting untuk menunjang berkembangnya ekonomi kreatif. Dengan posisi letak geografis yang menguntungkan, serta sumberdaya manusia yang relatif baik, memungkinkan untuk tumbuhnya berbagai jenis jasa dan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi di Kota Depok.

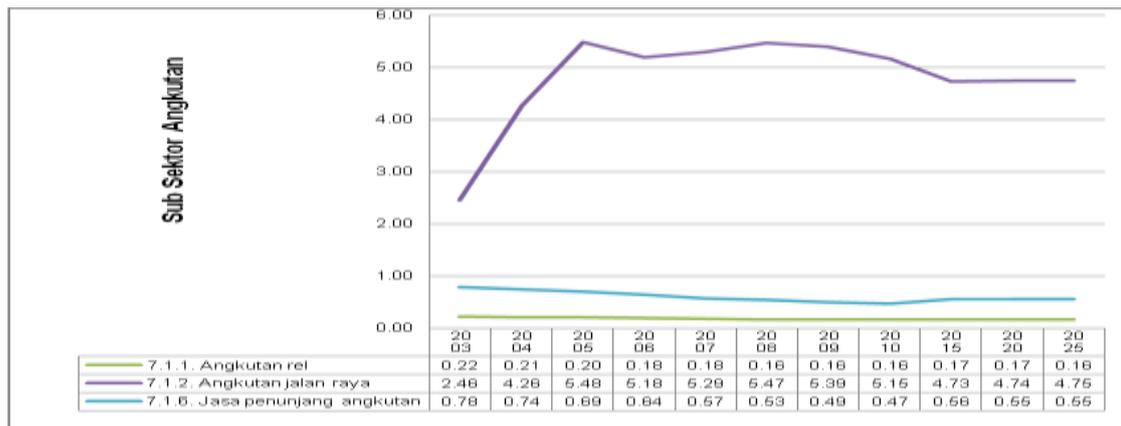


b) Angkutan dan Komunikasi

Salah satu potensi Kota Depok adalah sektor perhubungan. Jumlah angkutan, ijin trayek, dan jumlah penumpang yang ada merupakan investasi yang menunjang Pembangunan karena merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah. Lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat transportasi yang banyak diminati dikarenakan biayanya yang relatif murah dan cepat mencapai tujuan. Selain itu terdapat upaya perbaikan pelayanan oleh PT KAI, banyaknya pilihan kelas kereta api, jadwal yang relatif pasti, frekuensi keberangkatan setiap 15 menit, kejahatan di dalam kereta semakin berkurang, dan bebas dari pengasong dan pangamen. Di Kota Depok terdapat 5 Stasiun Kereta Api, antara lain Stasiun Kereta Api Pondok Cina, UI, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam.

Tantangan subsektor angkutan adalah mewujudkan transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek khususnya DKI Jakarta. Menurut RTRW 2012-2032, setidaknya ada 6 jalur transportasi massal yang harus diwujudkan dalam masa mendatang yaitu Angkutan Umum Massal Terminal Jatijajar-Raya Bogor-Kp. Rambutan, Angkutan Umum Massal Bojongsari-Ciputat-Lebak Bulus, Angkutan Umum Massal Terminal Jatijajar-Ir. H. Juanda-Cinere-Lebak Bulus, Angkutan Umum Massal Depok 2-Margonda Raya-Lt. Agung-Ragunan/Ps. Minggu, Angkutan Umum Massal Terminal Depok-Margonda Raya-Lt. Agung-Ragunan/Ps. Minggu, Angkutan Umum Massal Terminal Jatijajar-Ir. H. Juanda-Margonda Raya-Ragunan.

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, termasuk teknologi internet dan telepon seluler, menyebabkan komunikasi melalui pos menjadi tidak efisien dan relatif mahal. Total kiriman pos dari dan ke Depok, baik lokal maupun luar negeri diprediksikan akan terus menurun dimasa mendatang. Pertumbuhan subsektor pengangkutan dan komunikasi akan memberikan kontribusi yang terus meningkat. Diprediksi pada tahun 2015 sebesar 6,59%, tahun 2020 sebesar 6,63%, dan pada tahun 2025 sebesar 6,66%. Laju pertumbuhan subsektor angkutan dan komunikasi dalam lima tahun terakhir ini cukup tinggi, tumbuh 3,3% pada tahun 2007 kemudian melonjak tajam pada tahun 2011 mencapai 8,17%.

Grafik 4.16. Pertumbuhan Sektor Angkutan Kota Depok

Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS),2013

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi, tantangan ke depan menurut RTRW 2012-2032 adalah penyediaan hot spot Wi-Fi (*wireless fidelity*) di pusat-pusat kegiatan umum dan sosial, fasilitasi pengembangan data-center dan industri IT, penyediaan menara dan penataan sarana penunjang (*micro cell*) untuk penguatan sinyal frekuensi radio, pengembangan jaringan telekomunikasi kabel melalui penyediaan jaringan fiber optic yang terintegrasi dengan jaringan PJU, pengintegrasian prasarana telekomunikasi kabel dengan jaringan jalan, pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum pada kawasan pusat-pusat pelayanan kota, pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah tanah, penataan dan pengembangan zone cell terdiri maksimum 3 menara, dan pengendalian penggunaan menara.

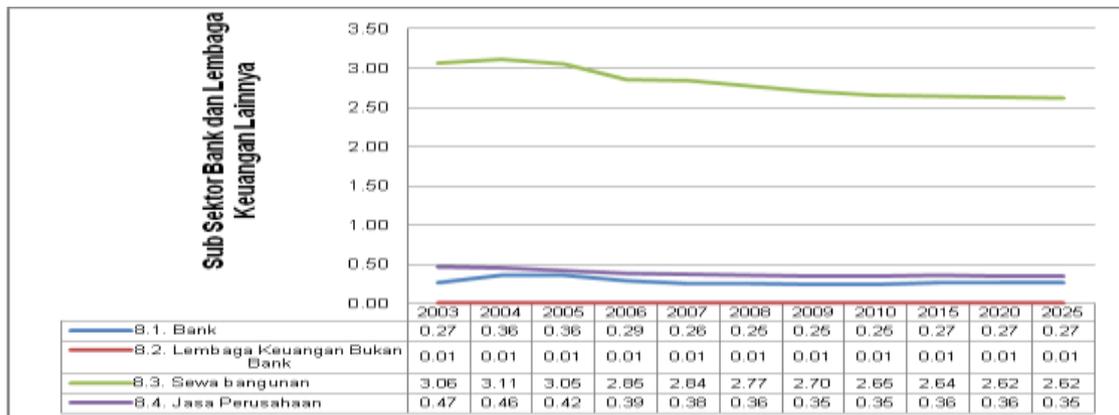
c) **Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan**

Perkembangan subsektor lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan didominasi oleh persewaan bangunan (mendekati 90% dari total lapangan usaha ini). Setelah itu menyusul jasa perusahaan, bank, dan terakhir lembaga keuangan non-bank. Secara keseluruhan dalam periode 2009-2013 terakhir subsektor ini tumbuhfluktuatif. Pada tahun 2009 tumbuh sebesar 4,63%, kemudian meningkat di tahun 2011 sebesar 12,01 dan menurun pada tahun 2012 menjadi 5,78.



Terakhir pada tahun 2013 tumbuh mencapai 7,37%, lebih cepat dibanding pertumbuhan subsektor perdagangan, hotel dan restoran. Grafik4.17 memperlihatkan tren perkembangan subsektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dalam kurun 2005-2025.

Grafik4.17. Perkembangan Lapangan Usaha Bank & Lembaga Keuangan lainnya



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

d) Jasa-Jasa

Subsektor Jasa-jasa terdiri dari Jasa pemerintahan Umum dan Jasa Swasta. Jasa swasta terdiri dari jasa perorangan dan rumah tangga, jasa hiburan dan rekreasi, dan jasa sosial kemasyarakatan. Kontribusi jasa pemerintahan umum lebih besar dibanding swasta, dan secara agregat memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 7,16% dengan laju pertumbuhan mencapai 5,36% (data tahun 2013).

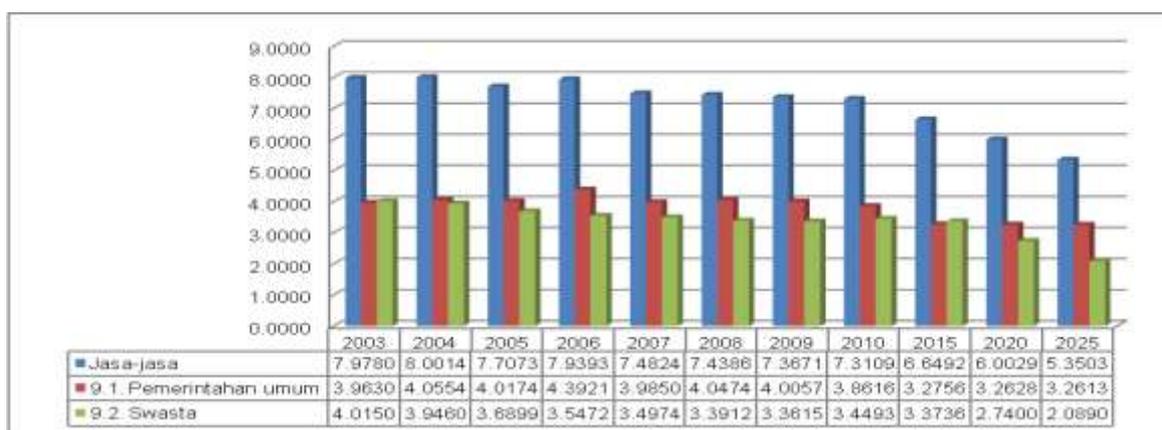
Berdasarkan data PDRB diketahui bahwa nilai jasa pemerintahan umum dari tahun ke tahun meningkat terus. Pada tahun 2005 nilai jasa pemerintahan umum adalah Rp. 302,981.37 juta dengan jumlah penduduk 1,374,522.00 orang, maka jasa pemerintahan umum per penduduk Depok adalah Rp. 22.042,67. Pada tahun 2010, jasa pemerintahan umum per penduduk meningkat menjadi Rp. 35.091,48, artinya jika pelayanan yang diberikan pemerintahan umum masih sama kualitas dan kuantitasnya dengan tahun 2005, maka pelayanan yang diberikan lebih mahal harganya. **Tabel 4.3** menunjukkan kecenderungan jasa pemerintahan umum di masa mendatang.

**Tabel 4.3. Estimasi Nilai Jasa Pemerintahan Umum di Kota Depok**

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2015	2020	2025
Jasa Pemerintahan umum	302.981,37	393.875,78	422.372,33	507.649,30	563.227,16	623.452,49	707.763,00	796.006,00	882.249,00
Jumlah Penduduk	1.374.522	1.420.480	1.470.002	1.503.677	1.536.980	1.736.565	2.054.938	2.415.013	2.775.088
Perbandingan	22,04	27,73	28,73	33,76	36,65	35,9	34,44	38,74	36,53

Sumber : Analisis Tim, 2013

Pertumbuhan jasa swasta paling tinggi disumbang oleh sektor swasta dari subsektor perorangan dan rumah tangga serta subsektor hiburan dan rekreasi. Perkembangan lapangan usaha jasa-jasa dapat dilihat pada **Tabel 4.3** yang menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari jasa pemerintahan umum, dan diperkirakan sampai tahun 2025 sumbangan jasa pemerintahan umum masih besar proporsinya. Sedangkan **Grafik 4.18** memperlihatkan bahwa sub-sektor perorangan dan rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam subsektor swasta dan kedua adalah sosial kemasyarakatan.

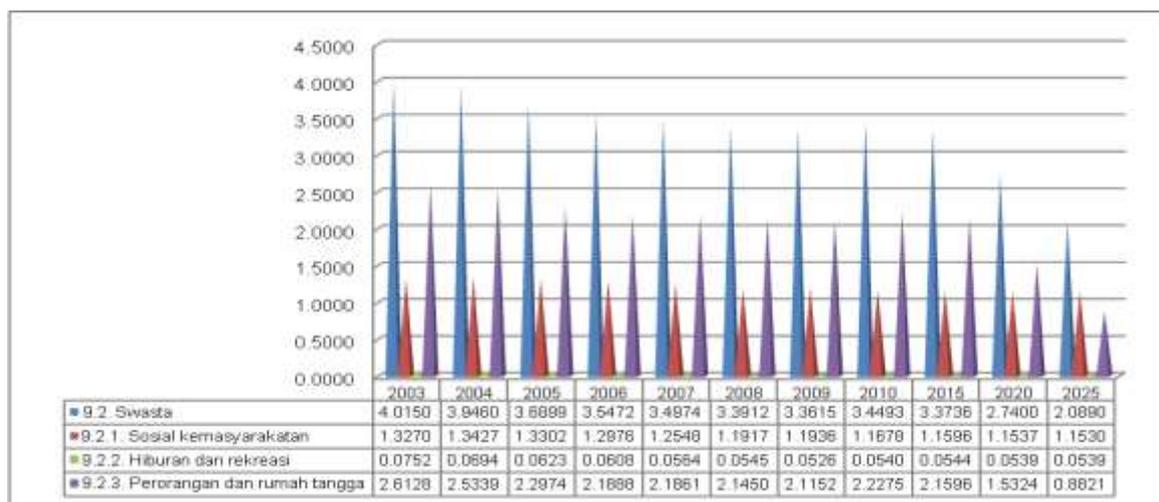
Grafik 4.18. Pertumbuhan Sektor Jasa Kota Depok

Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Sedangkan **Grafik 4.19** memperlihatkan tren perkembangan subsektor jasa swasta, di mana jasa perorangan dan rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dibanding jasa sosial kemasyarakatan dan hiburan/rekreasi. Jasa hiburan dan rekreasi masih berpotensi untuk lebih dikembangkan di Kota Depok tanpa harus menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat.

Secara lebih makro, hiburan dan rekreasi yang merupakan bagian dari pariwisata memang relatif kurang berkembang di Kota Depok sehingga perlu lebih dipacu melalui peningkatan rekreasi kuliner, air, alam, religius, budaya dan pendidikan. Standar pelayanan perkotaan mengamanatkan kecukupan sarana dan prasarana rekreasi dan olahraga berupa tempat-tempat rekreasi, gelanggang olahraga, gedung kesenian dan balai pertemuan.

Grafik 4.19 Perkembangan Lapangan Usaha Jasa-jasa di Kota Depok



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

4.3.2.5 Indeks Harga Implisit

Indeks Harga Implisit adalah suatu indeks harga yang menggambarkan perbandingan antara nilai produk atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan, sedangkan perubahan Indeks Harga Implisit mencerminkan tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu periode.

Perubahan Indeks Harga Implisit dapat dianggap lebih menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dibandingkan dengan indikator inflasi lainnya seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Sembilan Bahan Pokok. Hal ini disebabkan Indeks Harga Implisit sudah mewakili semua jenis harga yaitu harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran dan harga lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis harga yang dipergunakan dalam penghitungan nilai produksi setiap sektor.



Dari Tabel di bawah diperoleh bahwa pada tahun 2013 di Kota Depok telah terjadi inflasi (perubahan Indeks Harga Implisit) berbagai jenis produk sebesar 8,77 persen. Sektor yang mengalami inflasi terbesar adalah sektor Angkutan dan Komunikasi sebesar 18,82 persen, sedangkan yang terendah adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 4,83 persen.

Tabel 4.4 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Kota Depok Tahun 2009-2014

SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014)*
A. PRIMER	178,47	190,81	195,29	206,01	233,89	190,81
1. PERTANIAN	178,47	190,81	195,29	206,01	233,89	190,21
2. PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN	-	-	-	-	-	-
B. SEKUNDER	206,71	224,05	233,50	241,45	257,64	224,05
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	204,12	222,58	234,09	242,18	255,98	222,58
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	317,65	330,73	334,63	342,30	391,57	330,73
5. BANGUNAN	170,24	183,49	187,26	193,14	205,37	183,49
C. TERSIER	256,58	275,43	285,73	299,85	331,09	275,43
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	266,82	288,48	298,61	316,22	349,75	288,48
7. ANGKUTAN & KOMUNIKASI	291,48	300,21	312,40	314,72	373,93	300,21
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	196,90	209,02	214,51	221,02	231,70	209,02
9. JASA - JASA	222,03	238,68	251,10	261,30	274,82	238,68
PDRB KOTA DEPOK	229,44	247,64	257,80	268,64	292,20	247,64
Inflasi Depok	5,57	7,93	4,10	4,20	8,77	5,57
PDRB PROVINSI JAWA BARAT	217,47	227,37	239,46	250,93	259,84	
Inflasi Jawa Barat	13,31	4,55	5,32	4,79	3,55	

*) Data Sementara PDRB Kota Depok Tahun 2014 (BPS, 2015)

Untuk kelompok sektor, inflasi terbesar adalah sektor primer, kedua sektor Tersier, sedangkan yang terendah sektor Sekunder. Perkembangan Inflasi Kota Depok Tahun 2009-2014 dapat dilihat pada **Grafik 4.20**.

Grafik 4.20. Perkembangan Inflasi Kota Depok



Sumber : Diolah dari PDRB Kota Depok 2014(BPS,2015)

4.3.3 Kualitas Lingkungan Hidup

Kota berkelanjutan dibangun dengan kepedulian dan memperhatikan aset-aset lingkungan, memperhatikan penggunaan sumber daya, dan meminimalisasi dampak dari kegiatan-kegiatan tersebut. Persoalan yang muncul pada kawasan cepat tumbuh adalah seringkali mendorong semakin membesarnya emisi karbon di kota yang dampaknya akan mengganggu lingkungan melalui perubahan cuaca yang ekstrem. Oleh sebab itu mainstream pembangunan kota harus mengawal pertumbuhannya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menahan sebesar mungkin kegiatan-kegiatan pelepasan karbon hasil residu kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan kota yang pesat juga membawa konsekuensi berupa meluasnya lahan-lahan yang digunakan untuk menampung pertumbuhan Kota, sehingga memicu semakin terbatasnya ruang-ruang terbuka hijau, polusi udara, air dan pengelolaan lahan. Berkurangnya lahan pertanian untuk kegiatan sektor lain (khususnya perumahan), menyebabkan berkurangnya potensi RTH Kota. Pertumbuhan kota yang diiringi penduduk yang besar juga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan Lingkungan hidup perkotaan. Padahal semakin berkembang dan maju suatu Kota, seharusnya tingkat kenyamanan hidup di kota tersebut semakin meningkat. Kondisi inilah yang harus menjadi identitas Kota Depok di masa depan, menjadi Kota yang berkembang & maju diiringi tingkat *livability* yang tinggi.



Tantangan paling konkret dalam aspek lingkungan hidup di Kota Depok adalah potensi pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah baik oleh masyarakat maupun industri. Tempat yang menjadi sasaran pencemaran adalah sungai, saluran, situ dan lahan kosong di masyarakat. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas udara, juga memberi sinyal awal perlunya perhatian terhadap optimalisasi program langit biru. Cakupan penanganan sampah sampai tahun 2015 mencapai 63,7%, hal ini masih belum memadai untuk menjamin kesehatan lingkungan akibat timbulan sampah yang tak terangkut atau terbuang di tempat tidak semestinya. Demikian halnya dengan pelayanan limbah cair, masih dirasakan belum memadai sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Perlu upaya lebih akseleratif dalam meningkatkan manajemen sampah dan limbah ini khususnya dalam rangka mengejar standar pelayanan minimal perkotaan.

Tantangan lainnya dalam bidang lingkungan hidup adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, penegakan Hukum Lingkungan, dan peningkatan mitigasi bencana melalui penyediaan sarana dan prasarana hidran umum, pos damkar, dan pusat evakuasi bencana. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengendalian lingkungan hidup, Kota juga harus segera memiliki sarana monitoring polusi udara dan laboratorium penelitian lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Standar Pelayanan Perkotaan.

4.3.4 Ekonomi Kreatif dan UMKM Berbasis Potensi Lokal

4.3.4.1. Ekonomi Kreatif

Potensi lain Kota Depok adalah ekonomi kreatif, seiring dengan trend masyarakat dunia yang sedang memasuki transformasi besar dalam ekonomi. Ekonomi kreatif tidak mengandalkan sumberdaya alam melainkan sumberdaya manusia, oleh karena itu, kota, kabupaten, atau provinsi perlu lebih menumbuhkan "iklim orang-orang" daripada iklim bisnis dalam menarik iklim investasi ekonomi kreatif. *Creative city* adalah sebuah tempat di mana orang merasakan, bahwa mereka bisa berpikir bertindak, berencana dengan imajinasi.



Hal itu membutuhkan adanya budaya toleransi pada perbedaan, toleransi pada perubahan, dan pada banyak hal sehingga semua orang bisa berkembang dan mengembangkan diri. Untuk membentuk brand kota yang kreatif, bisa dimulai dengan cara mengidentifikasi dan mengenali ciri khas Kota tersebut, tidak meniru dari Kota lain, karena apa yang sukses di sebuah Kota belum tentu cocok dan pas untuk diterapkan di Kota lainnya.

Pengembangan ekonomi kreatif di Kota Depok dapat dilakukan melalui :

- a) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan kapabilitas, integritas, dan kreativitas yang tinggi sehingga memungkinkannya untuk memahami realitas pembangunan dan ikut memacu pertumbuhan ekonomi perkotaan.
- b) Pengembangan sikap kepemimpinan yang mampu mengakomodasi semua potensi dan permasalahan yang ada sebagai modal utama dalam pembangunan perkotaan, serta mampu menggerakkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat.
- c) Mengembangkan kebebasan berfikir, ekpresi kreativitas dan gagasan untuk meningkatkan peran SDM dalam pembangunan.
- d) Pengembangan budaya organisasi sehingga menghasilkan cara-cara berpikir, berperasaan dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi, dengan membawa suatu identitas sendiri.
- e) Penggalan dan penguatan identitas lokal (ciri khas) yang dapat dijadikan sebagai salah satu modal pembangunan.
- f) Penyediaan ruang perkotaan dan kelengkapan fasilitasnya yang dapat mendorong SDM untuk membangun perkotaan yang kreatif.
- g) Penciptaan dinamika jejaring, kerjasama dan kemitraan yang dapat menginspirasi ide kreatif bersama dalam pembangunan perkotaan.
- h) Penggunaan Teknologi Informasi untuk akselerasi ekonomi



Berdasarkan data BPS Kota Depok, PDRB ekonomi kreatif cukup besar yang berpotensi untuk lebih dikembangkan lagi. Pada 2013 mencapai 11,73 persen atau Rp. 2,7 triliun, khusus kuliner, PDRB-nya mencapai Rp. 228,43 miliar yang sekarang ini terpusat di kawasan Margonda. Potensi ekonomi kreatif lainnya adalah fashion, percetakan dan kerajinan dan aplikasi start-ups.

Laju pertumbuhan PDRB ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai alat ukur perkembangan ekonomi kreatif. Secara umum pada tahun 2011 laju pertumbuhan PDRB ekonomi kreatif Kota Depok atas harga dasar berlaku sebesar 9,81 %, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar 6,55% sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 PDRB Kreatif Kota Depok dan Laju Pertumbuhan ekonomi kreatif Tahun 2013

No.	Sektor	PDRB Kreatif		Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	
		Atas Harga Berlaku (juta rupiah)	Atas Harga Konstan 2000 (juta rupiah)	Atas Harga Berlaku	Atas Harga Konstan 2000
1	Periklanan	51.850,16	19.955,82	9,68	5,32
2	Arsitektur	20.776,16	7.461,13	11,08	3,49
3	Pasar Barang Seni	28.640,66	9.067,96	14,2	4,44
4	Kerajinan	857.512,43	293.227,20	17,16	6,62
5	Desain	76.505,58	26.963,33	14,92	8,42
6	Fesyen	870.173,63	298.711,65	14,16	8,76
7	Film, Video dan Fotografi	78.217,40	28.693,45	10,02	3,27
8	Permainan Interaktif	103.000,00	41.247,88	7,61	3,09
9	Musik	102.490,40	38.493,08	10,03	4,91
10	Seni Pertunjukan	69.310,53	22.970,64	6,69	2,13
11	Penerbitan dan Percetakan	134.462,20	48.214,11	14,64	8,82
12	Layanan Komputer dan Piranti Lunak	47.939,24	18.515,27	14,47	4,66
13	TV dan Radio	1.270,88	454,55	15,87	7,96
14	Riset dan Pengembangan	57.400,66	21.408,97	9,12	3,68
15	Kuliner	228.437,41	99.983,62	18,93	8,98
Jumlah PDRB		2.727.987,34	975.368,66	14,54	7,04

Sumber : PDRB ekonomi Kreatif Kota Depok Tahun 2014 (BPS)



Kontribusi PDRB ekonomi kreatif terhadap Total PDRB Kota Depok pada Tahun 2013 sekitar 11,73%. Sektor yang paling mendominasi ekonomi kreatif di Kota Depok adalah sektor fesyen, kerajinan dan kuliner. Kontribusi ketiga sektor tersebut mencapai 71,70 % dari PDRB ekonomi kreatif atau sekitar 8,41 % dari Total PDRB. Sehingga sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan kedepan adalah ketiga sektor tersebut.

4.3.4.2 Ekonomi Lokal

Tantangan lain Kota Depok adalah pengembangan ekonomi lokal, yaitu pembangunan yang memberi penekanan pada pengembangan sumberdaya lokal sesuai dengan potensi lokal. Pengembangan ekonomi lokal menghargai kemajemukan dan keanekaragaman potensi lokal, mengedepankan kemampuan tata kelola dan kearifan lokal sehingga menghasilkan produk yang berkelanjutan dan menjamin terjaganya inisiatif lokal. Perekonomian lokal dapat dibagi menjadi dua sektor perekonomian, yaitu sektor basis dan non basis. Kegiatan pada sektor basis merupakan kegiatan yang mengeksport barang-barang dan jasa-jasa ke luar batas Wilayah perekonomian. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam wilayah yang bersangkutan. Makin banyak sektor basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan dari luar daerah ke dalam daerah yang bersangkutan, sehingga akan menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor non basis, demikian pula sebaliknya. Sektor basis mempunyai peranan sebagai penggerak utama (*prime mover role*) perekonomian Wilayah melalui efek multiplier.

Proses berkembangnya perekonomian lokal meliputi empat tahap. Pertama, tumbuhnya kewiraswastaan (*entrepreneurship*) lokal. Kedua, lepas landasnya (*take off*) perusahaan-perusahaan lokal. Ketiga, berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut keluar lokalitas, dan keempat, terbentuknya suatu perekonomian wilayah yang mengakar pada kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan-keunggulan komparatif aktifitas ekonomi lokal tersebut.



Local economic development menekankan sebanyak mungkin menggunakan aspek lokalitas dalam pembangunan, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan kelembagaan. Indikator yang digunakan adalah besarnya kesempatan kerja di daerah tersebut sehingga pengembangan ekonomi lokal lebih dapat menjawab permasalahan pengangguran perkotaan. Sumberdaya manusia atau pelaku yang penting dilibatkan dalam pengembangan ekonomi lokal adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam perkembangannya, keberadaan dan produktivitas UKM di Kota Depok makin meningkat meskipun relatif lambat.

4.3.4.5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi Nasional.

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Depok cukup positif, namun masih dihadapkan pada banyaknya keterbatasan sehingga menyulitkan mereka dalam memainkan perannya dalam perekonomian Daerah. Kelemahan dimaksud, adalah:

1. Kekurangmampuan dalam menangkap peluang pasar yang ada dan dalam memperluas pangsa pasar;
2. Kekurangmampuan dan keterbatasan dalam mengakses sumber dana (modal) dan kelemahan dalam Struktur permodalan;
3. Rendahnya kemampuan dalam bidang organisasi dan manajemen Sumber Daya Manusia; dan
4. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antarpelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.



Kelemahan-kelemahan yang bersifat struktural tersebut perlu diatasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, program pembinaan yang lebih terpadu, serta pentingnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan pemberdayaan UMKM hendaknya tidak dikemas secara charity, melainkan harus dengan upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha tersebut. Menurut standar pelayanan perkotaan (SPP), kota perlu memberikan fasilitas ruang untuk sektor informal dan usaha mikro dan kecil sebagai upaya membantu mereka dalam bidang pemasaran.

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM mendatang adalah 1) Meningkatnya produktivitas UMKM 2) Meningkatnya proporsi usaha kecil formal; 3) Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya; 4) Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 5) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.

Kebijakan yang perlu dikembangkan adalah memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan; memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi; meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi; mengembangkan UMKM melalui pendekatan kluster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif; mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM; mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap Daerah;



Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak; Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

4.3.5 Tata Kota

4.3.5.1. Permukiman

Permasalahan perumahan yang menonjol adalah masih adanya kawasan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni serta masih banyak warga Kota Kota Depok yang belum memiliki rumah. Menurut standar pelayanan perkotaan, Pemerintah Kota wajib menyediakan rumah layak huni atau rumah susun terjangkau bagi warga kurang mampu sehingga mencegah munculnya kawasan pemukiman kumuh di perkotaan. Berdasarkan tabel dibawah ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 34,07 persen yang belum memiliki rumah. Kondisi ini menunjukkan perlunya peran pemerintah menyediakan rumah sehat yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel 4.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal Tahun 2006-2013

Status Penguasaan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Milik sendiri (%)	67,69	64,59	57,34	64,87	66,27	66,58	74,12	65,93
Kontrak (%)	20,37	15,96	11,91	11,3	8,06	6,81	4,25	3,28
Sewa (%)	1,72	6,95	20,9	14,19	14,33	15,13	17,25	18,89
Bebas sewa milik orang lain (%)	0,14	1,19	2,01	1,17	1,19	2,47	3,13	2,21
Bebas sewa milik orang tua/ sanak/saudara (%)	7,67	10,86	7,41	8,18	9,55	7,7	0	7,78
Dinas (%)	2,28	0,15	0,29	0,15	0,45	1,3	1,26	1,71
Lainnya (%)	0,13	0,3	0,14	0,15	0,15	0	0	0,21

Sumber: Inkesra Kota Depok (BPS) Tahun 2014



Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032 menyebutkan bahwa pemanfaatan lahan terbangun didominasi oleh kegiatan perumahan dan permukiman. Menurut sifat kegiatannya, perumahan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Perumahan yang tumbuh dan berkembang tidak tertata dalam skala ruang yang relatif kecil atau yang disebut perumahan swakelola;
2. Perumahan yang tumbuh dan berkembang dibangun secara massal oleh perusahaan atau lembaga pengembang dalam skala ruang yang relatif besar dengan berbagai kelengkapan sarana sosial yang umumnya disebut perumahan formal.

Masing-masing kegiatan perumahan mempunyai pola sebaran berbeda. Untuk perkampungan yang berada di sekitar pusat kota pada umumnya menunjukkan pola sebaran menerus rapat, sedangkan di lokasi-lokasi lainnya yang relatif jauh dari pusat kota pada umumnya mempunyai pola kluster, sedangkan kompleks perumahan pada umumnya pola pengembangannya tidak menerus dan menyesuaikan terhadap luas dan bentuk lahan yang berhasil dibebaskan.

Kebutuhan sarana hunian pada tahun 2026 di Kota Depok diperkirakan mencapai 472.039 unit dan kebutuhan lahan seluas 70.805.826 ha dengan perincian sebagai berikut :

1. Kavling/Rumah Besar sebanyak 47.204 unit dengan luas lahan 14.161.165 ha;
2. Kavling/Rumah Menengah sebanyak 141.612 unit dengan luas lahan 28.322.330 ha;
3. Kavling/Rumah Kecil sebanyak 283.223 unit dengan luas lahan 28.322.330 ha.

Berikut ini disajikan proyeksi kebutuhan rumah berdasarkan proporsi rumah berimbang tahun 2011–2026 pada **Tabel 4.7**.

**Tabel 4.7. Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kota Depok Tahun 2011-2026**

TAHUN	KEBUTUHAN RUMAH (UNIT)				KEBUTUHAN LAHAN (m ²)			
	KAV. BESAR	KAV. MENENGAH	KAV. KECIL	TOTAL	KAV. BESAR	KAV. MENENGAH	KAV. KECIL	TOTAL
2011	10.298	30.894	61.788	102.980	3.089.391	6.178.782	6.178.782	15.446.956
2016	22.315	66.945	133.891	223.151	6.694.534	13.389.067	13.389.067	33.472.668
2021	32.351	97.054	194.109	323.514	9.705.428	19.410.857	19.410.857	48.527.142
2026	47.204	141.612	283.223	472.039	14.161.165	28.322.330	28.322.330	70.805.826

Sumber : Naskah Akademis RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

Tantangan lainnya adalah akses air bersih bagi masyarakat, yang sebagian besar masih bertumpu pada air bawah tanah. Kinerja PDAM Kota Depok masih relatif terbatas dalam melayani kebutuhan air bersih. Arah kebijakan RTRW menyangkut air minum mengarah pada pelayanan dengan sistem perpipaan, sehingga meminimalisir penggunaan sumber-sumber air bersih non perpipaan secara sporadis (potensial mengurangi cadangan air tanah). Data perkembangan pemanfaatan air bersih dapat dilihat pada **Tabel 4.8**

Tabel 4.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Depok Tahun 2006-2013

Jenis	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Air Kemasan (%)	10,39	7,46	24,17	19,51	27,31	37,32	44,5	47,5
Leding (%)	13,53	6,72	4,73	7,45	7,16	1,67	2,26	3,39
Pompa (%)	56,55	69,6	67,37	58,91	61,95	57,61	47,82	46,56
Sumur terlindung (%)	10,83	15,46	1,87	13,26	3,28	3,08	5,03	2,21
Sumur tak terlindung (%)	2,56	0,77	1,44	0,15	0	0,32	0	0,07
Mata air terlindung (%)	6,01	0	0	0	0	0	0,39	0,12
Mata air tak terlindung (%)	0,13	0	0	0	0	0	0	0
Lainnya (%)	0	0	0,43	0,37	0,3	0	0	0,15

Sumber : Diolah dari Inkesra (BPS) Tahun 2014



Permasalahan lain dalam bidang perumahan adalah persampahan dan limbah cair, baik dalam hal manajemen maupun kurangnya sarana prasarana. Target RPJMN maupun RPJMD bahwa pada tahun 2014 tersedia akses terhadap pengelolaan sampah bagi 70-80% rumah tangga di perkotaan, akan sulit dicapai karena sampai saat ini baru terlayani sekitar 48%. Kondisi sarana dan prasarana persampahan perlu ditingkatkan karena TPS yang ada belum dapat menangani seluruh sampah yang ada. Demikian halnya dengan armada/truk sampah sehingga sampah sering terlambat. Pada tingkat kawasan sudah dilakukan pengolahan sampah Organik menjadi kompos, namun pelaksanaannya belum didukung oleh SOP sehingga hasilnya belum optimal. TPA juga sudah mendekati batas kapasitasnya sehingga perlu segera dicarikan alternatif lokasi yang tepat secara teknis, Lingkungan dan sosial.

Pengelolaan sampah oleh masyarakat merupakan amanat UU No. 18 tahun 2008 dan merupakan salah satu cara mengurangi beban TPA, mengurangi pencemaran lingkungan, dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya perilaku masyarakat masih kurang mendukung, hal itu tampak dari kebiasaan buang sampah masyarakat yang belum sesuai harapan : 38,96% dibakar, 33,70% dikubur lubang, 17% di TPS, sisanya dibuang ke kebun, sungai, dll. Masyarakat juga hanya 9% yang sudah memilah, sedangkan 69% tidak memilah. Banyak terjadi okupasi lahan kosong menjadi TPS liar (tercatat sejumlah 71 Titik, 2010) di masyarakat, dan sampah di TPS liar dibakar atau dibiarkan menumpuk oleh masyarakat setempat.

Limbah cair juga tak kalah rumit masalahnya karena terbatasnya sarana dan prasarana. IPLT Kalimulya adalah satu-satunya unit pengelolaan akhir air limbah di Kota Depok. Dengan kapasitas yang ada ($70 \text{ m}^3/\text{hari}$) IPLT Kalimulya hanya dapat melayani ± 600.000 jiwa atau $\pm 33\%$ penduduk Depok, sehingga kapasitasnya perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas tersebut perlu diimbangi dengan penambahan truk atau motor sedot tinja. Keberadaan motor sedot tinja merupakan solusi untuk melayani wilayah-wilayah padat yang tidak dapat dilalui truk tinja. Sasaran RPJMN maupun Permen PU yang mengamanatkan tersedianya sistem air limbah setempat (IPLT) yang memadai sebesar 60-65 % pada tahun 2014 akan sulit dicapai.



Selain sarana prasarana, masalah lainnya adalah manajemen, di mana perlu ada penguatan struktur organisasi dan tupoksi pengelola air limbah yang lebih jelas, serta peningkatan SDM pengelola IPLT.

Di tingkat masyarakat, kesadaran terhadap penanganan limbah yang benar juga masih harus ditingkatkan. Meskipun 93,8% punya jamban sendiri, sisanya masih ada yang menggunakan cubluk, sungai, kebun, selokan, WC helikopter, dll. Sebanyak 88,66% warga mempunyai septic-tank namun 66% septic tank tak pernah dikosongkan, 20% mengosongkan, sisanya tidak tahu kalau harus dikosongkan. Sebanyak 11,44% warga membuang air limbah dike kolam, cubluk, sungai, dll. Sasaran RPJMN yang menargetkan bebas buang air besar sembarangan di akhir tahun 2014 tampaknya sulit dicapai.

Di kota-kota metropolitan dan besar secara bertahap dikembangkan sistem air limbah terpusat (*sewerage system*) dengan target tersedianya akses terhadap sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off-site*) bagi 10% total penduduk, baik melalui SPAL terpusat skala kota sebesar 5% maupun SPAL terpusat skala komunal sebesar 5%. Permen PU no 14 th 2010 menyatakan bahwa SPM air limbah perpipaan skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5% pada tahun 2014. Target ini akan sulit dicapai jika tidak ada komitmen tinggi untuk membenahi masalah ini. Hal itu terlihat dari masih lemahnya pemahaman semua pihak terhadap pengelolaan air limbah domestik, khususnya *blackwater*, terbukti besaran anggaran, jumlah dokumen perencanaan dan aturan, serta partisipasi masyarakat masih sangat minim. Untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang cepat maka Depok harus memikirkan strategi pengelolaan dan mulai mempersiapkan infrastruktur air limbah terpusat skala kawasan/kota. RTRW 2012-2032 telah merancang indikasi program pengembangan sistem pengelolaan air limbah melalui IPLT, IPAL komunal, pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem jaringan Drainase, dan pengembangan Pengolahan dan Lokasi pengumpulan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).



Dalam bidang persampahan, tantangan ke depan adalah mewujudkan Pengembangan pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu melalui pendekatan 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace*), Pemanfaatan TPPAS Nambo, Pembangunan TPA baru Pasir Putih dan SPA Tapos, dan Optimalisasi pengelolaan sampah menggunakan UPS.

4.3.5.2. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai kawasan andalan dengan keunggulan bidang perdagangan dan jasa. Terkait dengan letak kota, Depok berkembang menjadi “*Dormitory Town*” bagi Kota Jakarta yang merupakan Pusat Pemerintahan.

Masalah utama penataan ruang kota adalah implementasi di lapangan yang sering meleset. Oleh sebab itu upaya pengawasan dan pengendalian harus lebih diintensifkan. Tantangan bidang penataan ruang makin besar karena harus menyediakan ruang untuk sektor informal, lansia, pejalan kaki dan penyandang cacat selain ruang publik atau RTH sebagaimana diamanatkan oleh UU Tataruang. Ruang publik adalah ruang yang dapat diakses oleh penduduk kota secara bebas, dapat membentuk suasana vibrant yang hangat dan egaliter (sama bagi semua penduduk kota). Tetapi pandangan tentang ruang Publik saat ini telah bergeser dengan munculnya pemikiran ruang kota sebagai faktor produksi di mana yang dilihat adalah nilai tukarnya (*exchange value*).

Arah pengembangan Kota Depok menjadi kota niaga, jasa dan pendidikan menimbulkan dampak potensial yang kompleks dipengaruhi oleh faktor internal kota Depok dan juga faktor eksternal Kota Depok. Potensi masalah perkotaan yang dihadapi Depok antara lain pertumbuhan penduduk tinggi yang disebabkan oleh migrasi penduduk yang tinggi.



Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut tersedianya perumahan dan fasilitas lainnya yang membutuhkan ruang Kota yang tinggi pula. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berpotensi memunculkan ketidakseimbangan Lingkungan hidup dengan makin sempitnya ruang terbuka hijau.

Masalah lainnya adalah kemacetan lalu lintas, ketersediaan dan kualitas air bersih; pengelolaan sampah domestik; kualitas udara, iklim mikro (suhu dan kelembaban); serta bencana banjir. Alokasi kawasan permukiman dan kawasan terbangun yang dominan yaitu sebesar 185,81 km² (92,8%) (*Sumber: KLHS RTRW Kota Depok Tahun 2011 dari Citra Landsat Kota Depok Liputan Tanggal 22 April 2011*), memberikan permasalahan ketidakseimbangan fungsi kelestarian (Ekonomi-Sosial-Ekologi) bagi keberlanjutan pembangunan Kota Depok.

4.3.6 Ketahanan Keluarga dan Sosial Kemasyarakatan

4.3.6.1. *Perlindungan Anak*

Isu perlindungan anak dalam 5 tahun terakhir cukup mengemuka sebagai bagian dari pembangunan sumberdaya manusia dan hak asasi.

Dalam hal perlindungan anak, terdapat perkembangan yang positif seiring dengan pencanangan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA). Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan kabupaten/ kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Adapun Tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi Wilayah Kabupaten/Kota.



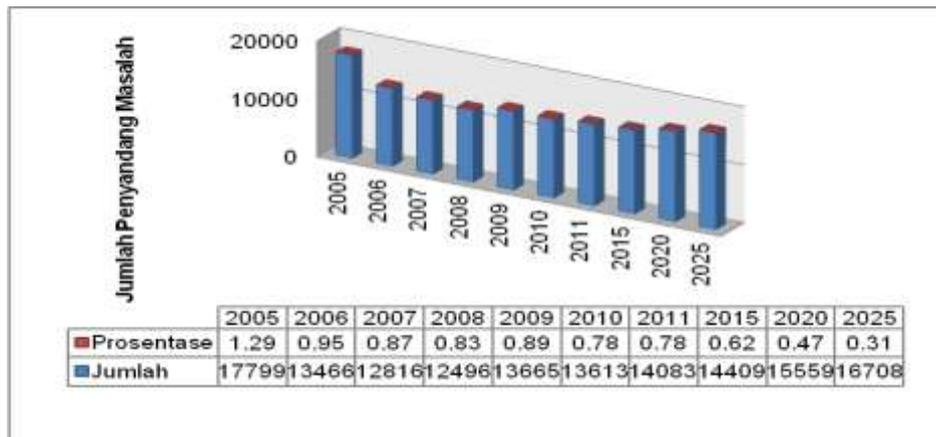
Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Depok perlu terus diperluas cakupannya, dari RW Layak Anak hingga ke tingkat Kelurahan Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan akhirnya terwujudlah Kota Layak Anak. KLA dikembangkan karena anak merupakan investasi SDM yang harus tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi. Mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan yang diharapkan bisa membawa bangsa menuju pada kemajuan. Pemerintah telah menjamin hak-hak dan kewajiban anak-anak Indonesia melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Selain itu, anak-anak juga berhak memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Untuk mewujudkan hal itu, maka perlu diciptakan kawasan bermain anak. Fasilitas bermain bisa merangsang kecerdasan anak, tidak hanya kecerdasan kognitif dan kecerdasan sosial, tetapi juga kecerdasan fisik/keterampilan kinestetik.

4.3.6.2. Sosial

Pesatnya pembangunan di kawasan Kota juga menyimpan potensi bagi munculnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial akibat urbanisasi dan kompetisi yang ketat dalam bidang ekonomi di kota. Meskipun persentase angka PMKS kecil, secara nominal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 terdapat 17.799 orang PMKS, menurun pada tahun 2011, namun diperkirakan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 14.409 orang, 15.559 orang pada tahun 2020, dan naik menjadi 16.708 orang pada tahun 2025.

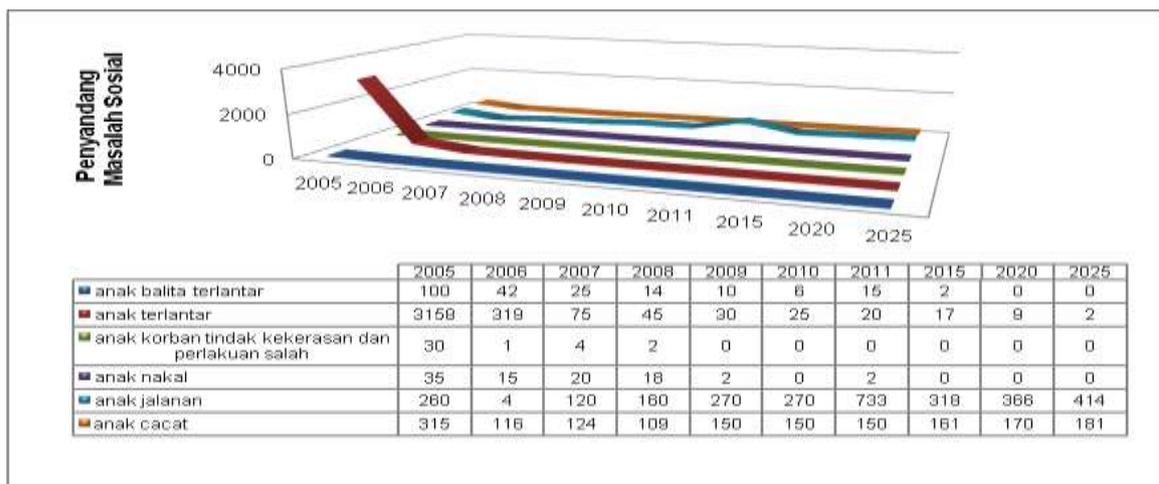
Diperkirakan jenis masalah sosial yang akan dihadapi di masa depan, diurutkan dari jumlah penyandang yang paling banyak, adalah anak terlantar, orang jompo, penderita penyakit kronis, dan korban narkoba. Secarag grafis, perkembangan jumlah penyandang masalah sosial dapat dilihat pada **Grafik 4.21**.

Grafik4.21. Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Depok



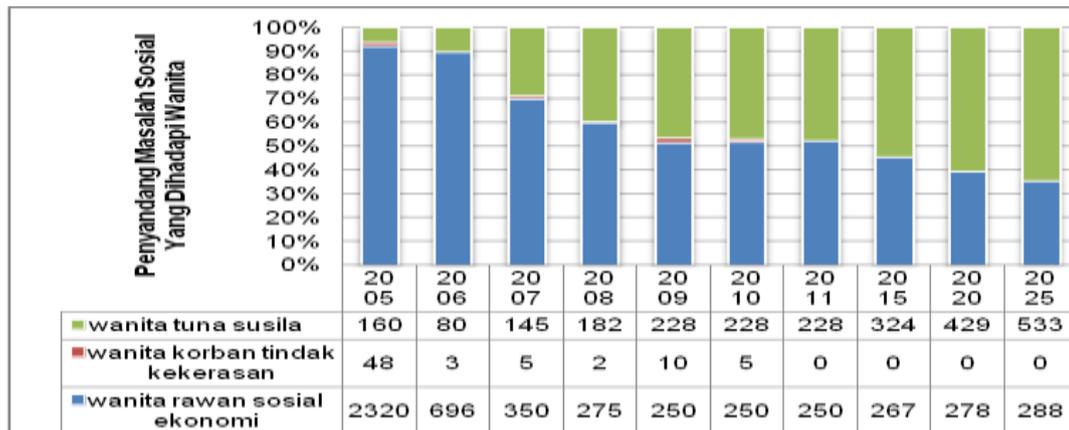
Penyandang masalah sosial di tingkat anak-anak paling banyak adalah anak jalanan, anak terlantar dan anak cacat. Masalah anak jalanan dan anak cacat memiliki kecenderungan meningkat sampai tahun 2025 hal ini dikarenakan semakin beratnya kehidupan dan perekonomian (**Grafik4.22**).

Grafik 4.22. Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial Anak-anak di Kota Depok

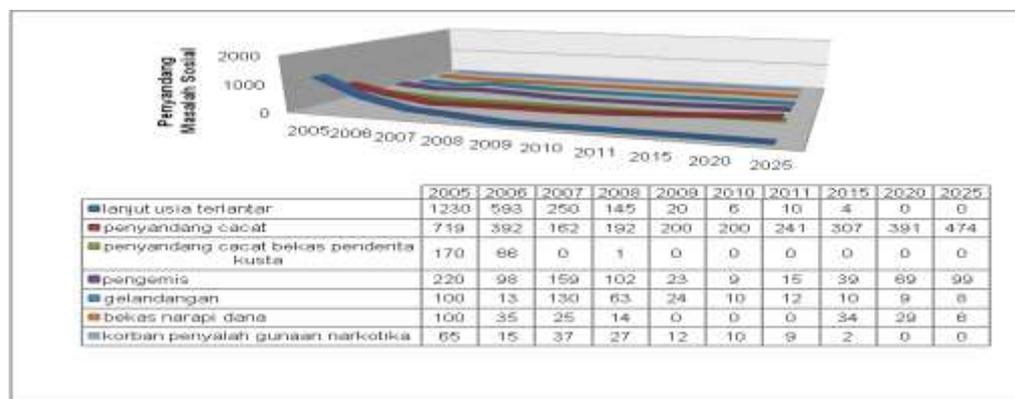


PMKS lainnya yang merupakan korban dari permasalahan ekonomi adalah wanita, karena umumnya wanita tidak bekerja dan banyak faktor lainnya. Permasalahan yang sering terjadi adalah munculnya wanita tuna susila yang menunjukkan estimasi makin meningkat sebagaimana tercantum pada**Grafik4.23**. Sementara itu, **Grafik4.24** menunjukkan perkiraan PMKS yang akan menonjol keberadaannya di masa depan, yaitu penyandang cacat dan pengemis.

Grafik 4.23. Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial Yang Dihadapi Wanita di Kota Depok sampai tahun 2025



Grafik 4.24. Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kota Depok sampai dengan tahun 2025



4.3.7 Ketimpangan

PDRB Per Kapita Dan Indeks Gini

Indikator makro yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita, makin tinggi angka tersebut maka secara rata-rata masyarakat makin sejahtera. Selama 10 tahun terakhir, PDRB perkapita Kota Depok (atas dasar harga konstan) mengalami peningkatan dari Rp. 3.113.484 pada tahun 2001 menjadi Rp. 4.192.326 pada tahun 2014. Pernah mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2010 tetapi naik kembali pada tahun 2011 dan 2012.

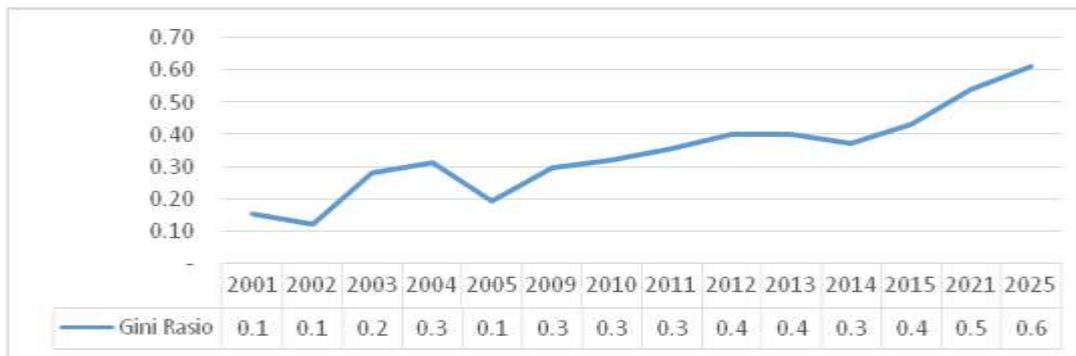
Sedangkan PDRB per kapita atas harga berlaku pada tahun 2014 mencapai Rp. 13.147.009 mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 yang masih sebesar Rp. 9.825.302. Kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan daya beli masyarakat Kota Depok secara umum.

Grafik. 4.25 Perkembangan PDRB per Kapita di Kota Depok



umber : Diolah dari Inkesra Kota Depok 2006 dan PDRB Kota Depok 2013(BPS,2014)

PDRB per kapita yang tinggi tidak serta-merta dinikmati oleh seluruh warga masyarakat. Pemerataan pendapatan yang diukur dengan indikator gini ratio, menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Depok pernah mengalami perbaikan (pendapatan merata), namun pada tahun 2011 indeks gini menunjukkan tidak meratanya pendapatan masyarakat. Perlu upaya untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara penduduk mampu dengan yang kurang melalui pemerataan pembangunan Wilayah, pemberdayaan masyarakat dan kemudahan akses terhadap sumberdaya modal dan pasar. Grafik perkembangan gini ratio di Kota Depok sampai tahun 2025 dapat dilihat pada **Grafik 4.26**.

Grafik 4.26 Proyeksi Indeks Gini Sampai Dengan Tahun 2025

Sumber : Diolah dari Inkesra Kota Depok 2006 dan PDRB Kota Depok 2014(BPS,2015)

4.3.8 Kemiskinan dan Pengangguran

4.3.8.1 Kemiskinan

Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun tidak serta merta seluruh penduduk menikmati hasil pertumbuhan tersebut. Hal itu terlihat dari masih adanya kemiskinan dan pengangguran di Kota Depok, serta indeks gini yang potensial menuju ketidakmerataan pada 2 tahun terakhir. Pertumbuhan kota yang pesat membawa konsekuensi memunculkan kemiskinan, tingginya pengangguran, timbulnya kawasan kumuh, masalah ketidakterjangkauan fasilitas dan pelayanan pendidikan, kesehatan dan air bersih oleh sebagian warga kota.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Berdasarkan data PPLS 2011, tingkat kemiskinan Kota Depok di tahun 2010 sebesar 2,84 % dan tahun 2012 menurun menjadi sebesar 2,75%, berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (13,33 %) maupun Provinsi Jawa Barat (10,93 %). Artinya penduduk di atas garis kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 97,25%. Tingkat kemiskinan sampai tahun 2025 diharapkan semakin menurun, meskipun terdapat kecenderungan stabil (**Grafik 4.27**).

Grafik 4.27. Kecenderungan Jumlah Orang Miskin Sampai Dengan Tahun 2025



Sumber : Diolah dari Kota Depok Dalam Angka (BPS), 2008-2013

Permasalahan kemiskinan bersifat multi dimensional dan tidak hanya sekedar masalah ekonomi-keuangan yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh pendapatan maupun kemampuan membeli barang dan jasa (pengeluaran). Konsep kemiskinan semakin luas (bukan hanya physiological deprivations, namun hingga mencakup social deprivations), penyebab kemiskinan semakin luas (termasuk sosial, politik, budaya, kekerasan dan sumber daya alam), dan fokus kemiskinan semakin dalam (mencakup hingga strategi perlindungan sosial, mitigasi dan pengurangan resiko). Kemiskinan merupakan meta masalah (masalah di atas segala masalah), sehingga untuk mengatasinya harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh masalah pada tingkat di bawahnya (*low level problem*), seperti masalah kesehatan, pendidikan, ketersediaan pangan dan nutrisi, air bersih dan sanitasi, akses permodalan, ketersediaan infrastruktur, dampak perubahan cuaca dan bencana alam, konflik dan kekerasan, stabilitas keamanan, korupsi, *bad governance* yang mengakibatkan misalokasi sumber daya alam dan ketidak-adilan sosial, kepemilikan aset produksi, nilai tukar petani/nelayan, angka kelahiran yang tinggi, pengelolaan fiskal dan moneter, hingga *bad corporate governance* yang menyebabkan *bubble economy* dan krisis keuangan.



Kompleksitas anatomi kemiskinan tersebut menyebabkan permasalahan kemiskinan tidak hanya dapat diatasi dengan pendekatan ekonomi semata, namun sangat terkait dengan dinamika sosial, politik dan budaya yang melekat dalam suatu komunitas, sehingga pengentasan kemiskinan bersifat multi-dimensi dan memerlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antar Sektor dan antar Regional. Strategi besar Pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional adalah dengan menerapkan *Four Track Strategy*, yaitu: *pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment*. Strategi 4-jalur ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (*growth with equity*) melalui perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian lingkungan. Melalui strategi tersebut diharapkan persoalan kesenjangan juga dapat semakin dikurangi.

Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Klaster Pertama: Program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin. Program utamanya adalah Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
2. Klaster Kedua: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin.



3. Klaster Ketiga: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Melalui pembagian klaster bertingkat tersebut diharapkan kelompok keluarga miskin yang awalnya menjadi penerima program klaster 1 akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan selanjutnya naik kelas menjadi penerima program klaster 2 untuk terus memperbaiki kehidupannya hingga mampu memanfaatkan program klaster 3 dan akhirnya diharapkan dapat keluar dari jeratan masalah kemiskinan. Untuk memperkuat strategi 3 klaster tersebut, diluncurkan Klaster Keempat yang terdiri dari Program Rumah Murah, Transportasi Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, serta Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan.

Secara konseptual Strategi Pengentasan Kemiskinan Nasional (*National Poverty Reduction Strategy*) adalah penting namun tidak mencukupi. Diperlukan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mempertajam program dan target penerima sasaran melalui Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang mencakup inisiatif dan kearifan lokal. Sebagai unit Pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, maka Pemerintah Daerah lebih dapat memahami dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerahnya, sehingga pelayanan publik dapat diberikan dalam jumlah yang lebih besar (*production efficiency*), sumber daya dialokasikan lebih efektif dan akuntabel (*allocation efficiency and accountabel*) serta partisipasi dan aspirasi masyarakat lebih diakomodasi (*empowerment and participation*), termasuk kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.



Disamping penajaman program pengentasan kemiskinan dan target sasaran serta penguatan partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan penting untuk memastikan situasi yang kondusif di wilayahnya. Pemerintah Daerah perlu pula memastikan ketersediaan serta keterjangkauan kebutuhan Dasar di daerahnya agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya ekonomi yang tidak wajar, termasuk ancaman kelangkaan dan kenaikan harga (inflasi) bahan pokok. Pemahaman yang mendalam dari Pemerintah Daerah terhadap wilayahnya akan memperkuat stabilitas maupun ketahanan ekonomi sehingga kelompok masyarakat yang rentan akan terhindar dari ancaman gejolak eksternal yang akan menyebabkan mempengaruhi daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

4.3.8.2 Pengangguran

Masalah lain yang terkait dengan pembangunan manusia adalah kesempatan kerja bagi masyarakat, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang ekonomi. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Pada Tahun 2010 diprediksi angkatan kerja di Kota Depok berjumlah 814.740 jiwa. Namun berdasarkan data BPS, angkata kerja hanya berjumlah 779.963 jiwa yang kemudian meningkat menjadi 815.062 jiwa pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi peningkatan angkatan kerja menjadi 894.860 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 608.375 jiwa dan perempuan 286.485 jiwa. Dengan demikian masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 68.669 jiwa yang terdiri atas laki-laki sekitar 50.376 jiwa dan perempuan 18.293 jiwa. Di Kota Depok yang termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 531.408 jiwa, dengan rincian 125.260 jiwa sedang sekolah, 359.951 jiwa mengurus rumahtangga dan lainnya sebanyak 46.197 jiwa sebagaimana tercantum pada **Tabel 4.9.** dibawah ini.



Tabel 4.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2013

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
1. Angkatan Kerja	608.375	84,74	286.485	40,44	894.860	62,74
a. Bekerja	557.999	91,72	268.192	93,61	826.191	92,33
b. Pengangguran	50.376	8,28	18.293	6,39	68.669	7,67
2. Bukan Angkatan Kerja	109.553	15,26	421.855	59,56	531.408	37,26
a. Sekolah	51.050	46,60	74.210	17,59	125.260	23,57
b. Mengurus RMT	21.225	19,37	338.726	80,29	359.951	67,74
c. Lainnya	37.278	34,03	8.919	2,11	46.197	8,69
J U M L A H	717.928	100	708.340	100	1.426.268	100

Sumber : Kota Depok dalam Angka (BPS), 2013

Berdasarkan kecenderungan data angkatan kerja 5 tahun terakhir, dibuat proyeksi angkatan kerja sampai dengan tahun 2025 seperti ditampilkan pada **Grafik 4.28**.

Grafik 4.28. Proyeksi Angkatan Kerja Hingga Tahun 2025



Sumber : Diolah dari Kota Depok dalam Angka (BPS), 2005-2013

Data Sakernas menunjukkan bahwa pada 2012, tingkat pengangguran terbuka Kota Depok sebesar 10,6%, di atas angka pengangguran Jawa Barat (9,8%) dan nasional (6,56%). Angka ini relatif meningkat dari tahun 2010 sebesar 8,72% (Inkesra 2012). Indikator Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat mengGrafikkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Angka pengangguran yang tinggi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas, karena hanya ditentukan oleh konsumsi bukan oleh investasi yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Kecenderungan di masa mendatang, angka pengangguran akan meningkat bersamaan dengan makin bertambahnya jumlah penduduk.



Perlu terobosan kebijakan pembangunan yang komprehensif dalam mengatasi pengangguran, tidak hanya yang bersifat langsung dengan membuka kesempatan berusaha bagi mereka, tetapi juga melalui upaya tidak langsung seperti pengendalian migrasi yang masuk ke Kota Depok dan pendidikan kejuruan. Migrasi sumberdaya manusia yang tidak berketrampilan berpotensi memicu pengangguran, kemungkinan hal inilah yang menjadi faktor penyebab tingginya angka pengangguran. Strategi peningkatan proporsi SMK yang lebih besar daripada SMU perlu dipertajam agar kurikulum SMK benar-benar berbasis kebutuhan lokal sehingga lulusan yang dihasilkan dapat langsung dengan mudah memperoleh pekerjaan.

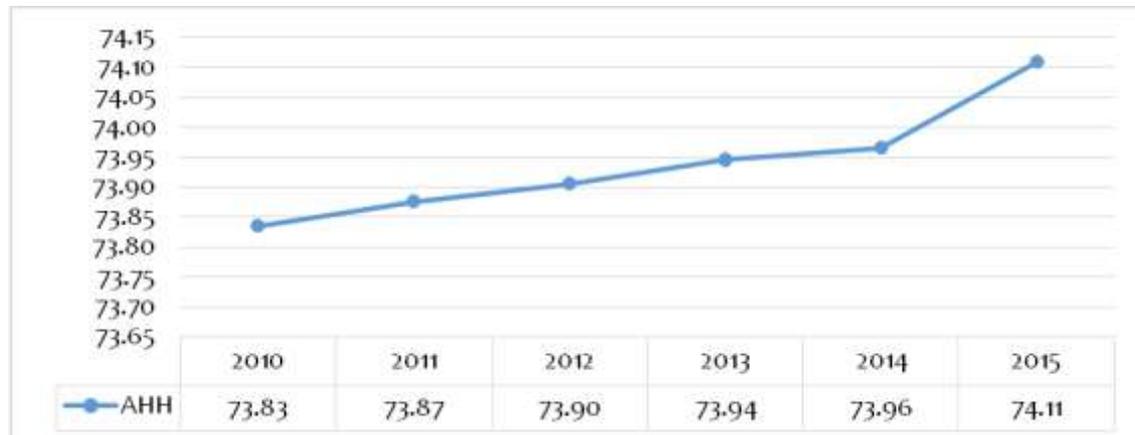
4.3.9 Kesehatan

Pengukuran daerah kesehatan salah satunya diukur oleh Indeks Kesehatan ditentukan oleh Angka Harapan Hidup (AHH). **Kegunaan** Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan **derajat kesehatan** pada khususnya. Sedangkan Indikator utama *derajat kesehatan* masyarakat adalah angka kematian bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR). Dari hasil penelitian yang ada, angka kematian bayi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan faktor-faktor lain, terutama gizi. Status gizi ibu pada waktu melahirkan, dan gizi bayi itu sendiri sebagai faktor tidak langsung sebagai penyebab kematian bayi. Oleh sebab itu, perbaikan gizi masyarakat yang difokuskan pada perbaikan gizi bayi dan anak balita merupakan awal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya kekurangan gizi pada bayi akan berakibat terhadap munculnya masalah kesehatan yang lain, dan akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya derajat kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2000).

Apabila terdapat Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan keluarga khususnya ibu hamil dan balita, program peningkatan kecukupan gizi dan kalori dan program penanggulangan kemiskinan.

Pada Tahun 2015 Angka Harapan Hidup Kota Depok terakhir mencapai 74,11 tahun, meningkat dibanding tahun 2014 (73,96tahun).

Grafik 4.29. Nilai AHH Kota Depok Tahun 2010 – 2015



Sumber: Diolah dari IPM Kota Depok 2015 dan LKPJ Depok 2015,

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2015 tercatat 1,57 perseribu kelahiran hidup atau 63 bayi dari 40.182 kelahiran hidup lebih rendah jika dibandingkan Tahun 2011 di Kota Depok sebesar 3,21 perseribu kelahiran hidup atau 119 bayi dari 38.421 dari kelahiran hidup. Sedangkan Angka prevalensi gizi buruk di Kota Depok pada Tahun 2014 sebesar 0,06% (75 kasus anak gizi buruk lebih kecil dibandingkan Tahun 2011 sebesar 0,11%(129 anak kasus gizi buruk) dan Angka kematian ibu di Kota Depok pada Tahun 2015 sebesar 34,84 per 100.000 kelahiran hidup (14kasus dari 40.182 kelahiran hidup lebih kecil dibandingkan Tahun 2011 sebesar 59,32per100.000 kelahiran hidup (22 kasus dari 38.421 kelahiran hidup). Jika dilihat dari fasilitas kesehatan di Kota Depok, saat ini Kota Depok memiliki 20 Rumah Sakit dengan satu rumah sakit milik Pemerintah Kota Depok yang terletak di wilayah barat (Sawangan), sedangkan jumlah tenaga dokter sebarannya belum ideal jika dibandingkan dengan standar Kementerian Kesehatan, pada saat ini jumlah dokter di Kota Depok mencapai 1.046 dokter (data profil kesehatan 2015).



Sebaran tenaga medis dan jumlah rumah sakit yang belum merata harus menjadi fokus pemerintah guna menunjang program Nasional *Universal Health Coverage* (UHC) untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Selain fasilitas kesehatan hal lain yang perlu dikembangkan di Kota Depok adalah sistem pelayanan kesehatan yang cepat, mudah dan transparan.

4.3.10 Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia bertujuan meningkatkan kemampuan penduduk menuju hidup yang lengkap, produktif dan menyenangkan, yang ditunjukkan oleh umur panjang, kesehatan baik, terdidik, pendapatan cukup untuk membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut dirinya. Modal manusia memegang peran sentral dalam proses pembangunan karena memberikan keuntungan yang tinggi, menghemat penggunaan modal fisik dan modal alam, menghasilkan pembangunan yang lebih cepat, berkesinambungan, serta lebih merata.

Pembangunan manusia adalah suatu upaya pembangunan kemampuan diri manusia, yang mengandung empat unsur, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.

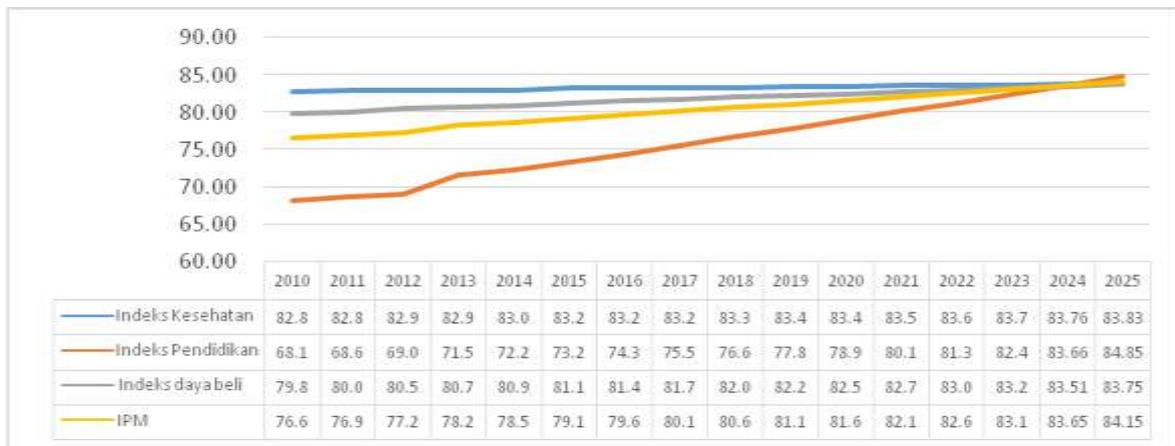
Indeks Pembangunan Manusia

Melalui berbagai program pembangunan manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok maupun para pihak terkait menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan, bahkan IPM Kota Depok merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. IPM adalah indikator yang disepakati sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia. Tingginya nilai IPM menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat rata-rata berada pada posisi sejahtera.



Pada **Grafik4.30** dapat dilihat tren IPM dan Indeks-indeks pendukungnya (indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli) sampai dengan tahun 2025.

Grafik 4.30. Proyeksi Perkembangan IPM Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2025



Sumber: Bappeda Kota Depok 2015,

Meskipun capaian agregat IPM Kota relatif tinggi, namun jika dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat Kecamatan, menunjukkan adanya gap atau ketidakmerataan nilai IPM. Berdasarkan data IPM tahun 2015, terdapat 7 kecamatan dengan nilai IPM kurang dari 79,11 (di bawah rata-rata Kota), sedangkan Kecamatan Cipayang memiliki IPM terendah, yaitu 72,94(**Tabel 4.10**). Perlu strategi pembangunan yang lebih merata dengan berbasis pada pemenuhan kebutuhan pelayanan tiap-tiap kecamatan, dalam jangka pendek difokuskan kepada kecamatan tertinggal. Jika hal itu bisa dilakukan maka pada akhirnya akan meningkatkan IPM Kota.

Penyebab utama ketertinggalan suatu wilayah terkait dengan kebijakan pembangunan yang terlalu berdimensi sektoral. Belum optimalnya pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan dapat dirasakan dari adanya ketimpangan antarwilayah. Diabaikannya dimensi spasial membuat warna pembangunan daerah ditentukan oleh mekanisme pasar. Akibatnya modal dan orang cenderung memilih wilayah yang menawarkan return yang lebih tinggi dan menarik, yang pada gilirannya wilayah yang maju semakin maju, yang tertinggal tetap tertinggal. Kedua, perlu adanya integrasi strategi pembangunan perkotaan.



Kecamatan tertinggal umumnya masih tertinggal dalam berbagai jenis infrastruktur. Dengan integrasi ini diharapkan dapat dikembangkan keterkaitan “desa”-kota. Ketiga, diperlukan *Big Push* bagi percepatan pembangunan wilayah tertinggal. Dalam konteks daerah tertinggal, “daya dorong yang besar” bisa diartikan modal dan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat-pusat bisnis, pasar, dan jejaring internasional tampaknya perlu menjadi prioritas. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan percepatan pembangunan daerah tertinggal perlu diupayakan dengan berbagai cara diantaranya melalui: (1) pemberian insentif kepada investor agar tertarik berinvestasi di daerah tertinggal, dan (2) *mainstreaming* alokasi anggaran untuk fokus pada penyelesaian ketertinggalan Wilayah.

Tabel 4.10 Nilai IPM Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Ekspektasi Lama Sekolah (EYS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Daya Beli	IPM
1	Sawangan	70.50	13.94	10.32	12,318	75.75
2	Bojongsari	71.52	13.10	9.99	11,900	74.70
3	Pancoran Mas	70.96	12.92	10.99	16,114	78.39
4	Cipayung	70.32	12.77	10.70	10,104	72.94
5	Sukmajaya	77.25	14.55	11.28	18,501	84.86
6	Cilodong	76.26	12.57	11.07	12,060	77.84
7	Cimanggis	76.42	13.99	11.27	16,243	82.60
8	Tapos	72.01	12.94	10.88	10,451	74.47
9	Beji	71.93	15.24	10.45	15,307	80.03
10	Limo	71.90	13.36	10.99	13,303	77.44
11	Cinere	74.40	12.72	11.71	20,923	83.25
00	DEPOK	74.11	13.52	10.71	14,343	79.11

Sumber : IPM Kota Depok (BPS), 2015

Peningkatan IPM membutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholder*. Sebagai indeks komposit, IPM terdiri atas sejumlah dimensi dan indikator, dan sebagian dari dimensi dan indikator tersebut bersifat *outcomes based*. Dengan kata lain, perbaikan dimensi dan indikator tersebut tidak mungkin bisa dicapai dengan program tunggal dan juga pemerintah. Implikasinya, di masa depan, perlu dibangun dan dikembangkan sinergitas antar level pemerintahan dan antar OPD serta kolaborasi antar pelaku/aktor pembangunan.



IPM merupakan indeks komposit dari 3 indeks tunggal, yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli.

1) INDEKS KESEHATAN

Indeks Kesehatan ditentukan oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup Kota Depok tahun 2015 mencapai **74,11** tahun. Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh kinerja program pembangunan kesehatan pada umumnya, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga khususnya ibu hamil dan balita, peningkatan kecukupan gizi dan kalori serta program penanggulangan kemiskinan. Tantangan ke depan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi adalah belum stabilnya pencapaian cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kompeten dan cakupan balita gizi buruk terawat, sehingga perlu upaya untuk mempertahankan tren peningkatan.

Dengan capaian AHH yang tinggi, menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kesehatan pada umumnya sudah baik, namun demikian ke depan capaian AHH masih bisa dan perlu terus ditingkatkan. Sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya, adalah membaiknya perawatan kesehatan, meningkatnya akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan, tersedianya sarana dan prasarana kesehatan secara luas dan merata, membaiknya pemahaman dan kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, membaiknya kualitas dan sanitasi lingkungan, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat, dan sebagainya.

Bidang kesehatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diperbaiki di masa mendatang, antara lain adalah :

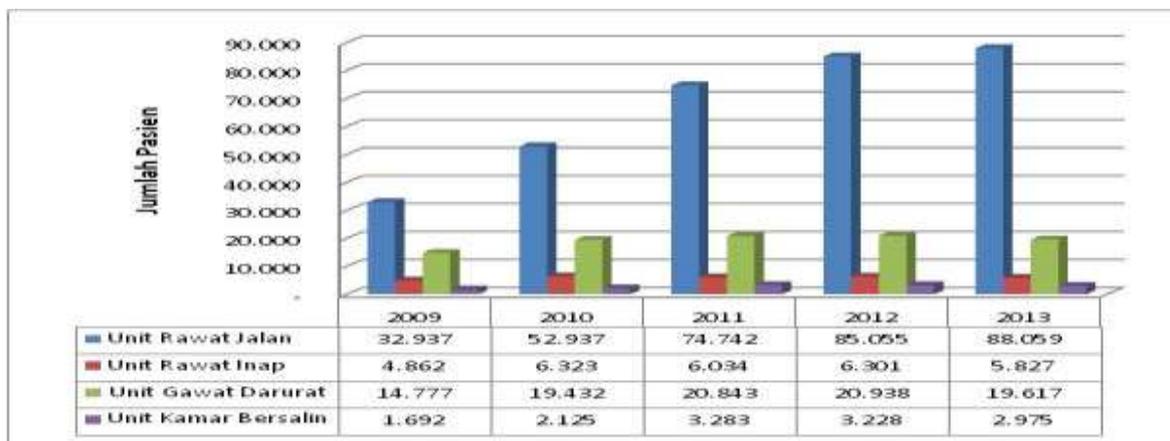
RSUD Kota Depok.

Kondisi RSUD belum memadai yaitu kekurangan fasilitas pelayanan, utamanya sarana tempat tidur dan gedung rawat inap, sehingga banyak pasien yang seharusnya rawat inap dirujuk ke Rumah Sakit lainnya.



Peningkatan kondisi RSUD perlu memperoleh perhatian karena pasien yang berobat ke RSUD semakin meningkat. Data Kunjungan pasien RSUD Kota Depok dapat terlihat pada **Grafik4.31** berikut ini.

Grafik 4.31Perkembangan Kunjungan Pasien RSUD Kota Depok



Sumber : RSUD Kota Depok, 2014

Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah rumah sakit dan puskesmas saat ini masih dirasakan kurang, jumlah rumah sakit pada tahun 2014 berjumlah 17 Rumah Sakit dengan satu rumah sakit milik pemerintah daerah. Demikian juga dengan puskesmas di Kota Depok yang baru berjumlah 32 unit dan baru 9 yang melakukan fungsi 24 jam. Demikian halnya jumlah dokter, pada tahun 2014 rasio dokter spesialis 30 per 100.000 penduduk sedangkan standar dari kementerian adalah 10 per 100.000 penduduk. Sedangkan dokter umum mencapai rasio 40/100.000 dengan standar nasional 18/100.000 penduduk, ke depan diharapkan baik sarana dan tenaga kesehatan haruslah memadai seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat.

Posyandu

Jumlah posyandu kota Depok tahun 2014 mencapai 993 unit dengan Rasio posyandu per satuan balita adalah 200 Artinya bahwa 1 buah posyandu melayani balita sebanyak 200 anak. Idealnya rasio tersebut adalah 100, artinya 1 posyandu melayani 100 balita.



TBC BTA

Cakupan penanganan TBC BTA yang cukup tinggi di Kota Depok, masih belum ideal karena sampai tahun 2012 baru ada 2 (dua) buah RS yang melaksanakan DOTS (penanganan pasien TBC secara rutin), yaitu RSUD dan RS Hermina serta 32 puskesmas. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang semua RS di Kota Depok dapat bekerjasama dan melaksanakan program DOTS bagi masyarakat Depok sehingga dapat menekan kejadian TBC BTA.

2) INDEKS PENDIDIKAN

Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Ekpekstasi Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2015EYS mencapai 13,52%.

Rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2015 mencapai 10,71 tahun. Selama kurun 2006-2015, RLS mengalami peningkatan,pada awalnya tumbuh relatif datar, tetapi sejak tahun 2010 terjadi peningkatan yang cukup berarti. Ke depan, RLS Kota Depok akan terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelayanan bidang pendidikan.

Untuk memperbaiki indikator rata-rata lama sekolah, sedikitnya ada lima perspektif yang harus dikembangkan yaitu: (1) memastikan bahwa anak-anak yang sementara duduk di bangku sekolah tetap bisa bersekolah; (2) menarik anak-anak yang putus sekolah untuk kembali duduk di bangku sekolah; (3) "memaksa" anak-anak yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi keluarga untuk berhenti bekerja dan kembali ke bangku sekolah; (4) pelayanan bidang pendidikan benar-benar sanggup menjangkau seluruh anak usia sekolah, termasuk yang berada di wilayah perbatasan dan (5) melahirkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan.



Untuk meningkatkan indikator angka melek huruf, perspektif harus diarahkan untuk (1) mendorong orang-orang yang buta huruf agar termotivasi untuk belajar menulis dan membaca, (2) merubah bentuk fasilitasi dari suasana “kelas” yang cenderung formal menjadi hubungan personal yang bersifat informal dan interaktif, (3) merawat kemampuan baca-tulis orang yang sudah melek huruf yang sebelumnya buta huruf; (4) mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan buta huruf; dan (5) menjadikan pemberantasan buta huruf sebagai sebuah “gerakan” yang berbasis kelurahan dengan model intervensi *by name by address*.

Prasarana Sekolah

Jumlah sekolah negeri masih dianggap kurang di Kota Depok. Daya tampung siswa di SMPN baru mencapai 25% dari total siswa SMP, dan kapasitas daya tampung siswa di SMAN/SMKN baru mencapai 16,6% dari total siswa SMA. Kekurangan daya tampung Sekolah Negeri diatasi oleh keberadaan sekolah swasta.

Jumlah SD di Kota Depok pada tahun 2010 sebanyak 394 buah, SMP 154 buah, sekolah SMA 48 buah dan sekolah kejuruan 79 buah. Data tersebut jauh dari yang diproyeksikan sebelumnya di mana pada tahun 2010 diharapkan tersedia 533 SD, 231 SMP, dan 164 SMA. Bahkan sampai tahun 2012, proyeksi tersebut juga belum dapat diwujudkan. Menurut Depok Dalam Angka Tahun 2012, jumlah SD sebesar 411 buah, SMP 164 buah, dan SMA sebesar 51 buah. Pertumbuhan sarana pendidikan dasar diperkirakan tidak akan dapat mengejar pertumbuhan penduduk, meskipun jumlah bangunan SD terus bertambah. Pada tahun 2005 di Kota Depok ada 346 SD dan jumlah penduduk 1.374.522 orang, berarti untuk setiap 100.000 penduduk ada 25 SD dan rasio ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah SD meningkat menjadi 393 buah, sementara itu jumlah penduduk juga meningkat menjadi 1.813.613 sehingga jumlah SD untuk setiap 100.000 penduduk menurun menjadi 22 SD. Jika kecenderungan ini berlanjut maka di masa depan kapasitas SD dibandingkan jumlah penduduk akan lebih rendah dari saat ini.



Sebagaimana sarana pendidikan sekolah dasar, sarana pendidikan SLTP di Kota Depok diperkirakan juga tidak akan dapat mengejar pertumbuhan penduduk. Meskipun jumlah bangunan SLTP terus bertambah, namun perbandingan antara jumlah SLTP dengan jumlah penduduk terus menurun sejak tahun 2000. Jika kecenderungan ini berlanjut maka di masa depan kapasitas SLTP dibandingkan jumlah penduduk akan lebih kecil dari saat ini. Saat ini jumlah SLTP ada sebanyak 131 dengan murid sebanyak 43.463 murid sehingga setiap 100.000 penduduk ada 10 SLTP. Pada tahun 2011 setiap 100.000 penduduk ada 9 SLTP, diperkirakan pada tahun 2015 hanya ada 8 SLTP, pada tahun 2020 ada 8 SLTP dan diperkirakan tahun 2025 ada 7 SLTP.

Sarana pendidikan SLTA agak berbeda dengan sarana sekolah dasar, diperkirakan pertumbuhan jumlah SLTA akan sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga dari tahun 2000 yang lalu sampai tahun 2020 kelak perbandingan jumlah SLTA dengan jumlah penduduk di Kota Depok selalu tetap sebesar 7 SLTA untuk setiap 100.000 penduduk. Ini berarti kelak di masa depan persentase penduduk Kota Depok yang pernah mengenyam bangku SLTA akan semakin sedikit. Banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor ekonomi, banyaknya anak-anak jalanan, sulitnya lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

3) INDEKS DAYA BELI

Kesejahteraan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, hal itu terlihat dari daya beli yang diukur dari pengeluaran perkapita di Kota Depok sebesar 14,343 ribu rupiah pada tahun 2015. Selama kurun waktu 2007-2015 daya beli Kota Depok mengalami peningkatan dan diperkirakan akan terus meningkat pada masa mendatang. Tantangan potensial terhadap daya beli adalah angka kesempatan kerja yang terbatas dan inflasi yang tinggi. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi harus dipacu lebih berkualitas sehingga serapan terhadap angkatan kerja bisa lebih tinggi.



Dalam jangka menengah dan panjang, strategi utama untuk meningkatkan pendapatan atau pengeluaran per kapita perlu difokuskan pada dua aspek utama. **Pertama**, menjaga dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, melalui (1) Peningkatan arus investasi, baik asing maupun domestik, melalui implementasi berbagai kebijakan seperti promosi investasi, pengembangan kemitraan, insentif fiskal, reformasi birokrasi, dsb.; (2) Peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur, terutama yang menunjang aktivitas perekonomian, seperti jalan, pergudangan, irigasi, dan sebagainya; (3) memberi perhatian terhadap sektor-sektor ekonomi yang memiliki elastisitas tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja, seperti sektor industri manufaktur, perdagangann dan jasa, dan sebagainya.

Kedua, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk harus ditekan sedemikian rupa sehingga berada di bawah satu persen per tahun. Ini diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak yang lebih berarti bagi perbaikan taraf hidup masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan pendapatan atau pengeluaran per kapita.